BALAIRUNG

EDISI NO. 20/TH. VIII/1994

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA Rp. 2.200,00



KALAU SERDADU RINDU TOGA



Suprapto Suryodarmo :
Penari dengan Meditasi Gerak

ISSN : 0215 - 076X



KEBEBASAN pers, idealnya bukan hanya terbatas pada kebebasan untuk mengungkapkan fakta, tetapi juga kebebasan untuk menembus akses informasi. Namun yang ideal tidak selalu terjadi di lapangan. Setidak-tidaknya inilah benturan yang dialami oleh kru BALAIRUNG tatkala mencoba mengendus dapur AKMIL dalam menyiapkan Laporan Utama edisi ini.

Ketika BALAIRUNG memilih perubahan kurikulum di tubuh AKABRI sebagai tema utama, kami sadar betul bahwa menembus tangsi militer betapa sulitnya.Kami memilih mencoba dari bawah, langsung ke AKMIL Magelang, namun tampaknya isu ini masih tertutup untuk diungkap. Ini terbukti tatkala kami mengirimkan reporter kesana. Lobi personal dengan beberapa perwira untuk mengungkap kurikulum baru ini pun tidak membawa hasil.Setelah merasakan dipingpong kesana kemari, akhirnya kami berinisiatif untuk berkirim surat secara formal demi secercah informasi, tentunya untuk sidang pembaca yang budiman. Selang beberapa hari kami mendapat jawaban dari AKMIL secara resmi pula, bahwa mereka mau membuka informasi itu kalau ada rekomendasi dari Pangab.

Pembaca yang budiman, hampir saja reporter kami putus asa. Jangan-jangan ini memang mustahil untuk diungkap karena menyangkut rahasia negara. Bahkan beberapa anggota dewan redaksi sempat mengusulkan pergantian tema. Tentunya pergantian tema tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena selain harus digodog lewat Litbang, menurut tradisi Majalah BALAIRUNG, maka kami harus mengadakan Temu Wicara dengan para pakar terkait. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang. Akhirnya kami berinisiatif untuk langsung menembus ke pusat. Di luar perkiraan kami Komandan Akabri Marsda FX. Suwarno, ternyata cukup ramah. Bahkan, hanya dengan mengangkat telpon, akhirnya dicapai kesepakatan untuk wawancara.



BAYU

Eriyanto ketika mewawancarai Komandan AKABRI
Di sini dilarang bicara politik

Ternyata Markas AKABRI jauh lebih terbuka daripada AKMIL, dengan catatan jangan tanya masalah politik, karena itu wewenang Mabes ABRI Beberapa staf ahli yang merupakan think thank-nya AKABRI menerangkan dengan cukup gamblang. Bahkan kami disodori berbagai bahan guna penyusunan tema ini.

Belakangan, kami baru tahu kalau AKABRI memang sedang bangga-bangganya mengkampanyekan konsep perubahan kurikulumnya. Maka gayung pun bersambut. Kami berharap Laput kali ini bisa membuka dialog antara militer dan sipil. Karena menurut kami , apabila sesuatu ditabukan , justru akan membuat jarak hubungan semakin renggang. Syukur-syukur kalau Laporan ini bisa menjadi masukan di dalam penerapan kurikulum baru, yang menurut informasi yang kami terima baru akan dilaksanakan tahun 1996. Atau setidak-tidaknya, inilah suara dari akademisi sipil untuk Akademi Militer.

Penjaga dapur.

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

□ **Diterbitkan oleh** Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM) □ **Ijin Terbit** SK MENPEN RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK Rektor No.UGM/UM/01/37 □ **International Sandard Serial Number** (ISSN): 0215-076X □ **Pelindung**: Prof.Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com (Rektor UGM) □ **Penasehat**: Ir.Haryana,M.Arch (Purek III UGM), Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, Drs. Amir Effendi Siregar, MA, Ir. Abdul Hamid Dipopramono □ **Pemimpin Umum/Penanggung Jawab**: Sunarto Cipto Harjono □ **Sekretaris Umum**: Indriaswati DS □ **Pemimpin Redaksi**: Iwan Kurniawan □ **Sekretaris Redaksi**: Poppy SW □ **Ka. Litbang**: Anthony Dio Martin □ **Staf Litbang**: IM Agus Dwiatmiko, Bimo Nugroho S. □ **Pemimpin Perusahaan**: Rahmi Lestarini □ **Sekretaris Perusahaan**: Hastarini □ **Kabag Iklan**: Wardana □ **Kabag Keuangan**: I A Trisnawati □ **Kabag Promosi**: Gutomo Bayu Aji (non aktif) □ **Kabag Distribusi**: T Sunoto □ **Staf Perusahaan**: Risdianto, Arif Rahman Hakim, La Hisaaba □ **Redaktur Pelaksana**: Frans Sudiarsis, Suluh Pratithasari □ **Redaktur**: Eriyanto, Hary Prabowo, Djujur T Susila, Dwi Soufnita, Danarti W, □ **Redaktur Artistik**: Ratih Pratiwi □ **Staf Artistik**: Lukman Hakim, MJA Nasher, Pedy Artsanti □ **Redaktur Foto**: Timbul Sunoto □ **Fotografer**: Prayudi (non aktif) □ **Reporter**: Dewi Ratna Wulan, Rinda R Anitasari, Ririn Fatmasari (non aktif), Asip Agus Hasani, Gutomo Bayu Aji, Nugroho T Broto (non aktif), Penny S; Aris Purnomo, Laits Abit, Nurchoiron (non aktif), Wisnu Martha, Gunawan Sojang, Abdul Fattah □ **Pemimpin Produksi**: Sisdaryono (non aktif) □ **Alamat redaksi**: Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281, Telp (0274) 901071 (Pos Satpam), Fax (0274) 63123 (via Kandatel Yogyakarta) □ **Bank**: TAPLUS BNI Cabang UGM No. Rek. 780.483.081, Tabungan MITRA BAPINDO Cab. UGM No. Rek. 22.1.5027.66.1 □ **Percetakan**: Liberty Offset, Jl. Jayengprawiran 21 Yogyakarta, Telp. 2908. Isi di luar tanggung jawab percetakan.



BADAN PENERBIT PERS MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA □ **Ketua Umum**: Israr Ardiansyah □ **Sekretaris Umum**: Rahmi Lestarini □ **Bendahara Umum**: Sri Wiyanti □ **Ketua Departemen Pengkajian Pelatihan**: Yul Amrozi □ **Bendahara P&P**: Deny □ **Sekretaris P&P**: Ari Ujianto □ **Ketua Bidang Pelatihan**: Karno Ashadi Suwarso □ **Ketua Bidang Pengkajian**: Amril □ **Ketua Bidang Humas**: Nuswantoro □ **Ketua Departemen Penerbitan Suratkabar**: Susaptyo Banu Ardi □ **Ketua Departemen Penerbitan Majalah**: Sunarto Cipto Harjono.

Redaksi menerima tulisan dan foto terutama yang menawarkan alternatif-alternatif pemikiran kritis, reflektif, dan inovatif. Naskah diketik di atas kertas folio berspasi ganda, untuk OPINI dan KOLOM 2 halaman , dan ARTIKEL LEPAS 7 halaman. Yang tidak dimuat akan dikembalikan bila disertai perangko secukupnya.

BALAIRUNG

ISI



LAPORAN UTAMA

KALAU SERDADU MERINDUKAN TOGA

AKABRI mengayunkan melangkah menuju strata-1. Tujuannya, seperti yang dilontarkan oleh Danjen AKABRI adalah mengikuti dinamika masyarakat. Tetapi kalangan sipil mulai was-was akan implikasi yang ditimbulkannya. Gelar sarjana akan menjadi legitimasi baru bagi kaum militer untuk memasuki ruang-ruang sipil. 13

LINGKUNGAN

EROTISME KARIMUNJAWA

Kerusakan terumbu karang di perairan Karimunjawa sudah mencapai tahap kronis. Padahal untuk tumbuh seperti keadaan semula, dibutuhkan waktu berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun. Sementara, konservasi dan pengembangan taman wisata baru sebatas rencana. Tapi tampaknya erotisme Karimunjawa menggiurkan para konglomerat sehingga mereka segera mengkaplingnya. 47

INSAN WAWASAN

SUPRAPTO SURYO DARMO

Murid-muridnya berdatangan dari Amerika, Inggris, Swiss dan negara-negara manca lain. Mereka belajar tentang meditasi gerak, suatu format gerak tubuh untuk mentransformasikan elemen-elemen yang terpendam dalam diri manusia, untuk dijelmakan menjadi tarian dengan kesadaran baru. "Begawan" dari Padepokan Lemah Putih ini, juga bertutur tentang budaya, Tuhan, dan Filsafat Jawa yang diyakininya. 66



JEPRET

DOA SEORANG DEMONSTRAN



Anak-anak bangsa berbondong-bondong turun ke jalan raya, menagih janji penguasa. Walaupun bilur-bilur bekas sabetan rotan menghias punggungnya, mereka terus merangsek memprotes pembungkaman pers serta berdoa demi sepotong keberanian. 43

LAPSUS

YANG KETLINGSUT DARI PEMBREIDELAN

Sampai kini, orang masih bertanya, mengapa TEMPO, DeTIK dan Editor harus dibreidel. Tak satu pun media resmi yang berani mengungkapnya, karena merka hidup dalam suasana ketakutan. Ada apakah gerangan? 61



Cover by MfA Nasbex, design by Oni



Eksotisme dan erotisme Candi Sukuh, Karanganyar, Jawa Tengah

Mungkin hanya di Sukuh-lah, lingga-yoni memperoleh tempat terhormatnya, meski sekarangpun sering disalahtafsirkan

Tentang Diklat Itu

Pertama-tama saya ucapkan selamat bagi Badan Penerbit Pers Mahasiswa (BPPM-UGM) yang telah sukses menyelesaikan salah satu *gawe* berupa Diklat Jurnalistik Tingkat Lanjut V (21-26 September 1994). Kebetulan dalam kegiatan itu saya adalah salah satu peserta. Jadi melalui rubrik ini saya *pengin* mengkritik penyelenggaraan acara itu.

Tema yang ditawarkan, yaitu *Pers Mahasiswa sebagai Pers Alternatif*, sebenarnya mempunyai bobot lebih. Sayangnya acara ini tidak didesain sedemikian rupa sehingga tema yang ditawarkan bisa dijabarkan dalam materi-materi serta praktik lapangan yang diberikan. Akibatnya, tema hanya dimengerti oleh segelintir peserta saja.

Memang, kami kira panitia sudah berusaha untuk menyentuh tema itu lewat materi yang diberikan oleh Dr. Riswanda Himawan dan Yussac F. Ananda serta melalui beberapa diskusi kelompok. Tetapi saya pikir waktunya sangat minim, sehingga pembahasan atas tema itu tidak optimal. Kami sayangkan , kenapa tema itu tidak ditindaklanjuti, misalnya dengan menawarkan kesepakatan bersama.

Namun bagaimanapun juga keseluruhan diklat berjalan cukup baik. Semoga BPPM di masa yang akan datang bisa membuat acara yang lebih berkualitas, dengan belajar pada pengalaman yang sudah-sudah.

Triaji Susandhi
Pemimpin Redaksi 'PROSPEK'
FPIPS IKIP Yogyakarta.

Terimakasih atas kritik dan sarannya. Memang ada kelemahan disana sini karena berbagai kendala. Terutama luasnya cakupan tema yang kami tawarkan, sehingga ada kesulitan dalam penjabarannya dalam materi dan praktek. Ditambah dengan heterogenitas peserta yang berangkat tidak pada level yang sama. Sedangkan untuk menindak lanjuti Tema itu kami serakan pada masing-masing penerbitan, mengingat tantangan yang dihadapi masing-masing kampus berbeda.

Karno Ashadi Suwarso
Koordinator SC
Panitia Diklat Jurnalistik Mahasiswa
Tingkat Lanjut V BPPM-UGM

Ralat Berita Duka

Dengan ini kami ingin meluruskan kesalahan cetak yang cukup mengganggu pada ucapan duka cita yang dimuat Balairung Edisi Khusus/ Th VIII/1994 hal 56, dimana tertulis:

1. Mahapurwa Adigama (Ikatan Mahasiswa Alumni SMAN 1 Purwokerto di UGM)
2. Teguh P. Widhayaka (24 th)
Ketua I Mahapurwa Adigama Periode 1992-1993.

Seharusnya tertulis:

1. Mahapura Adigama (Ikatan Mahasiswa Alumni SMAN 1 Purworejo di UGM)
2. Teguh P. Widhayaka (24 th)
Ketua I Mahapurwa Adigama Periode 1991-1993.

Beni Pudjiantoro
Ketua Umum
Mahapurwa Adigama

Mohon Maaf atas kesalahan tersebut, dengan demikian surat ini sekaligus sebagai ralat. (red)

Balairung Terasa Berat

Saya melihat BALAIRUNG mengkhusukan diri untuk kalangan "berpikir". Sebab paling tidak BALAIRUNG tidak bisa dimengerti dengan sekedar membaca judulnya saja. Terasa berat untuk mahasiswa yang baru kenal dengan pers kampus, walau penampilannya menarik.

Saya cukup terkesan karena BALAIRUNG cukup punya nyali untuk menyatakan bahwa A itu A dan bukan B seperti yang disuruh oleh yang diatas. Saya harap momentum ini dijaga agar BALAIRUNG benar-benar konsekuen dan tetap nyaring.

Dini Rouzha
FISIP UNSOED

Barangkali yang anda baca adalah edisi Balairung Edisi Khusus Th. VIII/1994. Edisi itu memang sengaja untuk menampung tulisan-tulisan "serius" dari penulis yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk edisi yang biasa BALAIRUNG barangkali lebih "ngepop" seperti yang anda harapkan.(Red)

Maaf untuk Pak Koes

Ada kejanggalan padan laporan yang dimuat pada rubrik kemahasiswaan Edisi Khusus Th VIII/1994, yang berjudul "Pemilihan Rektor UGM, Tak Semudah Memilih Kepala Kampung". Disitu

tercantum hasil angket tentang rektor pilihan mahasiswa yang menyebutkan Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH pada urutan ke sembilan dengan mendapatkan 7 suara. Seharusnya Pak Koesnadi tidak masuk nominasi karena kriteria syarat usia untuk seorang rektor UGM tidak terpenuhi. Dengan demikian, berarti kesalahan ada pada tim angket. Untuk itu, kepada para pembaca dan khususnya kepada Bapak Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Pemimpin Redaksi
atas nama
Tim Angket Majalah Balairung

MANA EKSAKTA ?

Apabila kita mencermati edisi khusus BALAIRUNG yang lalu, kita dapat melihat bahwa artikel-artikel yang disajikan porsinya lebih banyak mengenai masalah sosial-politik. Sedangkan untuk masalah-masalah eksakta masih sedikit sekali. Padahal, sesungguhnya banyak sekali tema-tema yang dapat diangkat dari bidang eksakta seperti masalah lingkungan yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan, masalah bioteknologi, industri ataupun tentang ilmu-ilmu murni.

Di samping itu, kita juga perlu mengingat bahwa BALAIRUNG sebagai majalah universitas hendaknya dapat menampung aspirasi mahasiswa dari semua fakultas di UGM yang meliputi baik bidang eksakta maupun non eksakta. Sehingga perlu ada keseimbangan diantara keduanya pada artikel-artikel di BALAIRUNG. Hal ini juga tampak dari tema-tema Laput BALAIRUNG yang didominasi oleh masalah sosial-politik. Tidak ada salahnya jika BALAIRUNG mencoba untuk mengangkat masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang eksakta. Selamat mencoba!

Yuwono K R
TE-UGM

SAYA TERTIPU !

Sekilas dari penampilannya BALAIRUNG tampak eksklusif dan berwibawa. Terus terang, hal ini merupakan daya tarik tersendiri dari BALAIRUNG hingga ada keinginan untuk sekedar melihat-lihat. Tetapi kemudian saya merasa tertipu setelah saya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ternyata, artistik BALAIRUNG kurang berani "bernyanyi". Hal ini mungkin disebabkan karena adanya dominasi komputer, pakem-pakem dari jenis huruf yang ada maupun pengerjaannya yang dilakukan secara *kesusu*. Tapi yang jelas, nada-nada -- dalam hal ini komposisi bentuk, *body text*, ilustrasi dan *point* penekanan tertentu -- yang seharusnya menciptakan irama tersendiri dalam menikmati halaman per halaman menjadi kurang terasa. Bahkan yang terasa menggangu adalah terdapat ruang-ruang kosong/ilustrasi-ilustrasi yang tidak saya mengerti maksudnya. Terakhir, harapan saya semoga ini bukan ketidaksengajaan.

Hidayatullah
Biologi-UGM

TIMBUL

KEPADA PARA Filosof

Setangkai rinduku
telah berdarah
di sejarahnya kini
yang mampat

ADALAH filsafat, yang melesat bagai anak panah dari negeri Yunani itu, konon dikenal sebagai *The mother of knowledge*, yang dari rahimnya telah melahirkan ilmu-ilmu baru sebagai putra-putranya dengan cara merubuhkan konfigurasi mitologis, membabat habis takhayul-takhayul yang ada bagai Pandawa Lima *babat alas* Amarta; sejarah pemikiran merambat di bawah panglima para filosof sebagai sosok nabi-nabi peradaban.. Bila kita membuka *file* sejarah filsafat, niscaya kita segera kenal siapa itu mereka. Ada Socrates, Aristoteles, Descartes, Immanuel Kant, Schelling, Hegel, atau yang cukup kondang *almukharrom* Karl Marx., nabinya para buruh dan proletar itu.

Menengok kembali perkembangan ilmu filsafat sejak jaman Yunani Kuno, niscaya kita akan menikmati betul simbiose mutualisme filsafat. Para filosof kala itu benar-benar bermain petak umpet dengan hakikat, roh kehidupan. Mereka mencoba mendirikan balairung pemahaman akan alam semesta dengan segenap kemampuan rasionalitas. Cakrawala pemahaman pun mulai tersibak *jembar*, khazanah pemikiran menjadi kaya.

Kemudian filsafat melebar dari ladang ke ladang, dari hakikat satu ke hakekat yang lain., demikian maha luas ternyata jagat makna ini. Pasar Filsafat pun semakin ramai dan semarak, ada transaksi pemikiran, tawar-menawar pemahaman dan ideologi, bahkan tak jarang terjadi perkelahian di antara sesama para pendekarnya. Namun yang pokok mereka semua melakukan persetubuhan ilmu dan makna untuk kelahiran suatu genesis baru bagi sejarah kebudayaan manusia.

Dan siapa pun yang pernah membuka *file* sejarah filsafat akan segera tahu, bagaimana dari ayat-ayat filsafat di kitab peristiwa, merekam realitas proses genesis yang panjang, keras, dan tak jarang sangat menyakitkan. Pemikiran para filosof kadang terlalu modern dari konteks sejarah masyarakatnya, atau karena *design interior in the wall of house of philosophy* terlalu esoteris, sehingga terdapat pembunuhan terhadap filosof dengan mengatasnamakan kebenaran yang dipahami secara buta. Atau kalau tidak dibunuh, minimal mereka dicap rada sinting yang omongannya tak perlu didengar.

Memang benar filsafat dahulu kala penuh dengan cerita tentang kemegahan dan keelokan. Tapi sudahlah, tak perlu terlalu romantis. Jangan pula memitoskan filsafat sehingga jadi dongeng yang indah sebelum bobok bagi mahasiswa filsafat. Berhenti dari igauan ini, segera saja kita bertanya, bagaimana kabarnya filsafat hari ini? Apa kabarmu wahai para filosof. di paruh abad ke-20 ini? Di mana saja kalian pada ngumpet? Kabarnya putra-putramu pada sibuk aksi, sampai lupa kontemplasi. Padahal sejarah sudah lama merindukanmu!

Secara mikro,. pada tataran empiris-kognitif, para ahli filsafat saat ini terlalu "super-historis", terlalu serius menengok ke masa lampau dan alpa menengok ke masa kini untuk melaksanakan agenda pembangunan filsafat secara murni dan konsekuen, jadinya mereka menjadi orang-orang romantis yang kehilangan kejayaan masa kini. Pada sisi lain, mereka demikian sibuk berkutat dari alat ke alat, teori ke teori, sehingga pisau analitis-kritis tak sempat terhunus untuk merobek kesumpekan persoalan hidup di masa kini. Sebagai pisau, filsafat kurang *landhep* untuk menikam. Sebagai pedang, filsafat gagal menyembelih takhayul-takhayul yang ada. *So*, filsafat memang telah menjadi *The mother of knowledge* yang bersedih hati, ditinggal anak-anaknya secara *fait a comply*,

Bicara tentang filsafat hari ini, insya Allah, kita akan bertumbukan dengan sebuah tanda tanya besar. Dan begitu kita melongok ke fakultas filsafat, niscaya akan mendapati prototipe putra-putra agung filsafat yang tidak begiu hobi kontemplasi. Sedang para maha gurunya, adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang hanya bisa bernyanyi "Garuda Pancasila", dan selebihnya adalah ceramah di ruang kuliah tentang gincu-gincu ilmu yang tidak ada kaitannya dengan apa-apa dan cukup membingungkan.. Suatu tradisi yang rasanya tidak pernah ada dalam jagat kebudayaan filsafat atau ayat-ayat dalam kitab ajaran filsafat yang sebenarnya. Di manakah keberadaan filsafat masa kini?

Maka sebagai kekasih filsafat, izinkanlah saya untuk menyanyikan lagu milik Katon.

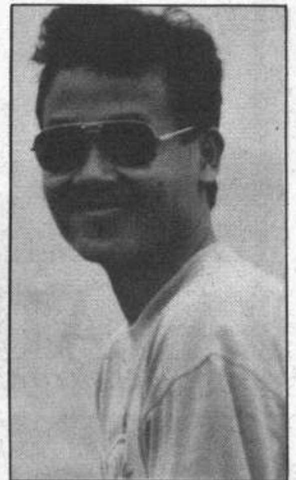
"Dinda, di manakah kau berada
rindu aku ingin jumpa..............."

Kepada para filosof, mari kita mencari Dinda kita yang raib. Mencari di kedalaman samudra makna dan ilmu. Biar tak berdarah lagi rindu kita.

Salam manis.

Hary Prabowo
Mahasiswa Filsafat Universitas Gadjah Mada
angkatan 1993

ONE-94



Prestasi
OLAH RAGA KITA

BERBICARA tentang kegiatan olah raga mahasiswa di UGM tak bisa dilepaskan dari keberadaan gelanggang mahasiswa. Tempat 28 unit yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Olah Raga beraktivitas. Banyak prestasi yang sudah terukir. Baik prestasi sebagai juara maupun prestasi menyelenggarakan *event-event* nasional sampai internasional. Semua ini tidak lain demi mempertahankan nama besar Universitas Gadjah Mada. Hingga kini prestasi-prestasi itu cukup membanggakan. Seperti tampak pada acara "Malam Sang Juara" 27 April lalu. Sampai pak Kanto terkejut dan letih memberi *applaus* pada nama-nama sang juara yang dibacakan malam itu. Di mata universitas-universitas lain pun kekuatan tim kita amat diperhitungkan.

Apakah prestasi-prestasi itu dapat terus kita pertahankan? Pertanyaan inilah yang harus kita sentakkan. Meski jawabannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apa boleh buat. Tetapi setidaknya ada tiga hal yang bisa dijadikan patokan sebuah prestasi. Yaitu fasilitas yang memadai (1), dana yang tersedia (2) dan (3) atlit yang berprestasi.

Seiring dengan makin bertambahnya jumlah unit, frekuensi aktiftas unit kegiatan maupun lembaga lain di gelanggang, hall gelanggang mahasiswa tampak semakin sempit dan terbatas untuk latihan. Apalagi setahun belakangan lapangan Pancasila telah menjadi auditorium. Praktis cabang-cabang seperti sepakbola, hoki dan atletik hanya memiliki lapangan sederhana di lembah yang tidak cukup layak buat latihan.

"UGM," menurut Pak Rektor pada acara "Malam Sang Juara", "akan membangun sarana dan prasarana olah raga yang lengkap di lembah". Sayangnya proyek mulia selesai dalam waktu yang cukup lama. Kita mesti bersabar 20 -25 tahun lagi. Ini berarti menunggu prestasi olah raga mahasiswa UGM bangkit, sementara



kemunduran dalam waktu lama menjadi kemungkinan terbesar. Jika menilik peralatan yang dimiliki unit, sebagian besar sudah tidak layak pakai. Hingga melihat gudangnya mirip dengan sebuah meseum. Seperti inilah unit-unit berusaha melanjutkan tradisi prestasi gemilang olah raga UGM.

Di sisi lain belum pernah sekalipun unit-unit olah raga menerima dana pembinaan rutin dari universitas. Kecuali kalau ada *event-event* tertentu. Kepada para pengurus yang entah bagaimana caranya menghidupi unitlah kelangsungan aktifitas digantungkan. Bahkan ada unit yang dengan terpaksa menarik iuran dari para anggotanya. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena bagaimanapun mahasiswa tiap semester sudah membayar dan selayaknya mendapat fasilitas yang ada di UGM. Dengan begitu hanya unit-unit yang kreatif dan pengurusnya mau berkorban sajalah yang bisa *exist.*

Tampaknya zaman keemasan olah raga mahasiswa di UGM akan berakhir tahun ini. Tidak lain karena dukungan atlet-atlet berprestasi yang dipasok program "D3 Atlet Berprestasi" yang dicanangkan Pak Koesnadi Hardja Soemantri dipungkasi tahun 1989. Praktis sebagian besar mahasiswa produk program tersebut menyelesaikan studinya tahun ini. Zaman emas untuk tahun-tahun mendatang, dapat kita perhitungkan sulit kita rengkuh kembali. Lebih-lebih sebagian besar anggota yang baru masuk unit-unit olah raga beranjak dari kemampuan nol. Sungguh tidak mungkin mencetak atlet berprestasi hanya lewat latihan di unit. Hingga yang tampak di unit lebih banyak pengurusnya ketimbang atletnya.

Melihat hal itu kita semakin sadar bahwa meningkatkan prestasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu peran universitas amat penting. Memberikan dana pembinaan rutin dan kembali dibuka program "Bebas Masuk D3 Bagi Atlet Berprestasi" bisa menjadi solusi.

Akhirnya kita semua berharap prestasi olah raga UGM dapat kita pertahankan. Semoga.

Budi Susilo
Ketua Sekretariat Bersama Olah Raga UGM

Terima Kasih

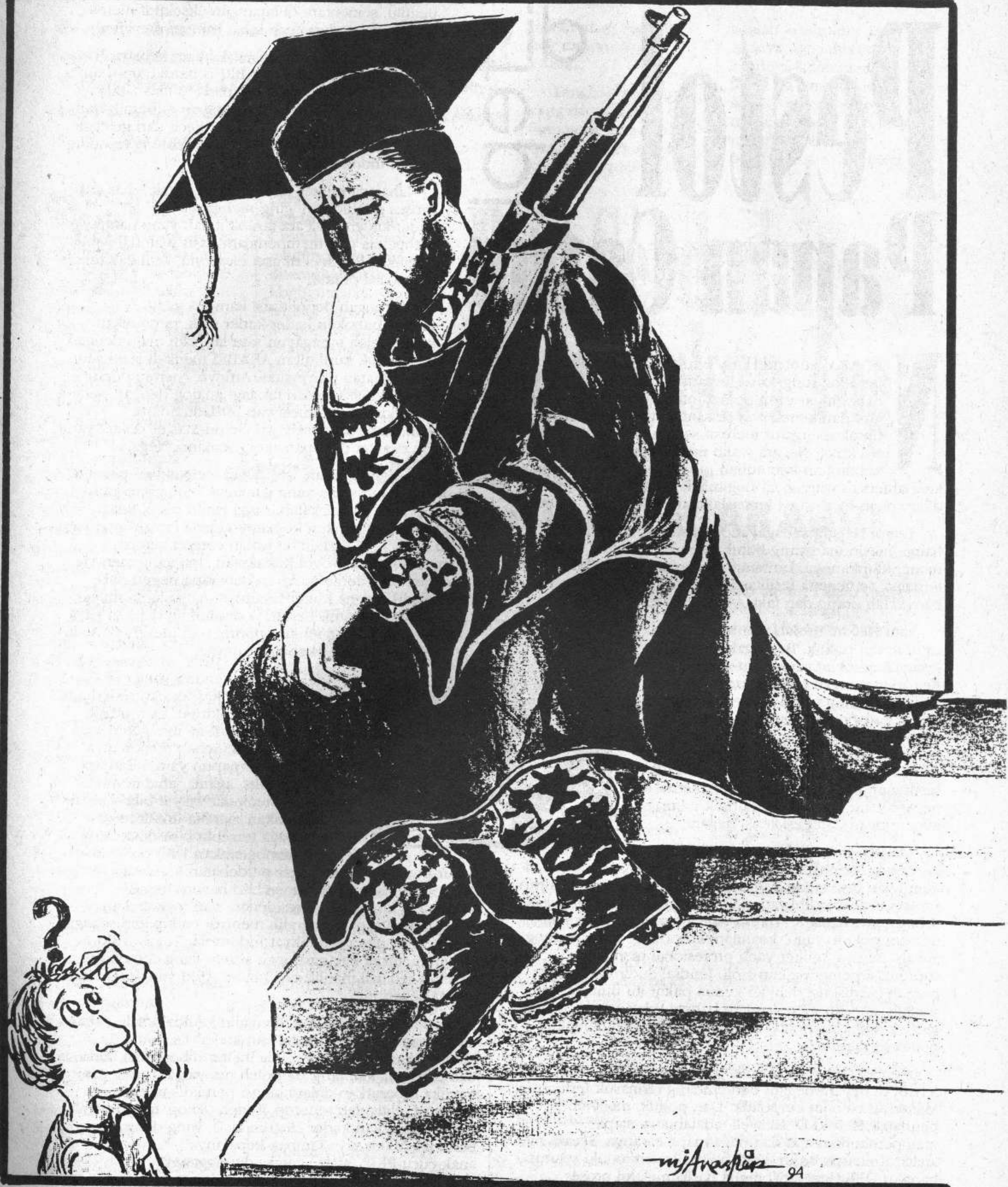
PENGURUS PUSAT
KAGAMA

PENGURUS KAGAMA
JAKARTA

MASYARAKAT PERHUTANAN
INDONESIA

atas bantuan yang tak terhingga dalam
PROGRAM PENGADAAN KOMPUTER
semoga senantiasa menjadi amal ibadahNya

Keluarga Besar
Majalah Mahasiswa UGM
BALAIRUNG



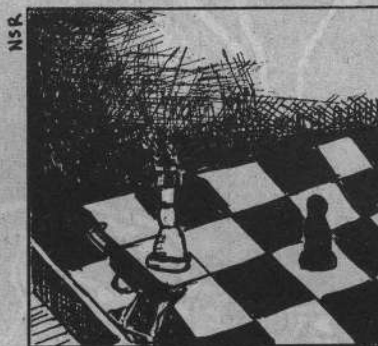
?
mjArasepiez 94

Pestol di tepi Papan Catur

NEGARA, gumam Harry Ekcstein, merupakan jawaban fungsional terhadap kekacauan masyarakat yang pernah utuh. Negara mewarisi hak dan kebebasan masyarakat tersebut, justru untuk mengatur mereka semua. Sebagai imbal baliknya, Negara wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik demi mewujudkan kesejahteraan warganya. Begitulah, munculnya negara diharapkan membawa kemaslahatan hidup umat manusia.

Tetapi Negara sebagai supra institusi, ternyata toh hanya mesin mati yang butuh personalia untuk menghidupkannya. Lantaran personalia yang dibutuhkan terbatas, sementara fasilitas kekuasaan begitu besar, banyaklah orang dan faksi yang tergiur.

Lalu Negara seolah menjadi papan catur sosial politik. Berbagai ide dan kepentingan bertarung satu sama lain. Agar pertarungan berlangsung *fair* dan tiada faksi yang tiba-tiba menggebrak papan catur hingga hancur, diperlukan adanya aparatus yang netral di luar arena pertandingan untuk menegakkan aturan main. Militer adalah salah satunya. Jadi, sesungguhnyalah militer merupakan alat negara yang dipersenjatai untuk menjaga kepentingan dan eksistensi negara.



Adalah Samuel Huntington (lewat karyanya *The Soldier and The State*) yang kemudian disepakati Perlmutter, melihat betapa perlunya profesionalisme dihayati oleh kaum angkatan bersenjata sebagai alat negara. Profesionalisme militer itu memiliki tiga ciri pokok, yaitu: keahlian, korporasi, dan tanggung jawab. Intinya, militer yang profesional mengakui supremasi pemerintahan sipil. Jendral Sudirman, tanpa pernah berdiskusi dengan kedua pakar itu pun, sangat waskita dengan menekankan bahwa tidak ada itu politik tentara republik, politik tentara sepenuhnya mengikuti politik pemerintah.

Mereka tentu bakal *melongo* bila menyimak apa yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Militer justru rajin berpolitik. Dan politik, menyitir pendapat Harold D. Laswell, adalah soal siapa memperebutkan apa dan bagaimana caranya. Secara riil, anasir Keluarga Besar ABRI berhasil menduduki seratus bangku DPR (legislatif) tanpa harus melalui proses pemilu, sementara di lapangan eksekutif mereka berjaya sejak dari kursi lurah sampai presiden.

Sangat naif bila kompetisi antara keluarga besar sipil dan keluarga besar ABRI coba ditutup-tutupi. Persaingan calon pimpinan pada Munas Golkar, riuhnya adu jago bakal bupati atau gubernur dan sebagainya, adalah riak ombak kecil dari gelegak pergelutan sipil-militer di pusaran palung samudra politik Indonesia.

Lihainya militer Indonesia tentu tak lepas dari proses pendidikan yang *menggodhog* kader-kadernya. Para taruna itulah yang nantinya mengelola dan mempertajam basis material yang dimiliki ABRI seperti aset ekonomi, keahlian teknis dan sosial politik.

Di tengah depolitisasi kampus yang meninabobokan kader-kader sipil, pendidikan militer telah mengayun satu langkah maju dengan merombak kurikulum AKABRI menjadi setingkat sekolah tinggi atau universitas. Artinya, "pertempuran" sipil-militer di masa depan tak lagi analog dengan perang antara pemikir Athena melawan serdadu Sparta. Melainkan, sama-sama sebagai Grand-Master politik yang mengadu strategi di papan catur bernama Negara.

Namun, ketika salah satu pihak meletakkan pistol di sisi papan catur, siapa yang gamang? Seumpama pun strategi politik militer kalah, siapa jamin pistol tidak diangkat dan diarahkan ke batok kepala lawan? Apa yang terjadi di Chile dan Haiti hanyalah contoh betapa kasarnya militer merogol kekuasaan sipil yang menang lewat cara-cara demokratis. Di beberapa negeri Asia, (barangkali) karena kultur timurnya, nafsu junta militer untuk berkuasa disalurkan dengan gaya yang lebih *sophisticated*, meski tak beda kadar kebengisannya.

Ada dua rekomendasi yang sebenarnya sangat kawak dan sederhana. Pertama secara struktural, merombak sistem politik Indonesia mengikuti asas kedaulatan rakyat. Sebab tidak hanya kaum militer, siapapun yang berkuasa, entah nasionalis, agama, atau komunis tetap akan menindas rakyat bila sistemnya memungkinkan mereka untuk terus korup. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan membersihkan DPR dari unsur-unsur bersenjata agar perdebatan legislatif berlangsung secara *fair*, memberi batasan tegas kekuasaan lembaga kepresidenan; dan mencairkan hegemoni satu partai beralih menjadi multipartai sebagai representasi pluralitas rakyat Indonesia. Tugas ABRI adalah menjaga kelangsungan sistem yang demokratis tersebut sebagai manifestasi bhakti ABRI yang sejati bagi rakyat negeri ini.

Kedua secara kultural, menjalin kembali dialog sipil-militer sampai level pendidikan kader. Di awal kemerdekaan, personal muda militer dibesarkan bersama dan diberi makan langsung oleh masyarakat sipil. Kini mereka dibesarkan dalam tangsi pendidikan yang eksklusif, elitis dan tertutup. Tanpa dialog, tangsi hanya akan melahirkan kader ekstrim fasis, yang dengan mudah berteriak "akan saya tembak kepalanya!", "...mereka anak-cucu PKI!", atau "...awas ditunggangi!"

Bimo Nugroho Sekundatmo

Jika ada sebuah institusi dalam Indonesia modern yang menjulang tinggi di atas institusi lain dalam hal pentingnya, maka itu adalah Angkatan Bersenjata. ABRI lebih dari sekedar sebuah institusi kekuatan dengan struktur komando: ia merupakan jiwa bangsa dan organisasi politik terbesar di negeri ini.

Bila Serdadu Merindukan Toga

dari balik perubahan kurikulum AKABRI



APA yang di tulis Michael Vatikiotis itu tidaklah berlebihan. Itulah militer kita. Godaan terbesar dari pengamat politik Indonesia adalah memandang ABRI sebagai satu variabel analisis dalam memahami skenario politik dan dinamika kehidupan negara. ABRI menjadi topik diskusi yang menarik, sekaligus riskan dan penuh teka-teki. Setiap perubahan dalam militer dicermati, apapun bentuknya. Termasuk perubahan kurikulum pendidikan militer menjadi strata-1. Orang tergelitik untuk melihat skenario besar di balik perubahan ini.

Dipastikan pada tahun ajaran 1996/1997 nanti, di AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) akan ada perubahan kurikulum, yang semula pendidikan AKABRI setara Akademi kemudian bakal naik strata setingkat sarjana universitas atau sekolah tinggi. Yang semula lulusan AKABRI punya ketrampilan berperang, kini mereka berhak menyandang gelar sarjana -- seperti lulusan universitas atau sekolah tinggi (sipil) lainnya. Mereka kini tidak saja dilengkapi bedil tetapi juga toga --lambang keilmuan dan intelektualitas.

Prediksi Harold Crouch mengenai keberadaan ABRI di masa datang barangkali ada benarnya. Menurut Crouch, ABRI pada nantinya tidak lagi ditentukan oleh konfigurasi dan tarikan kepentingan antar elit politik tetapi menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat (sipil).

Lewat makalah yang disampaikan pada seminar "Mengenang Alfian" di LIPI, ahli militer dari Australia National University ini memprediksikan bahwa ABRI akan lebih memperhatikan perkembangan dalam masyarakat dimana masyarakat menjadi semakin makmur, semakin banyak orang terpelajar dan bersikap kritis, semakin besar kelas menengah yang ingin berpartisipasi dalam politik, dan semakin komplek masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sehingga politik dalam banyak bidang perlu dirumuskan oleh para pakar, apakah pakar teknokrat ataupun teknolog. Memang mungkin ada perwira-perwira tertentu yang memiliki kepakaran yang diperlukan itu tetapi kebanyakan pakar itu terdiri dari orang sipil. Singkatnya, militer akan lebih mengedepankan sisi intelektual dan pendidikan militer akan menjadi titik tumpu yang krusial.

Langkah penting yang dapat dicatat dari fenomena itu adalah (rencana) perubahan kurikulum pendidikan AKABRI. Laksda (Purn.) Wahyono, SK, Phd, mantan Danjen AKABRI yang mencetuskan gagasan itu kepada BALAIRUNG mengatakan bahwa dengan kurikulum yang baru nanti pendidikan AKABRI yang semula tiga tahun sekarang menjadi 4 tahun. Yang semula setara akademi bakal naik strata setingkat universitas atau sekolah tinggi. Dengan demikian lulusan AKABRI nantinya berhak menyandang gelar sarjana. Perubahan kurikulum AKABRI penting diikuti lantaran AKABRI adalah tempat pertama atau basis pendidikan ABRI (gambaran mengenai pola pendidikan militer/ABRI lihat boks).

Perubahan Kurikulum

Menurut Danjen AKABRI, Marsda TNI FX. Soewarno, kurikulum yang berlaku di AKABRI saat ini adalah kurikulum 3+1. Artinya tiga tahun di akademi kemudian di lantik dan melanjutkan sesuai dengan jurusan masing-masing untuk melengkapi pembekalannya selama satu tahun. Tahap I selama 5 bulan sebagai pendidikan pra-akademi terdiri dari dasar keprajuritan di Akmil serta masa orientasi dan matrikulasi di Akademi Angkatan/Polri. Tahap II pendidikan dasar golongan dan ilmu pengetahuan sesuai profesi matra selama tiga tahun di Akademi Angkatan/Polri. Sesudah itu masuk ke pendidikan dasar kecabangan yang lamanya 9 bulan sampai 1 tahun. Dengan kurikulum baru yang direncanakan berlaku efektif 1996/1997 nanti, pendidikan AKABRI berlangsung selama 4 tahun dengan predikat langsung S-1 (sarjana).

Kurikulum AKABRI saat ini diatur sesuai surat keputusan Pangap Nomor Skep/109/11/1986 tanggal 25 Februari 1986 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Integratif AKABRI yang terbagi

dalam 2 kelompok yakni kurikulum integratif dan kurikulum matra. Kurikulum integratif untuk menjamin integrasi ABRI melalui kesamaan persepsi dan menjadi wewenang Pangap yang dalam pelaksanaannya diatur oleh Mako AKABRI. Sementara kurikulum matra menjadi wewenang kas angkatan/Polri. Disamping itu Skep No. 245/IV/1989 tentang materi pelajaran Sospol ABRI dalam kurikulum pendidikan ABRI. "Saat itu baru kurikulum integratif yang telah diusahakan. Sedangkan untuk kurikulum matra masih dalam penggodokan akademi masing-masing", lanjut Soewarno.

Perbedaan paling prinsip antara kurikulum AKABRI yang lama dan baru adalah dalam kurikulum yang baru ini sisdik (sistem pendidikan) ABRI berusaha menyambung dengan sistem pendidikan nasional. Kurikulum yang sudah ada harus dimodifikasi agar sesuai dengan ketentuan Dikti sebagai syarat pengakuan (akreditasi) pendidikan AKABRI. Bobot mata kuliah AKABRI saat ini mengandung rata-rata 120 SKS, terdiri dari 80 SKS trans ferable dan 40 SKS militer murni. Pola umum struktur kurikulum meliputi profesi/matra 40%, dukungan matra 30%, dan umum 30%. Jumlah SKS yang disyaratkan Dikti saat ini sejumlah 146 - 148 SKS, sehingga kurikulum AKABRI yang ada harus disesuaikan dengan jumlah itu. Demikian juga soal pola pengajaran. Selama ini di AKABRI berlaku jam pelajaran, sehingga harus disesuaikan menjadi satuan kredit semester (SKS). Perbandingan antara Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Khusus (MKDK) dan Mata Kuliah Keahlian (MKK) harus sesuaikan proporsinya seperti yang disyaratkan Dikti.

Selama ini, sebagaimana dikupas oleh Asdaldik (Asisten Pengendalian Pendidikan) AKABRI, Brigjend TNI Ade Pecaulima, antara sistem pendidikan ABRI jarang bisa bertemu dengan sistem pendidikan jurusan konstruksi. Bangunan air, manajemen konstruksi, transportasi maupun lapangan terbang. Yang dibutuhkan oleh seorang perwira zeni dalam profesinya bukan cuma bangunan permanen seperti itu, tetapi bangunan semi permanen, membuat dia digua, dari tanah dan sebagainya. Karena itu dasarnya adalah kimia eksplosiva yang mana hal itu telah diajarkan di sipil.


ISTIMEWA

Wisuda AKABRI
Di sini pangkat itu disematkan

nasional. Kesulitan yang dihadapi karena matakuliah pendidikan militer bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan militer sehingga berbeda dengan sipil. Pendidikan AKABRI, lanjut Ade, mengacu pada peran dwifungsi sehingga yang diselenggarakan bukan cuma persoalan militer atau hal-hal teknis, tetapi juga persoalan sosial politik.

Ade, misalnya memberi contoh Akmil (Akademi Militer) Magelang yang mempunyai jurusan diantaranya Zeni. Zeni dipersiapkan untuk jalur ilmu teknologi di ITB

Perwira-perwira juga perlu tahu soal hukum laut sampai budaya masyarakatnya. "Kurikulum gado-gado inilah yang membuat pendidikan di militer menjadi unik," lanjut Ade.

Langkah perubahan yang dilakukan oleh AKABRI ini kalau dilihat berusaha untuk mengikuti sistem pendidikan militer di dunia, yang rata-rata memang berlangsung selama 4 tahun setara S-1. Paban II Dalakdik (Pembantu Utama II Pengendalian Pendidikan) AKABRI, Kol. Inf. Drs. Nazif Syarif mengakui bahwa kurikulum AKABRI yang baru mengacu pada pola kurikulum di luar negeri terutama yang sudah mengakui ilmu militer sebagai cabang dari ilmu pengetahuan. Di Inggris, Korea, Perancis, Australia sudah memberi gelar samp[ai tingkat doktoral. Hanya saja, di Indonesia sampai saat ini ilmu militer belum mengakui keberadaan ilmu militer. Konsorsium Ilmu-ilmu juga belum mengakui keberadaan ilmu militer. "Tetapi soal pengetahuan itu memang tidak bisa seketika, tetapi bertahap dan membutuhkan waktu yang lama," sergah Syarif.

Perubahan kurikulum AKABRI ini bisa jadi hanya sebagian saja dari perkembangan yang akan dilakukan oleh ABRI. Paban I Rendik (Pembantu I Rencana Pendidikan) AKABRI, Letkol Drs. Ranandjaja menggarisbawahi bahwa perubahan kurikulum ini ditujukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin maju dan kritis. Dalam era sekarang dibutuhkan prajurit-prajurit yang ahli dibidangnya . "Maka dalam kurikulum yang baru ini, penekanan lebih ditujukan ke cabangnya masing-masing sesuai dengan bidang jurusannya," kata Ranandjaja.

Yang pasti, dengan kebijakan meletakkan AKABRI, setara dengan strata 1 merupakan langkah yang strategis. Karena S-1 merupakan elemen dasar untuk mengembangkan keahlian dan spesifikasi. Semakin mudah bagi perwira ABRI untuk mengambil S-2 atau S-3. Di kalangan ABRI sendiri bahkan sudah terpikirkan untuk membentuk S-2, S-3 sendiri. Brigjen Ade Pecaulina militer menyebut rencana untuk

mendirikan Sekolah Tinggi ABRI yang nanti satatusnya setara dengan program pasca sarjana bagi lulusan AKABRI.

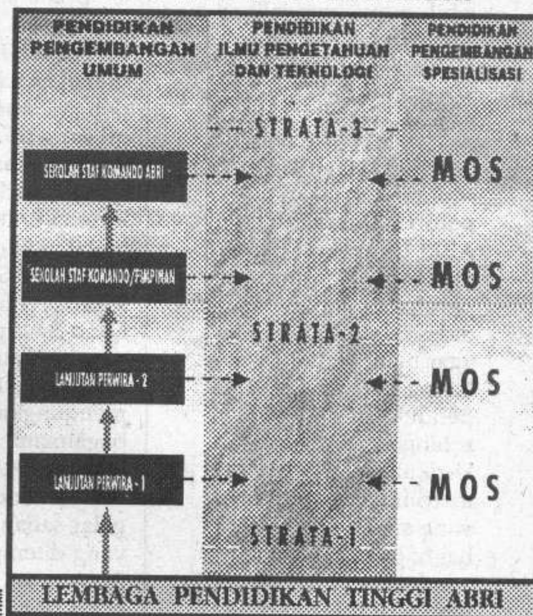
Ada Apa di Balik Perubahan Kurikulum

Terlepas dari alasan itu, ada satu hal yang mencuat untuk dipertanyakan yaitu ada apa dibalik perubahan kurikulum itu? Betulkah hal ini untuk menghadapi perubahan dan daya kritis masyarakat yang semakin meningkat seperti yang selama ini didengung-dengungkan petinggi ABRI? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan menganalisis dan membandingkan kurikulum baru dengan lama dan melihat muatan-muatan apa yang ditonjolkan dalam kurikulum baru.

Ditinjau dari pola (struktur kurikulum) yang baru, sebenarnya tidak banyak perubahan. Kurikulum lama memuat 120 SKS, artinya hanya perlu ditambah beberapa SKS lagi agar setara dengan S-1. Kurikulum yang baru nanti direncanakan memuat 148 SKS dengan perbandingan 42 MKU (Mata Kuliah Umum), 104 MKDK (Mata Kuliah Dasar Khusus) dan MKK (Mata Kuliah Keahlian) serta Latsitarda Nusantara (hampir mirip dengan KKN). Alhasil, sebenarnya tidak ada perubahan yang subtansiil dari kurikulum baru. Hal ini memang berusaha agar nyambung dengan sisdsikus (Sistem Pendidikan Nasional) Upaya penyambungan ini, menurut Ade, misalnya, kurikulum yang sebelumnya menggunakan satuan pengajaran jam, sekarang diubah menjadi SKS. Muatan kurikulum juga didesain misalnya dengan mempertimbangkan pendekatan dan perbandingan jumlah MKU, MKDK, dan MKK seperti yang diteralkan oleh dikti.

Dari segi isi (*content*) juga tidak banyak berubah. Acuan Kurikulum Mata Kuliah Integratif (MKI) yang berhasil didapatkan majalah BALAIRUNG dari Mako AKABRI, kalau dibandingkan dengan MKI kurikulum lama tidak banyak berbeda. Kecuali memang agak lebih ramping. Penekanan kurikulum baru ini, seperti diakui

JALUR PENDIDIKAN PADA SISTEM PENDIDIKAN ABRI



SUMBER: MARKAS KOMANDO AKABRI

itu AKABRI



PENDIDIKAN AKABRI merupakan basis pendidikan militer. Karena di sinilah "kawah candradimuka" kaderisasi yang akan mengisi pos-pos penting di ABRI. Kalau dilihat dalam sistem pendidikan (sisdik) ABRI, ada usaha yang keras untuk melakukan integrasi di tubuh ABRI sendiri lewat jalur pendidikan. Penyatuan-penyatuan lembaga pendidikan ABRI di bawah satu komando merupakan suatu upaya integrasi militer yang giat dilakukan sejak Orde Baru berkuasa.

Apa pun versi analisis sejarah yang terjadi pada tanggal 30 September - 1 Oktober 1965, militer Indonesia saat itu tampak masih terpecah-pecah dalam berbagai ideologi, kepentingan, dan juga angkatan. Para panglima, khususnya dari AD, kemudian menyadari pentingnya integrasi di tubuh ABRI mulai dari kader sampai purnawirawan. Disepakati kemudian lahirnya Korp Perwira ABRI yang sangat berperan membentuk ABRI sebagai kekuatan pertahanan maupun kekuatas sosial politik.

Terbentuknya Korp Perwira membawa konsekuensi perlunya persamaan persepsi kala memandang ABRI sebagai alat Demokrasi dalam konteks pengakuan kedaulatan kekuasaan negara. Agar keutuhan cara pandang itu tetap terjaga, korp perwira memandang perlu adanya satu sumber utama pembentukan perwira ABRI yang dihasilkan oleh satu lembaga pendidikan. Sumber tertulis dari Markas Besar ABRI menyebutkan AKABRI diresmikan berdiri tanggal 16 Desember 1965 oleh Presiden/Pangti ABRI/Panglima KOTI dengan SK No. 185/KOTI/1965 yang merupakan realisasi keputusan pengintegrasian Akademi Militer Nasional (AMN), AAL, AAU, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK/AAK).

Pengintegrasian secara penuh baru diumumkan tanggal 5 Oktober 1966 ketika perayaan hari ABRI dengan mengganti nama AMN menjadi AKABRI Bagian Udara, dan Bagian yang setaraf dengan PTIK/AAK menjadi AKABRI Bagian Kepolisian. Di samping ketentuan tersebut juga dibentuk AKABRI bagian umum yang sengaja ditempatkan di AKABRI bagian Darat. Dengan demikian, dimulailah era baru pendidikan perwira ABRI yang terpadu. Pada masa Orla, pendidikan perwira benar-benar terpisah menurut Angkatan masing-masing. Bila menyimak dokumen-dokumen historis saat-saat akhir Orla, memang terlihat kuat masing-masing kekuatan Angkatan memiliki sentimen dan ideologi yang berbeda satu sama lain keberpihakan politiknya bisa tidak sama.

Danjen AKABRI, lebih kepada keahlian kecabangannya masing-masing. Dalam arti mata kuliah matra mendapat perhatian lebih. Sehingga nantinya, lanjut Danjen lulusan AKABRI lebih punya spesialisasi seperti sarjana militer elektronika, Zeni dan sebagainya.

Analisis Ledjen TNI (Purn.) Hasnan Habib seputar kebijakan perubahan kurikulum ABRI barangkali dapat dipegang. Menurutnya, perubahan ini lebih didasari oleh keinginan agar tidak terjadi over laping dengan sistem pendidikan nasional sehingga perubahan kurikulum ini tidak merombak kurikulum yang sudah ada selain hal-hal yang bersifat administratif. Gejala-gejala umum di seluruh dunia termasuk negara ASEAN, menurut Hasnan, lulusannya sudah diakui dengan predikat sarjana sehingga Indonesia sepertinya ketinggalan.

Boleh jadi alasan perubahan kurikulum ini karena "kekecewaan" ABRI dengan sistem selama ini,yang tidak diuntungkan oleh sistem akademi. Karena untuk melanjutkan mendapat S-1 amat susah. Letkol Inf. Drs. Nazir Syurip dalam wawancaranya dengan BALAIRUNG mengungkapkan bagaimana sulitnya lulusan AKABRI untuk mendapatkan gelar sarjana. "Waktu yang ditempuh oleh perwira AKABRI sama dengan mahasiswa di perguruan tinggi yakni kurang lebih 3 tahun. Kualitas lulusannya pun saya jamin tidak kalah bahkan kita mungkin lebih berat pendidikannya. Tetapi untuk mendapatkan pengakuan gelar sarjana sulitnya minta ampun. Pihak perguruan tinggi atau pun Universitas Terbuka rata-rata mengakreditasi hanya delapan puluh SKS, sehingga seorang perwira untuk mendapat S-1 butuh waktu lagi selama 2 tahun di perguruan tinggi", tuturnya. "Padahal", lanjut Syarif, "Kualitas lulusannya tidak kalah, hanya belum diakui sebagai sarjana". Berdasarkan Skep Dirjen Dikti No. III/DIKTI/KEP/1993 alih kredit mata kuliah lulusan AKABRI memang

ALIH KREDIT
MATA KULIAH LULUSAN AKABRI

(SKEP DIRJEN DIKTI NO. 111/DIKTI/KEP/1993)

No	AKADEMI	PROGRAM STUDI	TABUNGAN SKS (MINIMAL)			
			MKU	MK DK	MKK	JUMLAH
I. AKMIL						
	1. TEMPUR	1.ADMINISTRASI	12	27	29	78
	-INFANTERI	2.HUBUNGAN INTERNASIONAL	12	27	40	79
	-KAVALERI	3.PEMERINTAHAN	12	27	34	73
	-ARTILERI	4.SOSIOLOGI	12	27	40	79
		5.MANAJEMEN	13	24	3	40
	2. ZENI	1.TEKNIK SIPIL				
		A.STRUKTUR/KONSTRUKSI	13	19	24	56
		B.SUMBNER DAYA AIR	13	19	20	52
		C.TRANSPORTASI	13	19	26	58
		D.PENGELOLAAN KONSTRUKSI	13	19	22	54
		2.MANAJEMEN	13	18	3	34
	3.PERALATAN	1.TEKNIK MESIN	14	22	24	60
		2.MANAJEMEN	13	18	3	34
II ALL						
	1.PELAUT	1.SUMBER DAYA HAYATI LAUT	14	40	39	93
		2.HIDROGRAFI	14	28	28	70
		3.OCEANOLOGI	14	28	30	72
	2.TEKNIK	TEKNIK MESIN/PERMESINAN KAPAL	14	36	46	96
	3.ELEKTRO	1.TEKNIK ELEKTRO	14	32	34	80
		2.TEKNIK TELEKOMUNIKASI	14	32	44	90
		3.TEKNIK ELEKTRONIKA	14	32	39	85
	4.ADMINISTRASI	TEKNIK INDUSTRI	9	39	43	96
	5.MARINIR	ADMINISTRASI NEGARA	12	30	49	91
III AAU						
	1.AERONAUTIKA	TEKNIK PENERBANGAN	14	36	45	95
	2.ELEKTRONIKA	1.TEKNIK ELEKTRONIKA	14	33	38	85
		2.TEKNIK TELEKOMUNIKASI	14	33	48	90
	3.ADMINISTRASI	TEKNIK INDUSTRI	14	36	38	88
IV.AK POL						
	1.HUKUM		8	14	53	75
	2.ADMINISTRASI		12	24	42	78
	3.SOSIOLOGI		12	24	44	80
	4.MANAJEMEN		13	15	9	37

Sumber: Mako AKABRI

Integrasi tahap kedua dilaksanakan berdasarkan keputusan Menhankam/Pangab Kep/A/4/1971 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur AKABRI. Dua hal penting yang termaktub dalam dokumen tersebut adalah (1) AKABRI adalah suatu Badan Pelaksana Pusat Dephankam yang berkedudukan langsung di bawah Pangab, (2) Bentuk organisasi ABRI berdasarkan organisasi baris dan staf terbagi dalam tingkat-tingat dan eselon sebagai berikut: (a) Tingkat Markas Komando, (b) Tingkat Pelaksana Utama, terdiri dari AKABRI bagian.

Setelah konsolidasi antar angkatan dirasa cukup, integrasi tahap ketiga lebih ditekankan pada materi pendidikan ketimbang organisasi. Sesuai Surat Perintah Pangab: Prin/07/P/VI/1984 tanggal 14 Juni 1984 maka fungsi pendidikan AKABRI dikemabalikan pada Angkatan/Polri. Sehingga, AKABRI Bagian Umum dan Darat menjadi Akmil, Bagian Laut menjadi AAL, Bagian Udara menjadi AAU, dan Bagian Kepolisian menjadi Akpol. Materi kurikulum yang integratif bertugas membentuk perwira yang memiliki kemampuan dasar keperwiraan dalam profesi teknis, di samping menanamkan cara berfikir, bersikap, dan berperilaku perwira ABRI sebagai pejuang.

Pendidikan Lanjutan

Untuk menjamin kesinambungan pembekalan dalam komponen kepribadian, ketrampilan, dan visi politik, maka pendidikan selanjutnya bagi perwira lulusan AKABRI disusun dan diprogram secara berjenjang dan berkelanjutan. Di sini, seperti diungkap Brigjen Ade Pecaulina pada BALAIRUNG, pendidikan di ABRI dibuat terintegrasi dan berkesinambungan agar nilai, norma,dan tradisi yang ada dalam militer tetap terjaga.

Jenis pendidikan lanjutan yaitu pertama, pendidikan pengembangan Umum, yaitu pendidikan untuk mengembangkan kemampuan umum yang diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan, dan penugasan sebelumnya dalam rangka proyeksi penggunaan prajurit selanjutnya terbagi atas (a) Pendidikan Lanjutan Perwira, : pendidikan untuk memberikan kemampuan teknis, taktis, dan administrasi dalam kegiatan operasional tertentu pada lingkup

diakui sebagian. Antara satu jurusan berbeda, tetapi rata-rata diakui separuh dari jumlah keseluruhan SKS untuk strata S-1 yakni 80 SKS. Untuk bidang-bidang yang lebih berhubungan dengan profesi ABRI atau bidang teknis -- misalnya AAL jurusan Pelaut atau Teknik -- seperti Akpol program studi Manajemen -- diakui rata-rata 50 SKS. Dengan kurikulum yang baru, lulusan AKABRI tidak perlu repot-repot melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mendapatkan akreditasi, karena secara otomatis ia mendapat gelar kesarjanaan.

Yang kemudian menjadi pertanyaan dengan bentuk kurikulum yang ada, layakkah saat ini AKABRI mendapatkan srtata S-1. Arbi Sanit, pengamat politik dari UI, menyatakan bahwa kalau kurikulum militer diakreditasi dengan pola kurikulum sipil, itu berarti standar kurikulumnya sama. Yang dipersoalkan, menurut Arbi Sanit, apakah militer seperti di Amerika Serikat meraih gelar Doktor yang berkaitan dengan kemiliteran seperti ruang angkasa, teknik militer, ataukah meraih gelar sarjana di bidang sosial politik? Justru yang kelihatan sekarang justru akreditasi di bidang sosial politik. Apabila itu dibuat sistem pendidikan kita menjadi seperti ini: struktur organisasinya adalah sipil yang mengakreditasikan, sedangkan isinya adalah militer. Ini justru merancukan sistem pendidikan sehingga nantinya langka. Pengembang an ilmu disesuaikan dengan kebutuhan militer.

Akreditasi, lanjut Arbi Sanit, akan bersifat formal saja. Kalau pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme sesuai dengan tuntutan zaman, teknologi, dan perhubungan masyarakat yang menuntut spesialisasi tertentu sekali lagi itu hanya bersifat formal belaka. Akreditasi itu tidak punya isi. Kita yang berada di universitas mempunyai isi yang harus dikejar. Kalau orang-orang militer nanti nanti dituntut agar profesional dalam bidangnya. Jadi pendidikan sosialnya menjadi formalistik. "Apabila itu yang terjadi maka universitas seperti menjual ijazah. Ini penurunan standar atau wibawa ijazah kesarjanaan dari universitas", tuturnya.

Eryanto
dan Tim Laput

ACUAN KURIKULUM MKI AKABRI 4 TAHUN

NO.	MATA KULIAH UMUM (MKU)	SKS
I.	MATA KULIAH INTEGRATIF (MKI)	
1	I P A	
	a. Alamiah Dasar	1
	b. Matematika I	2
	c. Fisika Dasar I	2
	d. Kimia Dasar I	2
	e. Pengenalan Komputer	2
	f. Statistika dan Probabilitas	1
2	I P S	
	a. Ilmu Budaya dan Sosial Dasar	1
	b. Pancasila	2
	c. Pengetahuan Agama	2
	d. Bahasa Indonesia	2
	e. Bahasa Inggris I	2
	f. Pengantar Ilmu Sosial dan Sistem Sosial Indonesia	1
	g. Pengantar Ilmu Politik dan Sistem Politik Indonesia	1
	h. Pengantar Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi Indonesia	1
	i. Pengantar Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia	1
	j. Pengantar Antropologi dan Antropologi Indonesia	1
	k. Pengantar Filsafat dan Logika	1
	l. Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia	1
	m. Psikologi Sosial	1
	n. Komunikasi Massa	1
3	MANAJEMEN	
	a. Pengatar dan Azas-azas Manajemen	1
	b. Teori Kepemimpinan dan Kepemimpinan Militer/ABRI	2
	c. Teori Pengambilan Keputusan	2
4	HANKAM	
	a. Pengantar Hukum Humaniter (Konvensi Internasional tentang Perang)	1
	b. Hukum Pidana Tentara dan Hukum Acara Pidana Tentara Indonesia	2
	c. Doktrin Sospol ABRI	1
II.	DIKSAR JURIT (3 BULAN)	
III.	LATSITARDA NUSANTARA (1 BULAN)	
	jumlah	44

Angkatan/Polri. Lulusan pendidikan ini mempunyai kualifikasi untuk menduduki jabatan komandan/pimpinan dan staf yang bersifat teknis operasional, (b) Pendidikan Staf Umum dan Komando Angkatan/Sekolah Staf dan Pimpinan Polri yaitu pendidikan untuk mengembangkan para perwira yang memiliki kemampuan teknis dan taktis kecabangan/kejuruan menjadi generalis dengan kemampuan kepemimpinan dan taknis, operasi Angkatan/Polri. Lulusan pendidikan ini mempunyai kualifikasi menempati jabatan yang memerlukan persyaratan Staf Umum dan Komando Angkatan/Staf dan pimpinan Polri. (c) Pendidikan Staf Umum dan Komando ABRI, (SESKO) yaitu pendidikan untuk mengembangkan perwira PK terpilih yang berkemampuan staff umum dan Komando Angkatan/Staf dan Pimpinan Polri agar memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajemen tingkat politik dan strategi Hankamneg, sospol. untuk kepentingan penugasan pada jabatan strategi dalam bidang hankam dan sospol.

Kedua, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu pendidikan yang difokuskan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat keilmuan/sains yang dilaksanakan diluar / dalam Lembaga pendidikan ABRI terdiri atas (a) Pendidikan Akademik: pendidikan bagi perwira PK yang diarahkan untuk penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Pengembangannya (b) Pendidikan profesional: pendidikan bagi perwira PK yang dipersiapkan untuk kesiapan penerapan keahlian tertentu.

Ketiga, Pendidikan Pengembangan Spesialisasi yaitu pendidikan untuk mengembangkan kemampuan spesialisasi baik yang telah maupun yang belum diperoleh dari daur pendidikan, latihan dan penugasan sebelumnya dalam rangka proyeksi penugasan prajurit berikutnya.Terdiri atas (a) Pendidikan Kejuruan: pendidikan untuk menanamkan dan mengembangkan suatu kejuruan/ bidang pekerjaan tertentu (b) Pendidikan Jabatan: pendidikan untuk untuk mengisi kemampuan melaksanakan suatu jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi ABRI, dan (c) Pendidikan Keahlian: pendidikan untuk meningkatkan kemampuan perwira dalam keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam bidang pembinaan maupun pengoperasian sitem senjata ABRI (lihat gambar).

Bimo dan Ery

Pada mulanya dan sampai jauh dalam sejarah, tulis Onghokham, golongan yang berkuasa adalah militer sebagai kaum berpedang, men of the sword. Para Knight di Eropa, warlordism di Tiongkok, dan golongan Samurai di Jepang adalah kaum berpedang yang menjadi empunya kekuasaan.

Kekhawatiran akan Supremasi Militer



LAZIMNYA mereka berbagi kekuasaan dengan para cerdik pandai, *men of the pen*. Bayangkanlah kemudian kalau kaum bersenjata dan berpena menjadi atribut yang menyatu dalam diri kaum militer? Itulah kira-kira gambaran militer Indonesia di masa depan.

Dua tahun lagi kita tidak akan berjumpa dengan perwira ABRI tanpa gelar. Tepatnya tahun 1996, kurikulum pendidikan AKABRI akan mengalami perubahan. Kalau selama ini pendidikan dasar perwira ABRI masih setingkat akademi, maka dua tahun lagi akan diakreditasai menjadi strata-1. Pertanyaan spontan yang kemudian meluncur keluar dari benak kita adalah: mengapa perubahan itu mesti dilakukan dan kemana pendulum perubahan itu akan bergerak?

Akreditasi Pendidikan Militer menjadi strata-1 mempunyai arti yang strategis. Perubahan ini merupakan langkah penyesuaian pendidikan militer dengan dinamika eksternalnya. Danjen AKABRI, Marsda TNI F.X. Suwarno ketika ditanya BALAIRUNG tentang dasar perubahan ini menjelaskan perubahan ini merupakan bentuk antisipasi tehadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Untuk menanggulangi ini, lanjut Suwarno, perwira-perwira ABRI harus dibekali supaya tidak ketinggalan dengan rekan-rekan mereka di luar (masyarakat sipil,red). "Sekarang lurah saja sarjana, *masa* Danramil gelar satu pun tak ada. Kalau tidak diimbangi dengan S-1 sulit. Karena pendidikan setingkat S- 1 diharapkan memberi bekal pengembangan intelektual secara mandiri", tegas Suwarno.



BAYU

Marsda TNI FX Suwarno

Perwira ABRI menjadi sarjana tentu tidak sekadar ingin lebih dari seorang lurah. Ada tuntutan kualitas tertentu yang ingin dicapai. Menurut Hasnan Habib, dengan ditingkatkannya pendidikan militer diharapkan kemampuan personal *in house maintainance facility* sampai *the high level* bisa dikuasai, sesuai tuntutan jaman. Lebih jauh pemikir militer ini menambahkan bahwa di era informasi ini ABRI juga harus meningkatkan diri sesuai tuntutan profesionalismenya. "ABRI harus lebih banyak berisi manusia-manusia yang luas wawasannya. Tidak terbatas pada masalah militer saja. Di Amerika Serikat orang umumnya memiliki *degree* lebih dari satu bidang. Mungkin di ekonomi atau politik. Orang ITB misalnya, setelah mengambil insinyur bisa mengambil MBA di bidang perbankan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita berada dalam era informasi", ungkap mantan Dubes RI untuk AS ini.

Figur militer yang generalis, yang tidak hanya paham bagaimana mengendalikan tembakan meriam, namun juga mampu mengendalikan gejolak politik masyarakat rupanya menjadi salah satu arah perubahan kurikulum ini. Hal ini mudah dimengerti mengingat apa yang dipahami sebagai pengembangan profesionalisme ABRI menyangkut dua hal. Pengembangan ABRI sebagai kekuatan HANKAM dan kekuatan sosial politik. Ketua Fraksi ABRI di DPR/MPR, Abu Hartono, menempatkan perubahan kurikulum militer dalam konteks ini. Perubahan ini menurut Hartono merupakan upaya peningkatan profesionalisme ABRI, terutama para perwiranya. "Sekarang tantangan yang kita hadapi lebih banyak pada penekanan di bidang pembangunan ekonomi. Jadi katakanlah kalau soal penekanan ilmu hankam, itu ilmu kita. Oleh karena itu, di setiap kesempatan yang ada bagi para perwira sangat disarankan untuk menguasai ilmu-ilmu lain," ungkap Abu Hartono kepada BALAIRUNG.

Perubahan kurikulum ini boleh juga dilihat sebagai reaksi terhadap perubahan masyarakat. Menguatnya tuntutan demokratisasi akhir-akhir ini menuntut pola interaksi yang terbuka dan egaliter. Pada titik singgung inilah dibutuhkan *social touch* dalam pendidikan kader ABRI. Soemitro ketika ditanyai mengenai hal ini mengungkapkan bahwa keinginan adanya *social touch* dalam pendidikan ABRI sudah lama. "Mulai dulu kita menginginkan agar sistem pendidikan militer memberikan *civil effect*. Itu dicita-citakan sejak lama," ungkap mantan Pangkopkamtib ini. "Tetapi," lanjut Soemitro,"Apa dalam hal



Hasnan Habib

ini arahnya ke sana, saya tidak tahu. Yang jelas akhir-akhir ini banyak lulusan militer dikirim ke universitas yang bagus di USA sana."

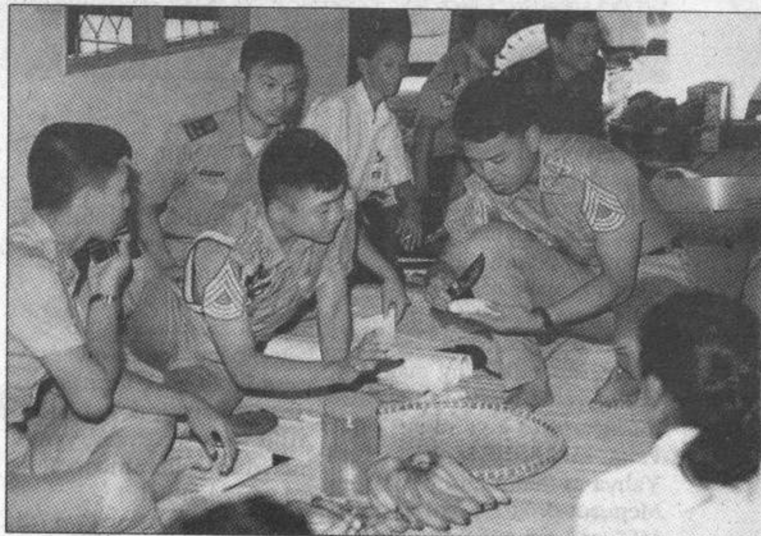
Persoalannya kemudian adalah bagaimana memberi *civil effect* pada pendidikan militer itu? George Aditjondro rupanya punya jawaban. Menurut aktivis HAM ini, kalau perubahan kurikulum ini ditangani dengan baik,barangkali bisa memberikan hawa segar pada penampilan ABRI. "Kalau kurikulum diisi juga dengan ilmu-ilmu sosial kritis, termasuk analisis kelas sosial Marx, itu bagus. Mereka akan lebih memahami kalangan mahasiswa dan diskursus kelayakan intelektual." Selanjutnya, pakar lingkungan ini bercerita, "Di Cornell saya kuliah dengan perwira-perwira yang mengambil masternya. Dengan mereka saya bisa berdebat. Tetapi dengan orang yang terindoktrinasi, dialog sulit dibangun," ungkap dosen UKSW ini.

Memperkokoh Basis Legitimasi

Ada yang jelas terbaca dari perubahan kurikulum pendidikan militer ini. ABRI ingin tetap terlibat dalam persoalan sosial politik. Penegasan ulang peran ini kembali terdengar saat-saat terakhir ini. Tak urung, Presiden sendiri kembali mengungkapkan pentingnya peran sosial politik ABRI. Ketika memberikan amanatnya selaku inspektur upacara pada peringatan ke-49 hari ABRI, presiden Soeharto menegaskan masih perlunya peranan sosial politik ABRI di masa depan. Menurut Soeharto, peranan sosial politik ABRI dibutuhkan untuk menciptakan kondisi dan peluang bagi berkembangnya demokrasi, tegaknya hukum serta tumbuhnya prakarsa dan kreativitas rakyat untuk memajukan diri dan lingkungannya.

ABRI, dengan demikian, tak akan melepaskan peran sosial politiknya. Bagi ABRI keterlibatan sosial politiknya adalah sebuah keniscayaan sejarah yang tidak boleh dibantah. Jenderal Purnawirawan Soemitro menegaskan bahwa peran sosial politik ABRI adalah kristalisasi refleksi kelahiran dan keterlibatan sejarah militer di negeri ini. "Fungsi sosial politik ABRI bukanlah hasil pemikiran akademik. Tetapi merupakan produk dari pertumbuhan sejarah perjuangan bangsa dan revolusi. Selama ABRI tidak mengingkari misi dan hakikat kelahirannya, tidak perlu dikuatirkan bahwa fungsi sosial politik ABRI akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan bangsa dan negara," tegas Jenderal Purnawirawan yang buku memoarnya cukup menggemparkan ini.

Keterlibatan sosial politik ABRI memang sering mengundang kritik. Bersamaan dengan arus keterbukaan yang melanda masyarakat, kehadiran ABRI di panggung politik dipertanyakan relevansinya. Doktrin Dwifungsi tidak hanya dituntut untuk disesuaikan dengan perkembangan jaman, bahkan dipersoalkan kelayakannya. Kritik biasanya dialamatkan pada karakter intrinsik militer. Sistem hierarkis, garis komando, dan kerahasiaan sebagai kekhasan militer ditempatkan sebagai punggung negatif ide demokrasi. DR. Ichlasul Amal, dalam suatu kesempatan silaturahmi Pimpinan ABRI dan cendekiawan di Surabaya pada tahun 1990 mengungkapkan adanya hambatan pada watak intrinsik organisasi militer dalam pencapaian proses demokratisasi. Menurut Ichlasul Amal, ABRI karena hierarki dan strukturnya , sulit untuk berfungsi sebagai institusi politik dan secara kontinyu mampu membawa aspirasi dan kepentingan masyarakat bawah ke atas.



Penyuluhan untuk ibu-ibu PKK di Lampung

"KKN"-nya para taruna AKABRI

Diskusi memang bisa diperpanjang. Namun kita tidak bisa mengingkari ABRI telah menjadi bagian dari riil politik Indonesia. Perubahan kurikulum pendidikan AKABRI boleh jadi akan memperkokoh keterlibatan sosial politik ABRI. Militer mempunyai dasar pembenar baru bagi keterlibatannya, yakni kapabilitas intelektualnya sebagai sarjana. "Perubahan kurikulum tersebut, agar peran ABRI punya kualitas. Bukan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan lagi, tetapi pada kemampuan intelektual akademisnya," ungkap Soemitro kepada BALAIRUNG. Implikasi pada legitimasi baru ini diungkapkan pula oleh Danjen AKABRI, Marsda TNI F.X. Suwarno. Ketika ditanya apakah pengembangan personal militer menjadi sarjana ini nantinya menjadi legitimasi baru, dengan enteng Suwarno menjawab, "Ya, kita harapkan demikian".

Beberapa pengamat sepakat adanya kemungkinan legitimasi baru dalam perubahan kurikulum ini. George Aditjondro melihat adanya kemungkinan melahirkan sosok



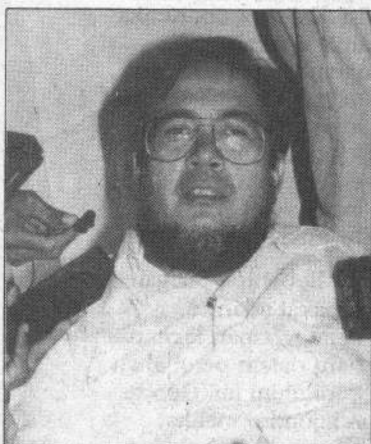
Arbi Sanit

THE JAKARTA POST

"Persentuhan" militer-sipil di Bendungan Hilir, Jakarta
Mungkinkah dialog dibuka dalam suasana demikian ini?

militer yang generalis melalui perubahan ini. "Bila kurikulum makin generalis, dalam arti memungkinkan ABRI menjadi apa saja di Indonesia, maka peran militer sebagaimana diterapkan sekarang makin awet." Nada yang sama diungkapkan juga oleh Pakar militer UGM, DR. Yahya Muhaimmin. Menurut doktor jebolan MIT ini, arti penting perubahan ini adalah implikasinya pada legitimasi keterlibatan ABRI. "Saya tidak tahu apa yang ada di benak para perencana kurikulum pendidikan AKABRI. Boleh jadi mereka tidak berpikir ke arah sana (mencari legitmasi baru, red.) . Namun implikasi perubahan pada legitimasi baru keterlibatan ABRI pasti ada," ungkap dosen HI Fisipol UGM ini.

Kaum Sipil boleh jadi gelisah dengan perubahan ini. Menurut pengamatan BALAIRUNG, ABRI sangat serius dalam menyiapkan kader-kadernya. Perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mengikuti dinamika masyarakat selalu dirancang secara sistematis. Karakter militer yang khas seperti sistem komando, hirarkis dan penuh kerahasiaan, adalah keunggulan militer untuk menata sistem pendidikannya.


DOK BERNAS

George Aditjondro

Perubahan kurikulum ini hanyalah secuil dari strategi jangka panjang. Perubahan ini akan membuka katub-katub keterlibatan kaum militer yang lebih luas, termasuk lahan-lahan sipil. Perwira ABRI yang generalis, yang menguasai ilmu mikro (tentang hal-hal kemiliteran) dan makro (di luar hal-hal kemiliteran) berpeluang memasuki dunia kehidupan sipil atas dasar kualitas sebagai legitimasi baru, di tengah-tengah masyarakat yang masih ditakjubkan oleh gelar. Maka ruang gerak kaum sipil semakin terbatas. Namun buru-buru kekuatiran ini diredakan Hasnan Habib. Purnawirawan Jenderal ini tidak melihat alasan untuk risau. "*No Problem.* Trend di dunia ini mengarah pada terjadinya kerja sama yang erat antara militer dan sipil. *Nggak* ada yang dominan. Masalah di luar ABRI makin lama makin ruwet. Jadi tak mungkin semua ditangani ABRI. ABRI bukanlah lembaga yang super," tegasnya.

Peluang bagi sipil memang selalu ada. Namun persoalannya siapa yang menentukan gaya permaianan. Ada fakta sejarah yang perlu dicatat, bahwa posisi ABRI dalam Orde Baru sangat sentral. Menurut seorang pakar politik muda, Cornelis Lay, sentralnya posisi ABRI ini menyebabkan terjadinya penyempitan ruang gerak politik sipil. Pihak sipil mengalami involusi politik. "Kemiskinan politik yang dihasilkan terus menerus dari proses yang ada lebih banyak makna negatifnya daripada positif," ungkap dosen Fisipol UGM ini. Inilah yang menyebabkan ketimpangan kesempatan antara kader sipil dan militer , karena militer mempunyai akses politik yang berlebih.

Kecurigaan dan kecemasan itu boleh saja. Tetapi itu tak akan mengubah apa-apa, apabila kaum sipil tidak tanggap. Lalu bagaimana persiapan sipil menanggapi mitranya ini? . Seperti diakui oleh Yahya Muhaimin, kekuatiran sipil akan peluang politiknya yang semakin terdesak sudah lama. "Persoalan kita sekarang adalah bagaimana meningkatkan kualitas sipil. Agar kita tidak ketinggalan dari militer," ungkap Yahya. Persoalannya memang tak mudah. Menurut Yahya yang perlu diusahkan adalah bagaimana menciptakan kesempatan yang sama antara militer dan kaum sipil.

Ada hal yang tersimpan di balik kecurigaan kaum sipil terhadap militer. Yang segera terlihat adalah kurangnya persentuhan dan dialog antar sipil dan militer.

Kalaupun persentuhan itu ada, hanyalah fisik belaka, semacam AMD (ABRI Masuk Desa), atau lebih ngeri lagi "pertemuan" ABRI-rakyat pada peristiwa-peristiwa demonstrasi, penggusuran tanah, dan pemogokan buruh. Sedang yang mendesak dilakukan adalah persentuhan ide, sebuah dialog di tingkat persepsi yang mempertemukan dua pandangan yang selama ini terasing satu sama lain. Bahkan saling curiga mencurigai. Semisal dalam menerjemahkan gagasan-gagasan "pembangunan","demokrasi" "keterbukaaan","stabilitas", "dwifungsi", dan "bahaya laten". Maka perlu dicari format yang tepat untuk menyelenggarakan dialog tu.

Menurut Yahya Muhaimin ada dua format dialog yang bisa ditempuh yaitu dialog formal dan informal. Disamping itu mesti ada pihak yang bisa menjadi perantara, yang memahami persepsi baik sipil maupun militer. Ketika ditanya apa yang mesti menjadi dasar dialog, lulusan MIT USA ini menawarkan dua hal. Pertama, ada kesetaraan hubungan. Itu berarti adanya *equal opportunity.* Kedua, kesediaan untuk mengakui potensi individu lain.

Perubahan kurikulum ini bisa jadi bagai sebilah pisau yang manfaat dan mudharatnya sama-sama besar. Pertama akan menumbuhkan iklim dialog dan kedua menjadikan basis legitimasi baru untuk menjarah lahan sipil .

Frans Sudiarsis
Tim: Abits, Harry, Ery, Peny, Aris, Poppy, Narto, Bayu

Dwifungsi Yang dikorup dan Sipil yang Gelisah

Pendidikan bagi militer adalah wadah untuk mencetak prajurit-prajurit yang dapat diandalkan. Perubahan kurikulum bagi pendidikan militer berarti upaya untuk menyiapkan sosok prajurit yang mampu menjawab gejolak perubahan jaman. Apakah perubahan kurikulum ini hanya sekedar berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang rutin di kalangan intern militer, atau bahkan merupakan upaya untuk mencari sebuah legitimasi baru bagi keterlibatan sosial politik oleh militer?



BERANGKAT dari keri-sauan kaum sipil, bagai-mana mele-takkan hubungan dikotomis sipil-militer; ketika militer menjadi seorang intelektual dengan dwifungsinya dan kaum sipil juga menjadi seorang intelektual? Bagaimana sepak terjang ABRI di masa depan? Akankah menjadi sosok yang di tangan kiri memegang pistol sementara tangan kanan memegang kitab? Wajar bila sosok demikian dikhawatirkan akan menjadi ancaman yang mengerikan bagi kaum sipil yang membawa *cutter* saja tidak boleh.

Temu wicara **BALAIRUNG** kali ini berusaha membahas masalah tersebut dengan mengundang **Dr.Mochtar Mas'oed** (staf pengajar FISIPOL UGM), **Hana Mashudi** (Komandan YONIF I Resimen Mahasiswa UGM), **Veliks V. Wanggai** (Mahasiswa Jurusan HI Fisipol UGM), **Drs. Arif Aris Mundayat** (staf Pengajar Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UGM) dan **Yulianto Sigit** (mahasiswa Fakultas Filsafat UGM), dipandu oleh **Frans Sudiarsis,** dan ditulis kembali oleh **Laits Abit**.

Berangkat dari sebuah sejarah

Hana Mashudi mengawali pembicaraan sejarah militer di awal kemerdekaan negeri ini. Kondisi masa perjuangan yang mempunyai kesamaan rasa dan nasib telah menyebabkan terjadinya kemanunggalan antara militer dengan rakyat. Di masa inilah tokoh-tokoh perjuangan sebagai cikal bakal lembaga militer benar-benar bergabung dengan rakyat untuk mempertahankan negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kemanunggalan yang telah diterjemahkan sebagai Dwifungsi ABRI lebih memerankan dwifungsinya. Jaman yang terus berubah, pembangunan terus bergulir dan teknologi militer semakin berkembang maju, maka ABRI mau tidak mau harus melihat perubahan ini. "Dan kader yang hendak diciptakan adalah sosok prajurit yang mempunyai kelebihan pada kekuatan intelektual, jadi tidak hanya pada kekuatan hankam, yang sudah merupakan profesionalisme bagi ABRI", papar Hana.

Di era 2000-an seorang kader ABRI hendaknya mempunyai kemampuan intelektual, sehingga untuk menangani masalah-masalah yang muncul bagi sebuah negara dapat diatasi dengan adanya dialog yang berasal dari daya pemikiran kader itu sendiri. "Jadi ABRI tidak akan melepaskan begitu saja peran kontrolnya dalam perpolitikan Indonesia di masa depan, meskipun nantinya campur tangan ABRI tersebut secara kuantitas berkurang karena diganti dengan masuknya golongan sipil di bidang politik. Jadi dalam konteks dwifungsi, ABRI tetap akan dibutuhkan selama rakyat



Hana Mashudi

masih ada", tambah mahasiswa Fakultas Peternakan UGM itu.

Keterlibatan militer dalam kancah politik di negara-negara Asia Tenggara secara historis berbeda dengan di Indonesia. Di negara Asia Tenggara hal ini berkaitan dengan adanya perlindungan kapital yang ditanam di negara-negara tersebut. Sementara untuk Indonesia lebih diperankan oleh keterlibatannya sebagai aktor sejarah dimana ABRI berawal dari kesatuan laskar-laskar rakyat dan milisi-milisi. Setdaknya ini menurut Yulianto Sigit. Lebih jauh Yulianto memberi batasan tentang militer itu sendiri. Menurutnya militer sebenarnya adalah alat kekuasaan untuk melegitimasi konstitusi. ABRI sebagai militer di Indonesia sekarang ini mempunyai dua watak yaitu loyal kepada penguasa dan ABRI itu sendiri selalu ingin menjadi penguasa. Sementara sifat yang harus dimiliki ABRI sebagai tentara adalah ksatria, dan sifat inilah yang belum sama sekali melekat pada diri ABRI.

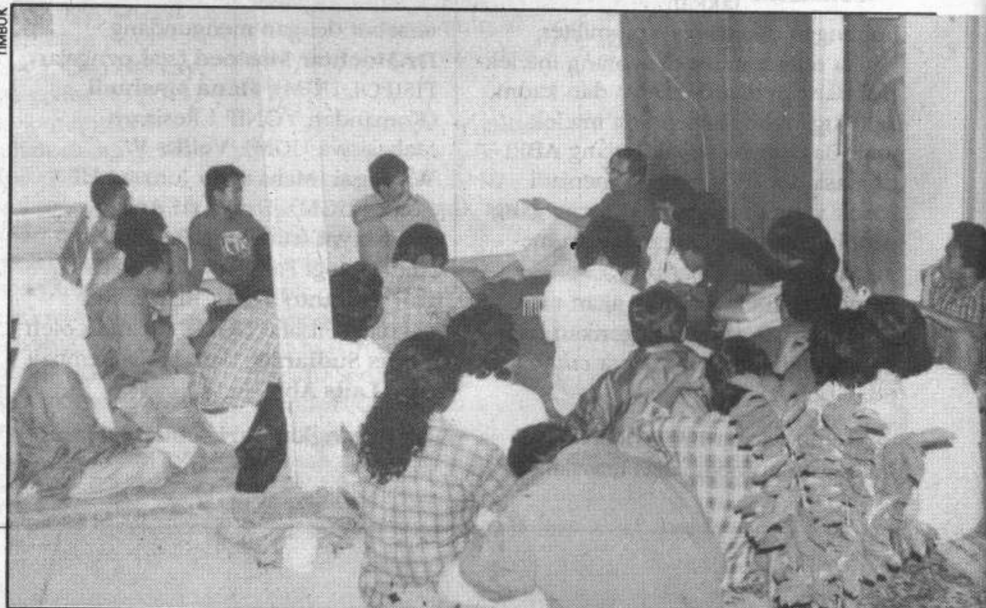
Berkaitan dengan hal ini, untuk mewujudkan pendidikan militer yang profesional harus memperhatikan dua hal, yaitu bahwa sebagai sosok militer yang profesional seharusnya memahami esensi tentang negara dan kemudian ia harus bisa menempatkan dirinya sebagai alat negara. Jadi disini harus dibedakan antara alat negara dan alat kekuasaan. Dan yang kedua adalah sebagai militer dituntut untuk menguasai teknologi militer. Jadi seandainya pendidikan militer harus dirubah maka muatan kurikulumnya harus memberikan pemahaman seperti itu.

Jika dilihat, militer Indonesia saat ini bukan mengontrol jalannya keamanan negara dan bahkan 20 tahun belakangan militer juga tidak melakukan tindakan mempertahankan negara, tetapi lebih mengontrol rakyat. Hal ini dapat tercermin dari kultur kekuasaan pemerintah daerah. Di tingkat desa militer membentuk BABINSA dengan LKMD-nya, dan KORAMIL di tingkat kecamatan. Juga pada aturan-aturan yang ada misalnya wajib lapor bagi organisasi bila akan melakukan aktivitas.

Yulianto memandang perubahan militer ini sangat bagus. Artinya selain tak gentar memukul demonstran ia mempunyai kecerdasan. Tinggal masalahnya untuk siapa dan untuk apa kecerdasan itu. Sebenarnya kekhawatiran kaum sipil terhadap dominasi militer selain bersumber dari kenyataan bahwa militer terlalu banyak mencampuri bidang sipil juga karena militer sendiri mempunyai kecenderungan menggunakan kekerasan untuk mewujudkan ambisi berkuasannya itu. Argumentasi Yulianto dikuatkan oleh contoh bahwa militer berkeinginan untuk menguasai seluruh sendi kehidupan, dari sosial politik sampai ekonomi. Seperti rumah bilyard dijaga sersan, rumah makan bagus dijaga kapten dan perusahaan besar komisarisnya seorang jenderal. Artinya pemakaian seragam bagi militer seperti perpanjangan tangan alat produksi, termasuk senjata yang dipanggulnya. Fenomena-fenomena ini seharusnyalah dibongkar. Bukan tempatnya militer itu mengawasi rakyat, sebab seperti ini adalah tugas polisi, bukan militer. Yulianto membuat komparasi di Brazil, saat polisi mogok kerja baru militer turun tangan menggantikannya. Juga di Amerika apabila di sana kementrian yang ada adalah Mentri Pertahanan maka di Indonesia menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Idealnya polisi menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri.

Sebuah Komparasi Kurikulum

Barangkali sudah menjadi ciri negara berkembang bahwa sistem pendidikan termasuk pendidikan tinggi selalu berada pada posisi labil. Pada saat sistem itu menjadi sistem yang dipercaya oleh entitas masyarakat sebagai sistem yang paling tepat, militer sebagai entitas lain dari masyarakat, berkaitan dengan kecenderungannya untuk menguasai, mencoba membuat penyesuaian. Inilah yang terjadi di Indonesia. Menurut Drs. Arif Aris Mundayat, perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia dapat dimodelkan dengan penghapusan program sarjana muda pada pendidikan tinggi Indonesia beberapa tahun yang lalu. Seperti halnya S-1 perguruan tinggi, tak ubahnya akademi yang dihilangkan "skripsi D-3-nya", maka perubahan atau penyetaraan pendidikan militer menjadi S-1 ini tidak membawa perubahan yang mendasar. Kenyataan akan lain jika perubahan ini dilakukan dengan mengadopsi program pengajaran fakultas sosial



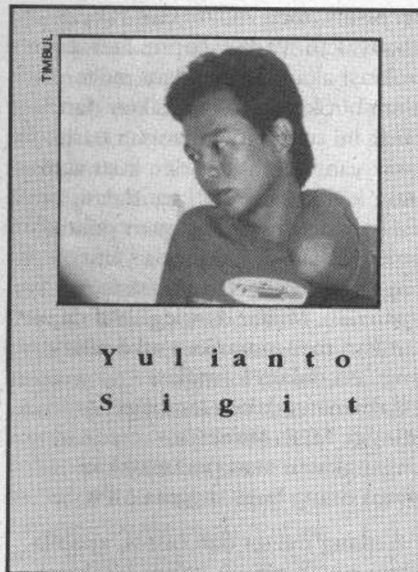
dan politik perguruan tinggi (sipil) ke kurikulum pendidikan militer, maka yang terjadi adalah perubahan level intelektual.

Lebih lanjut Drs. Arif Aris Mundayat menjelaskan bahwa apabila perubahan yang mendasar itu benar-benar terjadi, misalnya mengadopsi kurikulum pendidikan S-1 sipil, maka yang penting adalah hubungan antara sipil dan militer haruslah merupakan hubungan yang cair. Sebab kenyataan yang ada sekarang hubungan itu terlihat sangat eksklusif. Untuk itu harus ditempuh bagaimana militer dapat melepas tradisi militer saat ia berada di lingkungan kaum sipil. Suatu hal yang amat sulit dilaksanakan karena saat militer melaksanakan adaptasi dengan masyarakat sipil, maka yang muncul adalah keterpisahan sosiologis antara sipil dan militer dengan simbol-simbol yang berbeda. Militer dengan simbol yang milteristik menjadi berbeda dengan masyarakat sipil. Artinya keterpisahan masyarakat sipil dengan militer tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga pada perilaku-perilaku yang menyertainya. "Apabila keterpisahan antara sipil dan militer dicairkan mungkin akan terjadi perubahan yang cukup besar dalam 'diktator' kemiliteran di Indonesia", harap Aris.

Dwi Fungsi yang Dikorupsi

Menjawab permasalahan perwira ABRI yang bagaimana yang harus disiapkan bagi Indonesia masa depan, mengacu pada pemikiran perancang tentara di Indonesia, Dr. Mochtar Mas'oed menjelaskan bahwa tentara Indonesia harus mempunyai kemampuan tempur dan mempunyai kemampuan manajemen wilayah, serta yang ketiga adalah dwifungsi. Mengenai dwi fungsi sendiri Mochtar Mas'oed memberi penjelasan bahwa itu bukan arti yang sebenarnya, mungkin lebih tepat disebut dwifungsi-yang-dikorupsi atau kekaryaan. Sebab dwifungsi yang sebenarnya hanyalah kemampuan tempur dan manajemen wilayah.

Mengenai kemampuan tempur tentunya seorang prajurit sudah pasti menguasainya, karena republik ini lahir dari perkumpulan orang-orang yang sebenarnya benci pada mereka yang berpendidikan, kebencian itu sendiri muncul dalam berbagai peristiwa politik yang mewarnai sejarah negeri ini. Menurut penilaian Mochtar kelompok yang berpendidikan itu adalah kubu militer yang baru berasal dari KMA (*Koening Klicker Military Academic*) Bandung seperti A.H. Nasution dan T.B. Simatupang (Alm.) serta Kawilarang. Mereka inilah yang tidak disukai oleh laskar. Alasan ketidaksenangan ini karena memandang A.H. Nasution terlalu banyak terpaku pada peraturan. Pada perkembangan selanjutnya justru Urip Sumohardjo yang dipercaya untuk memodernisasi tentara



Yulianto Sigit

Indonesia. Urip Sumohardjolah yang berpikiran bahwa tentara adalah tempur. Konflik yang terjadi adalah antara orang yang berkeinginan membentuk tentara profesional dengan orang-orang yang hanya mempunyai semangat tempur. Ini merupakan konflik pertama yang dialami oleh tentara Indonesia.

Ide pendirian sekolah militer terus bertahan sampai tahun 1955. Sampai akhirnya cita-cita itu terwujud yaitu di Magelang, yang mulanya dimaksudkan sebagai sekolah yang profesional. Cita-cita ini terancam oleh naiknya Jenderal Soedirman yang tanpa jenjang militer secara reguler semacam Schwarzschoff di Amerika Serikat, tetapi secara votting. Kenyataan ini seakan menghancurkan jalan mulus yang dibangun para arsitek pendidikan militer. Soedirman sendiri dikenal sebagai anti intelektualisme.

Berbagai peristiwa tersebut membuat Jenderal A.H. Nasution berfikir kembali bahwa militer Indonesia tidak harus seperti di negara- negara Eropa, di mana sipil membawahi militer tetapi tidak juga seperti di AS dimana militer membawahi sipil, tetapi militer Indonesia harus mempunyai sistem sendiri, akibatnya muncul konsep "Jalan Tengah" (Menjadi sebuah judul pidato wisuda tahun 1958 di Magelang, Jawa tengah). Kata "golongan" yang ada di Undang-Undang Dasar diinterpretasikan oleh Nasution. Ia memasukkan gagasan-gagasan yang disebut korporatis --dahulu disebut liberal fasis --, fenomena ini membuat kita tersadar dan paham bahwa demokrasi ini liberal dan tidak cocok. Akibatnya ada usaha untuk memasukkan golongan berdasarkan profesi kerja masyarakat. Munculnya tentara sebagai bagian golongan itu mengakibatkan adanya reinterpretasi atas Undang-Undang Dasar.

Reinterpretasi UUD terutama mengenai golongan dan tentara memunculkan adanya kerja sama militer dengan sipil. Ada divisi tentara yang mengurusi kerja sama ini (BKS, Badan Kerja Sama). Contohnya buruh militer, militer ulama, militer intelektual. Badan ini digunakan untuk payung, yaitu untuk memasukkan unsur-unsur organisasi di luar kepartaian, sehingga ada 130-an organisasi yang dimasukkan dalam satu organisasi yang disebut Front Nasional (Front Nasional Pembebasan Irian Barat) yang kemudian melebur menjadi golongan fungsional dan sekarang menjadi Golongan Karya.

Rasionalisasi Perang Rakyat Semesta menimbulkan pertimbangan tentang perlunya rakyat diharuskan selalu siap untuk membela negara. Ini mengharuskan adanya administrasi khusus yang akhirnya

dibentuk Koramil (Komando Rayon Militer) di setiap kecamatan di Indonesia atau VODM. Dari sini muncul konsep dwi fungsi, yaitu suatu konsep yang memungkinkan tentara mengatur personil militer siap tempur dan mengatur rakyat untuk siap bela negara. Proses nasionalisasi aset peninggalan Belanda dan upaya menekan kekuatan komunis di tubuh militer sendiri membawa militer di Indonesia mengembangkan kemampuan dan orientasinya. Sehingga ada perwira yang ditugasi membentuk kegiatan sosial dan kebudayaan, seperti SOBSI, MKGR, Kosgoro, dan segala macam masalah bisnis. Inilah yang mengakibatkan adanya pemikiran perlunya kekaryaan di tubuh militer. "Akibatnya yang muncul bukan dwi fungsi, tetapi tri fungsi, yaitu tempur, pembinaan wilayah, dan kekaryaan. Itu adalah bentuk dwi fungsi yang dikorup", jelas Mochtar.

Lebih lanjut Mochtar menjelaskan bahwa sebenarnya dengan penyetaraan pendidikan menjadi S-1 tersebut seorang tentara bisa memperluas bidang studinya. Tetapi dengan muatan kekaryaan, dan lapangan yang langka di masa depan pasti akan ada persaingan yang makin sengit antara orang yang berpendidikan militer tetapi juga mengerti ekonomi dengan mereka yang hanya mengerti ekonomi tetapi tidak mengerti ilmu militer. Padahal bahasa politik yang paling mudah adalah kekerasan. Mereka yang menguasai metode kekerasan akan lebih mungkin memenangkan persaingan. Nah, di sini pendidikan militer mesti kembali ke pengertian awal dwi fungsi. Dengan begitu kemungkinan persaingan di masa depan tak seburuk apabila pendidikan militer ke arah kekaryaan ditekankan.

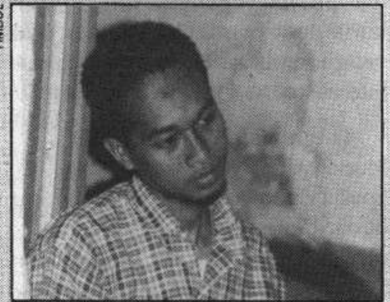

Mochtar Mas'oed

Penggandaan Legitimasi

Menanggapi permasalahan dominasi militer di Indonesia, Veliks V. Wanggai mengatakan bahwa dominasi itu karena keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dalam kehidupan politik dan mempertahankan kekuasaannya itu, serta melanggengkan status quo. Veliks menyebut bahwa dalam konteks Orde Baru proses dominasi itu ada tahapan ruang lingkup. Misalnya kemapanan posisi militer, militer dan birokrasi, militer dan golkar, militer dan legislatif, militer dan bisnis, serta militer dan rakyat kebanyakan. Pada tahap militer dan birokrasi akan dimasukkan militer dalam birokrasi. Tahap militer dan golkar ini untuk membangun basis massa yang lebih luas dan kuat atau untuk legitimasi yang kuat dalam keseharian penyelenggaraan politik pemerintahan di Indonesia yaitu dengan menenggelamkan sistem kepartaian. Militer dan legislatif dapat diartikan mengamankan nilai-nilai penguasa dalam formulasi kebjaksanaan dalam lembaga tertinggi, MPR. Misalnya, pengangkatan atau penunjukkan seratus orang bagi anggota MPR.

Sedang militer dan bisnis, apabila militer sudah masuk dalam birokrasi akan membuka akses yang luas. Orang-orang yang loyalitasnya kepada penguasa tinggi tentunya akan memberikan akses fasilitas, ia akan memberikan dukungan materi kepada militer itu sendiri. Tahapan bentuk dominasi militer yang terakhir yaitu hubungan antara militer dan rakyat kebanyakan dapat dilihat dari kebijaksanaan M. Yusuf di tahun '70-an yaitu ABRI Masuk Desa. Di sini dapat dilihat adanya kerapatan jarak sosial antara militer dan rakyat kebanyakan.

Tahun 1994-1998 boleh jadi merupakan masa transisi.


Veliks V. Wanggai

Artinya di tahun-tahun itu akan terjadi banyak perdebatan. Sebagai contoh format politik Indonesia yang belum mapan, yaitu dalam rivalitas elit-elit politik kita dan pembangunan yang masih terus berjalan akan mengarah ke masalah-masalah yang terspesialisasi yang akan menggeser peran militer. Regenerasi orang-orang angkatan '45 ke generasi sekarang akan mempengaruhi persepsi atau visi dari orang-orang yang berada di ABRI tersebut terhadap implementasi ideologi dwifungsi ABRI itu secara kultural. Tetapi secara struktural, misalnya dalam hal pendidikan, bagaimana konsep-konsep yang dibawa angkatan '45, melihat format politik yang tidak matang dan ekonomi yang telah maju dengan persoalan spesialisasi yang mengalami gejolak. Dengan adanya pertentangan persoalan ekonomi global maka militer ini bergerak ke depan dengan harus menempati posisi strategis. Karena dengan adanya spesialisasi di lapisan menengah atau masuknya orang-orang sipil bekerja di lapangan menengah, ABRI tetap menuntut tempat strategis. Di sinilah terjadi korelasi positif dengan kebijakan-kebijakan strategis. Orang-orang spesialis atau ahli manajemen ekonomi yang berasal dari sipil dibiarkan tetapi persoalan strategis ekonomi dan politik tetap dikuasai.

Dengan bangunan pertama yaitu posisi strategis dan kebijakan strategis militer akan membuat suatu

skenario besar. Dengan salah satu tujuan misalnya dengan menggunakan dalih mendominasi kehidupan negara itu untuk menjaga kesatuan dan persatuan, maka militer dapat membuat skenario untuk "paling tidak memecah belah masyarakat", karena militer mempunyai basis pluralitas yang heterogen misalnya agama, politik dan aliran kebangsaan. Tetapi dengan memecah belah ini hasilnya adalah tetap satu kerangka "grand strategy". Sebab dengan upaya memecah belah berarti membuat legitimasi yang kuat bagi ABRI untuk tetap bermain di dalam jagat perpolitikan.

Menurut Veliks, berubahnya pendidikan militer dari D-3 menjadi S-1 ini sebenarnya penggandaan legitimasi, artinya setelah Dwifungsi ABRI dilegalisasi secara formal menjadi ideologi sejak Orde Baru. Maka diubahnya AKABRI menjadi S-1 adalah legitimasi kedua untuk tetap mendominasi bidang ekonomi dan politik. Veliks bisa melihat teman-temannya dari Irian Jaya yang sekolah di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang dididik semi militer. Disamping mendapat kuliah penguasaan keahlian birokrasi, pelatihan-pelatihan peternakan, pertanian, dan manajemen birokrasi, juga mendapat didikan kemiliteran. Bagi Veliks ini merupakan militerisasi di tingkat sipil pun kuat juga. Jadi ABRI tidak hanya bermain di militer murni tetapi juga mempunyai legitimasi yang kuat di tingkat kader birokrasi. Bagi Veliks, persaingan yang total adalah persaingan mahasiswa kebanyakan dengan mahasiswa di lembaga pendidikan seperti STPDN ini. Sebab secara formal telah masuk ke dalam birokrasi negara, sementara di AKABRI dalam kekaryaan. Di akhir pembicaraan, Veliks mengatakan bahwa akreditasi pendidikan militer menjadi S-1 adalah penggandaan legitimasi, jadi yang menjadi legitimasi bukan hanya faktor kesejarahan semata tetapi juga kapasitas intelektual.

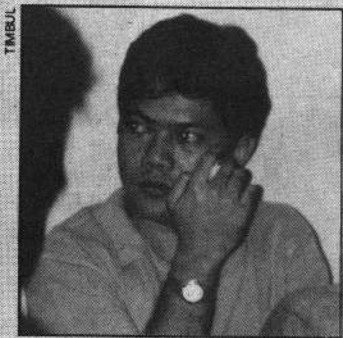
Kembali Aris Arif Mundayat berpendapat mengenai terjadinya konflik karena militer dengan keahliannya ditambah keahlian dibidang tertentu dan masyarakat sipil yang telah punya keahlian militer, akan menguat pada proses berikutnya. Tetapi Aris juga memberikan *balance* bahwa masyarakat sipil akan memperkuat dirinya saat menyadari bahwa militer sudah mendapat legitimasi-legitimasi, Dwi Fungsi ABRI dan kekaryaan. Sedang sipil hanya pada aspek kekaryaan saja yaitu di bidang legislatif, eksekutif atau bidang yudikatif yang semakin menyempit.

Menanggapi kenyataan bahwa masyarakat sipil hanya mempunyai satu legitimasi, Hana berpendapat bahwa masyarakat sipil harus meningkatkan segi intelektualitasnya. Mengenai konsep pendidikan STPDN yang mendapat doktrin ABRI adalah suatu proses. Artinya jika mahasiswa STPDN dianggap sebagai sumber daya yang sama kualitasnya dengan perguruan tinggi terkemuka maka akan bagus sekali. Dari sana dapat dikembangkan taraf kemampuannya. Sedang materi pokoknya adalah pembinaan teritorial dan kemampuan tempur. Dari sini pendidikan di AKMIL harus ada masukan materi sejarah terbentuknya ABRI dan sejarah tokoh-tokoh yang mengerti benar-benar tentang konsep manunggal ABRI dan rakyat.

Mengenai masalah pemberdayaan masyarakat sipil, menurut Veliks, kalau militer tetap mempertahankan dominasinya terhadap penyelenggaraan negara dan militer tetap berhadapan dengan masyarakat sipil maka yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat sipil mengambil jarak dan memposisikan dirinya. Penguatan diri masyarakat sipil dengan mengadakan aliansi besar dengan basis-basis massa yang mempunyai sumber daya yang cukup kuat. Misalnya petani, guru, mahasiswa, LBH dan LSM adalah dataran yang sangat abstrak. "Tetapi masyarakat sipil harus punya garis ideal dalam hal ini", ujar Velisk.

Velisk sendiri menanggapi jalan tengah yang digulirkan Nasution, di mana tidak ada supremasi militer terhadap sipil atau sebaliknya. Sebagaimana konsep Barat adalah bukan kaum sipil yang mengembalikan posisi tersebut, tetapi kita harus meninjau kembali tentang relevansinya pada saat ini. Peninjauan ini menurut Veliks mungkin mengarah pada penghilangan konsep Dwi Fungsi ABRI. Hal ini karena Nasution yang menggulirkan konsep jalan tengah tersebut waktu itu sangat pasif. Kepasifan ini dapat dilihat dari trend pemikiran Nasution.

Mengenai pendapat atau konsep Muhammad Hatta yang menyatakan ABRI harus kembali ke barak/tangsi sehingga proses demokratisasi cepat terealisir, menurut Veliks, harus dikembalikan pada komitmen Hatta semasa mahasiswa. Di mana dalam pergerakan kebangsaan mahasiswa Hatta adalah orang yang mempunyai keberpihakan kepada rakyat. Terlihat bahwa Hatta sebagai orang demokrat mempunyai sikap yang jelas. Misalnya saat terjadi konflik dengan Sukarno ia berusaha memisahkan diri. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Hatta mengenai Dwifungsi ABRI pun juga telah jelas. ABRI memang harus kembali ke tangsi!. Karena Hatta telah memikirkan implikasi kultur-strukural politik yang terjadi apabila ABRI kembali ke barak.


TIMBUL

Aris Arif Mundayat

Laits Abit

MENCARI Legitimasi DI JALUR Pendidikan



TIMBUL

Rikardo Simarmata

Pemimpin Redaksi Majalah MAHKAMAH, Fakultas Hukum UGM



ORGANISASI dengan nilai-nilai rasionalitas, efisiensi, efektifitas, dan profesionalisme. Di titik inilah, militer tidak sungkan-sungkan untuk mengasimetriskan diri dengan sipil. Bahkan, pada sebagian pengalaman historis negara dunia ketiga, hubungan sipil-militer bisa pada tahap saling meniadakan. Soalnya, anutan nilai masing-masing seolah-olah tampak kontradiktif.

Hantington menempatkan teorinya pada pemahaman seperti ini. Pentas politik direbut oleh militer intervensionis, dalam amatan Hantington, distimulus oleh kisruhnya praktek politik yang diselenggarakan oleh politisi sipil. Politisi sipil sudah gagal mencipta sebuah sistem yang mampu mengobati setiap tindak deviant dalam praktek berpolitik. POlitisi sipil malah menyeret diri ke dalam arena pertarungan memperebutkan massa, dengan membiarkan inflasi terus membesar dan situasi ekonomi yang depresif. Realitas empirik semacam ini kemudian "memaksa" perwira-perwira menerjunkan diri pada pentas politik.

Tapi, sungguhkah intervensi militer ke teritorial sipil hanya dipicu oleh faktor eksternal (kelemahan kaum sipil)? S. Decalo dalam bukunya, Coups and Army Rule in Africa, berposisi antagonis dengan keyakinan teoritis Hantington. Ahli tentang Afrika ini menilai keyakinan semacam itu sangat simplistik. Intervensi militer menyembul, justru dari ambisi pribadi perwira-perwira yang haus dengan wibawa dan kekuasaan. Teori besarnya, intervensi militer lebih didorong oleh faktor-faktor di tubuh militer sendiri. Selain yang sangat subyektif semacam untuk kepentingan-kepentingan individual, didorong juga oleh kepentingan kelas atau kepentingan golongan. Tetapi tetap bisa dikategorikan kepentingan-kepentingan internal militer. Secara tidak langsung Decalo hendak mengkritisi paham pemikiran E.A. Nordlinger yang mempercayai bahwa politik bagi militer masih dianggap sebatas kegemaran. Dan memang terlalu sukar untuk mengimani teori Nordlinger dengan memandang kekejaman rejim militer di negara-negara Afrika dan betapa ekspansionisnya pemerintahan militer di Asia Tenggara. Di Afrika – terutama beberapa tahun terakhir – perwira-perwira intervensionis bahkan telah membengiskan diri menjadi kleptokrat- kleptokrat. Konklusi akhir Decalo meyakini bahwa terlibatnya militer ke medan politik tidak dideterminasi oleh kesempatan yang dijual oleh kaum sipil

Secara inheren, performa militer telah dibajui dengan arogansi-arogansi untuk melecehkan kapabilitas kaum sipil, memordinisir bangsa. Militer bahkan sudah mencap politisi kaum sipil sangat tidak efisien, saling cekcok, bermotivasi saling menjatuhkan, tidak profesional, utuhnya kaum sipil dicemooh tidak berkemampuan menyelenggarakan urusan negara. Sebaliknya, militer dengan ideologi kepatuhan dan loyalitas total serta dipadu dengan sistem komando yang hirarkis meyakini diri sebagai sebuah organisasi modern.

tetapi justru kecondongan politis kaum militerlah yang menjadi faktor determinan.

Mencoba lepas dari diskursus klasik tentang masuknya militer ke pentas politik di atas, dengan mengkalkulasi fakta-fakta empirik, tidak bisa dipungkiri bahwa militer telah memola sedemikian rupa, performanya. Dua teori konfrontatif di atas masing-masing sudah menjastifikasi gerak-gerik militer atau bahkan semakin membangun arogansi-arogansi baru dalam tubuh militer. Seterusnya, dari sini militer memodifikasi diri dengan langkah-langkah ekspansionis, merambah hampir semua lahan politis kaum sipil atau percaya bahwa mereka memiliki eksklusifitas dan nilai lebih, militer terus mencari formulasi-formulasi baru untuk tetap bisa diterima oleh kaum sipil. Dinamika kaum sipil -- dengan sangat terpaksa -- juga harus dipahami oleh militer dengan tetap menjaga wujud legitimasinya. Kendati, pada banyak fakta, tuntutan dinamik kaum sipil justru dijawab dengan tindakan-tindakan represif dengan metode-metode kursif.

Apapun varian tipikal hubungan sipil-militer, pihak militer tidak pernah bisa membelakangi seratus persen tuntutan dinamik kaum sipil. Gerak lam,bat sebuah rejim militer memperhitungkan ini, justru menanam legitimasi kepada kaum sipil untuk membuat perlawanan. Ini pula yang mendesak para perwira-perwira militer harus cerdas menanam wilayah- wilayah legitimasi pada hampir seluruh jalur. Pada jalur ideologis, rejim militer--dengan agak memanipulasi sejarah--menciptakan konsep-konsep kenegaraan organik(organic statism) dengan mendewakan harmonisasi hubungan warga negara dan negara(pemerintah). Semua kecenderungan konflik harus diberangus. Pengorbanan-pengorbanan personal supaya lebih banyak dipersembahakan, hanya untuk tetap mengawetkan hubungan harmonis warga-negara. Inilah salah satu incaran tujuan setiap rejim militer: kondisi status quo relasi bernegara dan situasi sekuriti yang stabil.

Legitimasi juga dipancangkan di jalur budaya. Perilaku-perilaku sehari-hari dirubah wujud menjadi komandois dan hirarki(Militarizme the civilsculture). Bawahan tidak boleh secara bebas membuat keputusan tanpa sepengetahuan atasan. Atau bahkan, bawahan--secara kreatif--ditabukan untuk meredusir dan menambah amanat atasan. Seluruh format keputusan harus dengan pengesahan atasan. Militer mengajarkan kultur ini kepada sipil, dengan kontinyu. Tanpa sadar, sipil akhirnya melakukan pembenaran terhadap cara-cara semacam ini. PAda jalur politik, militer bisa lebih ekspansionis dan represif. Sadar bahwa kunci utama legitimasi terletak di jalur ini--dengan pengelabuhan macam apapun--militer menempatkan diri secara konstitusional dalam praktek politik. Watak militer yang mau serba simple dan anti keriuhan, mamaksa militer mengkonsolidasikan atau merasionalisasi jumlah partai politik dan ormas-ormas yang ada. Basis legitimasi militer--pasca fusi--diletakkan atau dibesarkan pada suatu partai saja. Secara konstitusional, militer bisa dengan bebas bertarung merebut posisi-posisi politis, tentu saja didukung dengan oleh peralatn kursifnya. Di titik ini militer bisa begitu eksplosif memainkan kartu-kartu politiknya.

Di tiga jalur itu--minus ekspansi pada jalur ekonomi--militer mengakumulasi legitimasi dari kaum sipil. Formulasi performa militer pada ketiga jalur tersebut akan sangat dipengaruhi oleh dinamik tuntutan ekonomi, politik, ideologis dan kultural kaum sipil. Tapi tidak setiap tuntutan aspiratif kaum sipil akan dengan cepat direspon. Atau gradasi kelenturan performa militer tidak selalu berbanding sama dengan besar tuntutan kaum sipil. Segalanya masih harus ditentukan oleh tingkat represifitas rejim militer tersebut. Juga masih dipengaruhi oleh variabel budaya politik dan historis negara tersebut. Dalam konteks pelestarian basis legitimasi inilah--dengan menghadapkan dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi --spesifik untuk Indonesia, basis legitimasi pada jalur-jalur konvensional (ideologi, ekeonomi, politik dan budaya) dihitung masih kurang.(Herold Crouch, dalam PRISMA no. 8/1986). Atau bahkan dilanda krisis legitimasi dan mustahil untuk--dalam jangka panjang--diandalkan. Empat kantong legitimasi di atas agaknya mulai tidak tahan melayani hujatan-hujatan dari tuntutan demokratisasi dan penghargaan akan hak-hak asasi manusia. Praktek-praktek intimidatif, lengkap dengan beberan korban- korbannya mulai terkuak akibat "pemaksaan" penanaman legitimasi konvensional dan militer ditampar oleh hujatan moral dan politis yang cukup besar.

Praktek intimidatif, lengkap dengan korban - korbannya mulai terkuak akibat "pemaksaan" penanaman legitimasi konvensional dan militer ditampar oleh hujatan moral dan politis yang cukup besar.

Ditopang oleh arogansi-arogansi lahiriah, militer tetap melakukan resistensi dengan mencari basis legitimasi lain. Inilah yang mungkin agak pas mengapa kemudian ABRI berani menempuh kebijakan reformis dibidang pendidikan(calon)perwiranya. Walau asumsi lain bisa dicangkokkan dengan kebijakan perubahan pendidikan ini, misalnya mungkin hanya untuk mengisi kebutuhan intern ABRI, tetapi tetap akan sulit untuk melepaskan dugaan bahwa kebijakan ini sangat implikatif. Soalnya, ABRI tidak pernah menempuh kebijakan reformis tanpa maksud politis. Mutasi jabatan saja selalu berdampak politis, apalagi menyangkut soal elementer pada ABRI, soal pendidikan. Nasution bahkan pernah merencanakan rasinalisasi dan modernisasi (tahun 1948 dan 1950/1952) di tubuh TNI akibat masih banyaknya perwira dengan latar belakang pendidikan yang

rendah (ULf Sundhaussen, 1988:445). Kebijakan ini adalah sebuah keharusan absolut, saat ABRI masih dan akan mempertahankan peran sosial-politiknya. Semakin ABRI menyelam jauh ke karang-karang sipil--terpaksa atau dengan maksud politis--ABRI harus mengimitasi simbol-simbol sipil. Misalnya, dengan meniru sistem perkuliahan dan gelar akademis kaum sipil.

Dwi Fungsi Dan Pendidikan Militer

Ada beberapa sandaran teoritis yang bisa dijadikan alat eksplanatif di sekitar perombakan pendidikan AKABRI. Pertama pilihan menuju ekonomi modern yangmengharuskan beberapa konsekuensi logis, yakni bahwa semua kepentingan harus diambil oleh orang yang ahli dalam bidangnya dan harus bersikap tanggap terhadap kepentingan penetu ekonomi, seperti para pengusaha, manajer dan masyarakat pada khususnya .Kedua, keprofesionalan ABRI, akan sangat ditentukan dari kapsitasnya melakonkan fungsi ganda(Cornelis Lay, 1993:3). Ketiga, di masa mendatang peran militer akan lebih ditentukan oleh perubahan- perubahan yang terjadi dalam masyarakat ketimbang pergeseran pilihan sikap para perwira ABRI (Harold Crouch, 1986:15).

Dari teori pertama, sejalan semakin kompleksnya sistem perekonomian, ABRI mendapat tekanan kuat agar memberikan perenan lebih besar kepada ahli sipil dalam memutuskan kebijakan-kebijakan ekonomi dan memperhitungkan tuntutan dan harapan sektor swasta. Konsekuensi ini sangat berimplikasi pada posisi politis ABRI. Terlalu riskan bagi ABRI untuk menyerah pada tuntutan rasional ini. Solusi terbaik dan teraman adalah dengan mentransformasikan ekspertise ilmu militer seorang perwira yang berkeahlian sipil(civilizing the militeri's expertise). Akan banyak jumlah perwira yang berkemampuan sipil untuk diposkan pada posisi-posisi yang membutuhkan tenaga ahli pada bidangnya. Peluncuran kesana, jalur pendidikan menjadi pilihan mutlak. Untuk menimba keahlian-keahlian non militer, menjawab kebutuhan akselerasi pembangunan ekonomi. Sipil pun tidak terlanjur menempati pos-pos tersebut atau dalam kuantitas dan kualitas tidak dominan.

...niat memperluas volume otak perwira dan calon perwira ABRI tidak bergeser jauh dari misi untuk mendeteksi dan memahami ancaman stabilitas dari medan sospol.

Kebijakan ABRI dalam pendidikan juga berkait erat dengna performa profesionalismenya. Sinyalemen Kasad Wismoyo Arismunandar yang berujar bahwa profesionalisme ABRI juga harus ditakar dari fungsi sospolnya, layak dikaji serus. Sebab ternyata profesinalisme di bidang sospol harus diawali dari pembenahan pendidikan. Kecanggihan memerankan fungsi sospol tidak bisa tidak akan sangat ditentukan oleh penguasaan material medan sospol. Kebutaan akan berimplikasi buruk pada sikap respeksitas masyarakat sipil. Gerak-gerik rigid mungkin akan lebih menggejala andai ABRI tidak dibekali dengan penguasaan materi dunia sipil.

Sejak tahun 1960-an terbaca dua fenomena dalam lembaga militer negara-negara berkembang. Pertama, proses pendidikan(terutama perwira)yang kian diprioritaskan dalam rangka memadatkan kualitas profesinalisme. Kedua, semakin dependennya militer dunia ketiga pada bantuan militer asing, pendidikan, dan teknologi (Hasnan Habib, 1994:11). Skope pendidikan melebar ke bidang-bidang yang secara tradisional ada di luar bidang militer. Pada jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi masalah realitas dan potensi nasional dibahas dan dipelajari dengan tetpa bermuara pada pemikiran bagaimana keamanan nasional bisa berjalan ajeg. Pendidikan tinggi militer semakin membahas multifungsi dari militer untuk manajer-manajer militer bagi peranannya yang kian meluas di lingkungan internasional yang interindependen, berteknologi tinggi, dan berorientasi insurjensi. Jadi, niat memperluas volume otak perwira dan calon perwira ABRI tidak bergeser jauh dari misi untuk mendeteksi dan memahami ancaman stabilitas dari medan sospol. Pemahaman yang lebih komprehensif akan dunia sospol akan lebih melicinkan cara untuk meneropong setiap benih ancaman stabilitas nasional. Maka sarjanisasi perwira dan calon perwira ABRI lalu menjadi signifikan.

Sebagai kekuatan politik riil ABRI, sama halnya kekuatan-kekuatan politik lain semisal parpol, rentan terhadap godaan kekuasaan (seduction of power) yang sangat demokratis. Menjadi lebih krusial, justeru karena ABRI berbeda dengan kekuatan politik lain, memiliki daya destruktif yang sangat besar. Menjadi tepat bila prospek perubahan tatanan politik Indonesia masa depan, sama sekali tidak akan dilahirkan dari kesadaran-kesadaran perwira militer untuk menjalin kemitraan dengan politisi sipil. Bentuk penampilan ABRI nanti sangat dipengaruhi oleh tingkat kekuatan sipil, dan pada tahap inilah berbicara soal format politik menjadi tepat konteks. Perwira-perwira itu tidak akan pernah berniat untuk turun dari singgasana kursi-kursi politik. Pemusatan kekuatan politis kaum sipil-lah yang akan memaksa kesadaran mereka (Harold Crouch, 1986).

Maka boleh jadi kebijakan baru pendidikan ABRI berkorelasi dengan galangan spirit demokratisasi dan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia. Daya dobrak "arus bawah" memaksa ABRI untuk memilih sikap "akomodatif". Dan pemanfaatan jalur pendidikan, pada jangka panjang, akan efektif melunakkan radar curiga kaum sipil dan

menggiring kesadarn kultural rakyat untuk bisa menerima ABRI sebagi mitra sejati, bukan lawan. Artinya ekspansi ABRI kedunia pendidikan sipil bertujuan mensipilkan ABRI (pada level simbol-simbol kesarjanan) untuk kemudian "menipu" kesadaran rakyat bahwa ada kohesifitas integral antara ABRI dan rakyat (sipil). Bahwa ABRI juga mematamorfosikan diri secara total dalam getir dunia sipil, semisal memakai simbol akademis kaum sipil.

Kesimpulannya, lewat jalur pendidikan ABRI mau lebih menguatkan basis legitimasinya. Atau, saham legitimasi jangka ABRI akan difokuskan pada jalur pendidikan. Improvisasi impresif inilah yang meletakkan militer Indonesia selalu bisa tampil yakin diri dan tanpa kekeringan legitimasi. Kata Marvin L Rogers:"...whereas mlitary regime have an average life span of approximately five years , the mlitary government of Indonesia has ruled since 1966, an undeniable succes story in terms of political longerity...". ABRI memang dipaksa untuk menguras pikiran, mencari kantong-kantong legitimasi baru. Soalnya kemajuan di bidang ekonomi dan pendidikan kaum sipil berimplikasi terhadap tingkat pemahaman bernegara dan kesadaran kritis. Desakan inilah yang akan menghasntui singgasana kedudukan politis ABRI di mas a mendatang. Tidak berarti ABRI meninggalkan watak-watak kesukaannya yakni perilaku represifnya. Soalnya, apabila tidak ada cara lain lagi, maka pentungan menjadi senjata paling ampuh bagi ABRI.

Kaderisasi TNI Dan Prospek Demokratisasi



MERUPAKAN suatu upaya retrospeksi yang jujur bila orang sampai ke kesimpulan : lalu bagaimana di masa yang akan datang ? Akankah peran ABRI tetap terus seperti itu ? Pertanyaan tersebut semakin kuat gemanya bila dihubungkan dengan keadaan yang berlaku sekarang. Diketahui bahwa TNI generasi 45 sudah berada di ambang selesainya masa pengabdiannya. Yang dipertanyakan terutama adalah : apakah generasi TNI pasca 45

Memasuki PJPT-II, orang menoleh ke belakang. Tak pelak lagi yang tampak dan dirasakan adalah besarnya peran yang dimainkan ABRI selama PJPT-I sejak coup gagal PKI tahun 1965.

telah dapat mewarisi nilai-nilai yang menjadi legitimasi TNI generasi 45, terutama ciri kerakyatannya ? Sebab yang tampak selama peran ABRI, khususnya pada kurun waktu kurang lebih 15 tahun terakhir PJPT-I, kekuatan dan kekuasaan dalam mengatasi permasalahan dirasakan mengemuka. Citra yang membayang adalah TNI seolah-olah kehilangan kepribadiannya. Karena ia lalu dihadapkan pada masyarakat yangmenyuarakan aspirasinya. Sedangkan apa



Soemitro
(Jendral TNI Purn.)

yang dipersoalkan sebenarnya adalah ekses dari proses pembangunan dan produk dari "kesalahan" kebijakan pembangunan terjadi 10-15 tahun sebelumnya yangmemang seharusnya diluruskan kembali . Citra ini lebih dicemari lagi oleh ulah para oknum TNI yang mengambil kesempatan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Jadi yang dikuatirkan adalah bila kader muda TNI pasca 45 memang sudah berubah kepribadiannya, maka mereka akan "trigger happy" dalam menangani masalah sehingga akan terjadi kesenjangan antara aspirasi rakyat dengan sikap TNI. Padahal pergolakan yang terjadi di manamana pada era pasca Perang Dingin membuktikan bahwa permasalahan yang muncul sebagai bagian dari proses pembaruan tidak dapat diatasi atau diselesaikan dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan sematamata. Diperlukan pendekatan aspiratif dan inovatif untuk mengarahkan dinamika proses pembaruan ke arah yang positip. Dan memamng itulah ciri TNI yang lahir dari revolusi nasional dalam memecahkan masalah nasional yang dihadapi bangsa selama ini.

Karena itu sangat relevan bila yang muncul untuk diperbicangkan adalah kader TNI dalam konteks proses demokratisasi. Sebab kualitas peran kelompok sangat ditentukan oleh para kadernya.

Mutu karya ABRI dalam perannya mengatasi krisis nasional yang ditimbulkan oleh coup gagal PKI 1965 dan kiprah pembangunan bangsa selama 25 tahun --yang diujudkan dalam keberhasilan dan kegagalan-- tidak lain adalah keluaran dari hasil proses kaderisasi yang menempa para kader TNI. Dengan demikian untuk mengantisipasi karya ABRI di masa datang dapat diproyeksikan dari sistem kaderisasi yang menempa mereka selama 25 tahun yang lalu.

Menelusuri masalah kaderisasi dalam tubuh TNI/ABRI sebenarnya tidak sulit. Sebab sistem kaderisasi TNI/ABRI dapat dikatakan sudah baku. Kesadaran akan pentingnya kader bagi ABRI sudah dirasakan dan diejawantahkan sejak didirikannya Akademi Militer Nasional di beberapa daerah yang kemudian disatukan di Yogyakarta, kemudian di Magelang pada awal didirikannya Tentara Republik Indonesia. Setiap angkatan juga sejak dini sudah mendirikan akademi/institut untuk mendidik perwira muda. Bahkan di tingkat kecabangan juga ada yang mendirikan pendidikan perwira seperti Akademi Teknik Angkatan Darat dari kecabangan Zeni. Hal ini diungkap untuk memberi gambaran betapa pimpinan TNI/ABRI memberi perhatian terhadap pembentukan kader guna menopang mutu pengabdiannya kepada bangsa dan negara . Sistem kaderisasi tersebut terus menerus mengalami penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan tugas TNI/ABRI. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem kaderisasi TNI berinduk pada Sistem Pembinaan Personel yang terdiri dari dua komponen utama yaitu: Sistem Pembinaan Pendidikan dan Latihan, dan Sistem Pembinaan Karier. Perlu pula diketahui bahwa sistem dan policy pembinaan personel generasi 1945 dan generasi penerus dalam TNI-AD telah ditangani sejak tahun 1964, ketika penulis masih menjadi Kepala Dewan Perencanaan TNI-AD. Dengan demikian dapat dikatakan sistem kaderisasi TNI itu sudah baku sedangkan yang selalu mengalami penyesuaian adalah "muatannya". Muatan ini akan selalu disesuaikan dengan Rencana Strategik yang disusun untuk kurun waktu lima tahun dengan prinsip sliding principle.

Citra yang membayang adalah TNI seolah-olah kehilangan kepribadiannya. Karena ia lalu dihadapkan pada masyarakat yang menyuarakan aspirasinya.

Kalau ada kesan yang menyimpulkan bahwa TNI angkatan 45 itu digembleng tidak terpisah dari rakyat sehingga jiwa kerakyatannya dapat diandalkan, sedangkan kader TNI pasca 45 dididik "terpisah dari masyarakat sipil di akademi" hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sistem kaderisasi TNI sepenuhnya didasari falsafah kelahiran TNI yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat serta hakekat TNI sebagai tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Manifestasinya antara lain adalah dalam bentuk adanya program Latihan Integrasi Taruna Wreda (LATSITARDA) di tingkat pendidikan AKABRI, dan adanya jabatan territorial yang harus dialami dalam tour of duty and area bagi para perwira potensial. Bahkan bila disimak sepanjang perjalanan pengabdian TNI, tidak pernah terdapat kekosongan program pengabdian kepada masyarakat walaupun dengan berbagai nama yang berbeda.

Pada masa prakemerdekaan memang para kader pimpinan TNI angkatan 45 digembleng dalam kawah candradimukanya perjuangan nasional yang sama dengan para kader dari profesi lain seperti pemimpin politik, pendidikan, kebudayaan, dsb. Dalam era kemerdekaan konstelasi pembentukan kader bangsa berubah sama sekali. Setiap profesi seakan-akan mempunyai "kawah candradimukanya" sendiri-sendiri untuk mencetak kadernya. Tetapi apakah ini relevan apabila diidentikkan dengan pengasingan (alienation) dari aspirasi kerakyatan ? Masyarakat berubah,keadaan lingkungan berubah, harapan dan tuntutan berubah, maka kunci untuk menjamin tidak terasingnya para kader bangsa dari aspirasi kerakyatan adalah selalu disesuaikannya sistem kaderisasi dengan perubahan yang terjadi tersebut dengan muatan aspirasi dan harapan rakyat tetap ditanam dalam sanubari para anak didik dan tidak dipisahkan dari kehidupan rakyat sehari-hari. Kalau sekarang ini dikatakan bahwa alam keterbukaan telah bergulir semakin luas sejak dipromotori oleh Komisi II DPR pada 21 Juni 1989, maka sebenarnya

yang menikmatinya pertama dan terutama adalah para kader di luar TNI/ABRI. Hal ini dapat diikuti dari buah pikiran yang dimuat di media massa, maupun kertas kerja atau presentasi para cendikiawan di dalam seminar maupun di dalam kampus. Buah fikiran mereka mengisaratkan kebebasan dan independensi yang sangat besar. Tujuan dari keterbukaan tidak lain adalah untuk menerapkan demokrasi dalam praktek secara sehat. Hal ini dimungkinkan, setelah lebih dari dua dasawarsa kehidupan politik di Indonesia dikendali secara ketat dengan kaidah keadaan darurat dan semi darurat, stabilitas dapat dipulihkan. Ini adalah hasil karya dan pengorbanan dari seluruh rakyat dan bukan hanya TNI/ABRI semata-mata.

Tetapi praktek kehidupan demokrasi yang sehat itu belum sepenuhnya dapat diujudkan. Sebab regulasi yang berlaku masih berupa kaidah untuk mengatasi keadaan darurat. Semua regulasi dan kaidah tersebut harus dicabut dan diganti dengan yang baru sesuai dengan keadaan yang sudah normal. Selama belum diganti, maka dengan sendirinya kiat kekuasaan dan peran ABRI yang didasari kaidah keadaan darurat tidak akan dapat ditiadakan begitu saja. Kemauan politik cukup jelas dengan program deregulasinya dan pemberian peran swasta yang lebih besar di bidang ekonomi. Bahkan monopoli BUMN atas sektor ekonomi tertentu sudah mulai diperlunak. Dari berbagai pernyataan pimpinan ABRI, pun tergambar keinginan ABRI untuk mengurangi keterlibatannya dalam kehidupan politik bangsa dengan melakukan graceful disengagement secara bertahap dengan tanpa menimbulkan kevakuman kekuasaan melalui penerapan prinsip "tut wuri handayani". Di samping proses yang menggembirakan tersebut, di pihak lain tampak bahwa keterbukaan tersebut memunculkan gejala penggunaan kebebasan yang menjurus ke ekstrimisme. Hal ini dapat dipantau dari media masa dan berbagai aksi apa yang disebut arus bawah. Perlu dicatat bahwa gejala yang menjurus ke kevakuman kekuasaan pemerintah pusat merupakan hal yang umum dalam proses reformasi politik. Tetapi ini adalah gejala yang sangat berbahaya karena dapat berkembang ke timbulnya gejolak berskala nasional dan bila ini terjadi keterbukaan tersebut bukannya akan menghasilkan kehidupan demokrasi tetapi justru bencana yang akan menyeret bangsa Indonesia mundur beberapa dasa warsa. Karena itu semua pihak haruslah menarik batas yang wajar untuk mendinamisir kesinambungan keterbukaan tanpa menimbulkan resiko gejolak sosial yang tidak terkendali. Disini peran kader dari semua kekuatan sosial politik sangatlah menentukan. Baik peran kader TNI maupun non ABRI harus dapat mengukur dengan cermat "tegangan" yang dapat diterima oleh masyarakat dalam melakukan proses reformasi. Para kader hendaknya tidak saling menuding atau saling menyalahkan bila terjadi perkembangan yang menjurus ke suatu krisis. Justru menjadi kewajiban semua kader kekuatan sosial politik untuk saling berdialog, mendiskusikan bagaimana cara mengatasi atau mencegah timbulnya gejolak. Harus disadari oleh semua pihak bahwa masa transisi atau reformasi mengandung kerawanan. Masyarakat cenderung bingung mencari pegangan baru atau canggung untuk menyesuaikan diri dengan kaidah baru dalam proses graceful disengagement ABRI dari keterlibatannya yang jauh dalam kehidupan bangsa selama 25 tahun, jangan sampai orang keliru mengartikannya bahwa TNI/ABRI akan menekuni profesi "militer" menurut konsep barat. TNI/ABRI akan tetap merupakan tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang yang merupakan mitra kekuatan sosial politik lain dalam menangani masalah yang dihadapi bangsa. Tetapi dalam situasi kehidupan bangsa yang normal dan stabil dimana para profesional lain sudah dapat melaksanakan fungsinya, dengan sendirinya sudah tidak ada alasan bagi TNI/ABRI untuk melakukan "intervensi". Barangkali bukan soal ketrampilan atau kemampuan profesional yang membuat anggota TNI/ABRI dapat mengambil tindakan dalam keadaan darurat, tetapi secara universal memang hanya ABRI-lah yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan suatu tindakan ekstra ordinaid guna menyelamatkan kepentingan umum.

Dalam kondisi politik seperti sekarang seharusnya peran birokrasi dan aparatur keamanan, selain POLRI, tidak dikedepankan dalam mengelola dinamika proses pembaharuan. Justru GOLKAR dan Parpol-lah yang seharusnya tampil ke depan. Sebab merekalah yang menjadi perpanjangan kepentingan dan aspirasi rakyat pemilih. Merekalah yang seharusnya lebih peka terhadap aspirasi yang hidup di tengah masyarakat. Dan mereka pulalah yang menjadi penyalur aspirasi rakyat serta membentuk kebijakan melalui lembaga pemerintahan dan kenegaraan dimana mereka duduk. GOLKAR dan Parpol serta lembaga kekuatan sosial politik lainnya seharusnya mampu menggerakkan dan mengendali dinamika pembaruan sehingga berfungsi positif guna menggerakkan kesinambungan pembangunan nasional.

Dengan demikian spirit yang dikandung tema bahasan dalam kemurniannya, berisi iktikad luhur dari para kader sipil untuk menjalin hubungan lebih akrab dengan kader TNI/ABRI. Sebab memang merupakan tuntutan tugas, bagi semua kader bangsa dari semua lapisan dan jajaran untuk bahu-membahu dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa

gejala yang menjurus ke kevakuman kekuasaan pemerintah pusat merupakan hal umum dalam proses reformasi politik tapi sangat berbahaya karena dapat berkembang ke gejolak nasional

dalam abad XXI. Keakraban ini hanya bisa dibina melalui saling mengenal lebih dalam kemampuan dan pembatasan serta pola berpikir masing-masing. Hal ini hanya bisa dicapai melalui dialog secara terbuka.

Untuk melakukan dialog seperti itu perlu dipahami beberapa hal. Para kader non-ABRI lebih leluasa dan bebas untuk mengemukakan kritik dan koreksi terhadap pemerintah. Sedangkan kader TNI tidak dapat secara terbuka melancarkan kritik tersebut. Dan tentunya masyarakat tidak menghendaki kalau ABRI mengesampingkan ketentuan disiplin, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dalam melaksanakan fungsi sosial politiknya. Bukankah itu akan berarti suatu permulaan tindak insubordinasi dan obstruksi. Dialog dapat juga dilakukan antara AKABRI dengan Kampus. Tetapi di sinipun perlu diperhatikan beberapa syarat.

Pertama, tema dialog jangan mempermasalahkan apa yang dihadapi sekarang, terutama akibat dari tindakan pemerintah. Tetapi diutamakan penggunaan forum guna mengembangkan kemampuan memecahkan masalah yang ada secara konsepsional dan komprehensif. Sikap emosional dan ekstrim hendaknya dihindari. Sebab mempermasalahkan sesuatu yang berlaku, apalagi yang merupakan akibat dari tindakan pemerintah, akan menempatkan kader muda TNI pada posisi yang sulit. Sebab ABRI tidak bisa melapaskan diri dari kedudukannya sebagai aparatur keamanan pemerintah. Mereka akan bisa merasa dipojokkan sehingga bertindak defensif. Hal seperti itu akan menimbulkan perasaan kurang enak pada kader TNI, hal mana sama sekali tidak boleh terjadi dalam suatu dialog. Nilai-nilai seperti itu hendaknya dapat dikembangkan menjadi etika berdialog antar kader TNI dari kalangan sipil.

Kedua, forum dialog harus selektif dan terbatas. Ketiga, dialog ditekankan untuk pengembangan wawasan dan visi, pengembangan konsep serta penyerasian tata dan pola pikir menjangkau abad XXI. Juga untuk memantapkan idealisme dan patriotisme serta membina jiwa kemitraan (team spirit). Keempat, pemilihan subyek bahasan juga selektif dan diajukan sebelumnya. Dan akhirnya, dialog semacam ini harus dibebaskan dari liputan media massa. Yang dikuatirkan adalah lebih banyak perbedaan dan pertentangan yang dilaporkan. Sedangkan kesepakatan dan persamaan yang dicapai tidak ditonjolkan.

...mempermasalahkan sesuatu yang berlaku, apalagi yang merupakan akibat dari tindakan pemerintah, akan menempatkan kader muda TNI pada posisi yang sulit.

Para kader dari kalangan sipil tidak perlu melihat kader TNI sebagai penghalang bagi upaya demokratisasi. Sampai sekarang belum ada preseden yang menunjukkan bahwa jajaran TNI/ABRI menentang kehidupan demokratik. Juga belum pernah ada preseden di mana TNI/ABRI menggunakan kekuatan senjatanya untuk memaksakan suatu konsep politik. Selama prosedur musyawarah untuk mufakat digunakan serta konsensus nasional dijadikan acuan untuk memecahkan suatu permasalahan, TNI/ABRI akan toleran terhadap semua buah fikiran.

Semua kekuatan sosial politik hendaknya menyadari bahwa satu- satunya yang tidak dapat ditolerir lagi oleh TNI/ABRI adalah upaya untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan UUD 45. Sebab hal tersebut akan bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta kewajiban moral terhadap para pahlawan revolusi yang telah mengorbankan segala-galanya demi negara proklamasi 17 Agustus 1945.

Lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal baik dari kalangan ABRI maupun sipil harus waspada jangan sampai mengembangkan ekslusifisme di kalangan anak didik. Harus disadari sepenuhnya bahwa proses pendidikan masyarakat modern bertumpu pada pengembangan profesi. Padahal sebagai kader bangsa pengabdian semua tenaga profesional bermuara ke menjaga kehormatan bangsa, integritas bangsa, kedaulatan negara dan kepentingan nasional. Idealisme tersebut harus tetap terbina di bidang profesi apapun. Sebab tanpa idealisme yang berkobar-kobar semangat untuk bersaing dan berjuang mencapai cita-cita akan lemah. Padahal dalam era globalisasi di Abad XXI tantangan untuk kelangsungan hidup bangsa akan sangat banyak. Baik yang timbul dari proses perkembangan dalam negeri, maupun yang terimbas dari perkembangan dari luar. Para kader pasca 45 tidak perlu merasa rendah diri atau inferior dibanding para kader generasi perintis kemerdekaan, generasi 45 dan generasi lainnya. Tantangan dan panggilan pengabdian para kader generasi pasca 45 untuk mengisi kemerdekaan, mempertahankan kehormatan bangsa serta kedaulatan negara agar terjamin kelangsungan hidupnya tidak lebih kecil artinya dibanding dengan tantangan yang dihadapi para kader generasi sebelumnya.

Sampai sekarang pernyataan Panglima Besar Soedirman masih berlaku: "....Satoe-satoenya hak milik nasional Repoeblik jang masih tetap oetoeh dan tidak beroebah-oebah meskipoen haroes menghadapi segala matjam soal dan peroebahan, adalah hanja Angkatan Perang Repoeblik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia). Maka sebenarnya menjadi kewadjiban bagi kita sekalian jang senantiasa tetap mempertahankan tegaknya proklamasi 17 Agoestoes 1945, oentoek tetap memelihara agar soepaja hak milik nasional Repoeblik itoe tidak dapat diroebah-roebah oleh keadaan jang bagaimanapoen djoega."

Jakarta, 10 Juni 1994

RAMAI-RAMAI

Kembali ke Pangkuan Rakyat !

Akhir 1991, 26 mahasiswa Bandung yang tergabung dalam Komite Solidaritas Mahasiswa Rakyat Badega (KSMURB) mengadakan advokasi petani Badega. Mereka menuntut agar dicapai penyelesaian yang lebih bijaksana tentang sengketa tanah di gunung Badega, Jawa Barat. Kasus ini menyangkut tanah seluas sekitar 400.500 hektar dan melibatkan 413 kepala keluarga. Pada awal tahun 1960-an, tanah tersebut pernah tidak diurus dan dimanfaatkan oleh penduduk. Intinya sebuah perusahaan bisnis menurunkan aparat pemerintah untuk mengintimidasi, bahkan menangkap penduduk yang mencoba mempertahankan tanah itu. Mereka turun ke desa, memberikan penyadaran politik kepada petani Badega tersebut

dan mengantar mereka ke gedung DPR. Ketika mendampingi penduduk keluar dari desa mereka membagi ke dalam beberapa kelompok terdiri dari empat orang. Setiap mahasiswa mendampingi satu kelompok penduduk dengan tugas meloloskan kelompoknya dari cegatan militer, yang ketika itu sa-ngat ketat memblokir wilayah Badega.

APA yang dilakukan KSMURB tersebut hanyalah sekelumit gambaran bagaimana mahasiswa sekarang bergerak. Mereka mengisi "amunisi" perjuangannya, dengan menghimpun masyarakat yang tertindas untuk kemudian diangkat ke pentas nasional. Tak pelak lahan paling subur dari kecenderungan baru gerakan mahasiswa itu adalah masalah buruh dan petani, serta masalah mereka yang tidak diuntungkan dalam proses pembangunan. Munculah kelompok- kelompok mahasiswa yang melakukan advokasi kasus-kasus tanah semacam Jatiwangi, Kacapiring, Cimacan, Kedung Ombo, Cilacap, Tanah Merah, Pulau Panggung, Belanggan, Rancamaya dan Cijanti. Belum lagi gerakan mahasiswa di luar pulau Jawa yang memang agak jarang ter-*cover.*

Isu Lokal

Munculnya



kecenderungan kolaborasi antara rakyat dan mahasiswa ini mendapat perhatian khusus dari Edward Aspinall, kandidat doktor dari Monash University. Dalam diskusi yang diadakan majalah *Pijar*, Aspinall mengatakan bahwa salah satu karakteristik gerakan mahasiswa era 1990-an adalah berkembangnya fenomena "kasus rakyat". Kebangkitan kembali gerakan mahasiswa dicirikan oleh orientasi baru yang menarik yaitu fenomena "turun ke bawah". Para aktivis mahasiswa mulai turun ke lapangan untuk bekerjasama dan mendampingi petani dan buruh dalam kampanye memperjuangkan haknya dalam kasus-kasus tertentu. "Pada intinya, proses ini merupakan awal kemunculan suatu orientasi massa. Ini merupakan fenomena yang sama sekali baru selama sepanjang sejarah orde baru", katanya. Berdasarkan penelitiannya selama periode 1989- 1982 terjadi 155 kali demonstrasi mahasiswa terutama menyangkut soal tanah, nasib buruh dan pelanggaran hak asasi.

Menurut peneliti masalah Asia Tenggara di Monash University ini, gerakan mahasiswa sepanjang periode 1990-an bersifat lokal. Isu yang diangkat tidak lagi soal politik kekuasaan melainkan isu lokal yang langsung terjadi di masyarakat. Mereka menuntut pemberian ganti rugi yang layak bagi tanah-tanah rakyat yang tergusur proyek pemerintah (waduk) dan swasta (perumahan, agrowisata dan lapangan golf) menuntut dihormatinya hak-hak buruh (upah minimum, pemogokan), penghapusan perjudian (SDSB), memprotes perundang-undangan (UULL), mengkritik pencemaran lingkungan (sungai, hutan , pabrik).

Nirwan A. Arsuka:

Minimal dalam dua tahun terakhir ini, isunya masih tetap tertuju ke pusat kekuasaan

Kalau dilihat secara lebih teliti ada benang-benang merah yang mengkaitkan antara berbagai aksi tersebut misalnya tema dan kasus yang diangkat. Ada spektrum yang luas dalam bentuk organisasi gerakan mahasiswa misalnya kelompok studi, kelompok aksi, LSM, organisasi jaringan kelompok yang aktif di tingkat bawah, *cover group, under ground and semi under ground* dan sebagainya. Fenomena ini, lanjut Aspinall, disebabkan oleh ruang gerak politik mahasiswa yang terbatas maupun merupakan usaha untuk menghindari represi negara.

Pendapat Aspinall ini tidak dibantah oleh Nirwan Ahmad Arsuka, koordinator Gempur Deru (Gerakan Masyarakat Purna Orde Baru). Tetapi menurut pengamatannya, selain kecenderungan kuat orientasi ke bawah minimal selama dua tahun terakhir ini ada tanda-tanda isu yang diangkat tertuju ke pusat kekuasaan. "Prinsipnya mereka masih berbasiskan pada kasus lokal, lalu mereka menggunakan kasus-kasus lokal tersebut untuk mengkoreksi kebijaksanaan pembangunan. Kejadian lokal toh direncanakan dan diputuskan orang pusat (Istana), ujung-ujungnya ya ke sana juga!" ujarnya.

Sejak 1993 mahasiswa menggoyang panggung perpolitikan nasional. Dalam aksi-aksi protes mahasiswa tersebut mereka dengan tegas mengambil sikap politik oposisi terhadap penguasa dan kebijaksanaan Orde Baru, sikap oposisi mereka mulai terlihat pergeseran ke arah menggugat sistem politik walaupun belum secara substansial. Teristimewa kasus aksi yang dilakukan 21 mahasiswa ke DPR/MPR

14 Desember 1993 yang menuntut diadakannya sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden . Akibatnya, Yeni Rosa Damayanti, Adi Kurniawan, Dikson Sirait, Masduki dan 17 mahasiswa lainnya ditahan dan diajukan ke pengadilan dengan tuduhan "menghina daripada presiden". Lalu pada 2 Juni 1994 lalu ratusan mahasiswa dari berbagai kota seperti dilansir koran-koran tengah mencanangkan pembentukan organisasi politik.

Di tengah ancaman pembubaran terhadap organisasi massa semacam SBSI, mahasiswa terang-terangan mendirikan organisasi politik yang mereka namakan Persatuan Rakyat Demokratik (PRD). Kemudian di saat-saat mengusung skandal Bapindo, mereka meminta beberapa pejabat tinggi yang diduga terlibat untuk mengundurkan diri. Terakhir adalah gelombang demonstrasi yang menuntut dicabutnya lembaga SIUPP yang membreidel nasib ribuan loper.

Franki, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung berpendapat tak jauh beda dengan Nirwan. "Biasanya isu gerakan mahasiswa bergeser dari titik internal menuju titik eksternal", ujarnya. "Pergeseran itu", lanjut Franki, "karena kesenjangan ekonomi yang dibarengi dengan praktek korupsi dan kolusi diantara pejabat". Akibatnya, aspirasi bawah terus bangkit dan mencapai puncaknya ketika borok-borok aparatur negara mulai terlihat. Kondisi ini kian parah ketika instrumen politik yang ada (orsospol) tidak bisa bergerak. Fakta inilah yang menyebabkan rakyat dan mahasiswa berhadapan langsung dengan pemerintah, sehingga muncul aksi Medan, parlemen jalanan yang menghakimi pejabat yang terlibat kasus kredit macet.

Revivalisme politik ini terus bergulir, salah satu faktor yang melatarbelakangi adalah terjadinya pergeseran pandangan dalam melihat gejala lokal. Setiap masalah yang muncul didalam kehidupan masyarakat tidak semata-mata dilihat sebagai tindak pidana atau perdata, melainkan sudah dianggap sebagai masalah politik. Tidak juga dipandang sebagai peristiwa tetapi fenomena yang menyangkut masalah politik. Karena itu masalahnya bukan terletak pada di daerah A ada penggusuran, di pabrik B ada eksploitasi buruh, tetapi masalahnya mengapa itu semua bisa terjadi.

Sementara Bonar Tigor Naipospos menyimpulkan, salah satu karakteristik gerakan protes mahasiswa saat ini adalah pentingnya kerja sama dengan rakyat secara langsung baik di pedesaan maupun perkotaan. Mahasiswa sekarang tidak bisa (hanya) membela rakyat ke atas, sementara rakyat sendiri yang sedang dibelanya tidak diikutsertakan. Itulah yang membedakan dengan gerakan mahasiswa sebelumnya yang cenderung elitis. "Meskipun kecil, mahasiswa sekarang lebih maju karena mereka berada langsung di tengah masyarakat. Saya dengan rakyat justru punya keberanian yang tidak pernah disangka oleh mahasiswa", tuturnya.

Bonar Tigor:

Mahasiswa dan rakyat punya keberanian yang tak pernah disangka-sangka

Mahasiswa yang pernah "ditahan" selama enam tahun gara-gara mengadakan diskusi bukunya Karl Marx ini mencatat aliansi yang menarik. Pada periode 1960-an jelas sekali KAMI bekerja sama dengan unsur Angkatan Darat ABRI untuk mencapai tujuan bersama menggulingkan Soekarno. Pada periode 1970-an mahasiswa masih memiliki orientasi kekuasaan elit misalnya pada peristiwa Malari yang pada akhirnya meletakkan gerakan mahasiswa pada posisi yang cukup berbahaya, terjebak dalam permainan elit politik. Pada periode pasca 1978 sampai sekarang, lanjut Bonar, aliansi *real* adalah kerja sama dengan kelompok elit pinggiran dan masyarakat secara langsung.



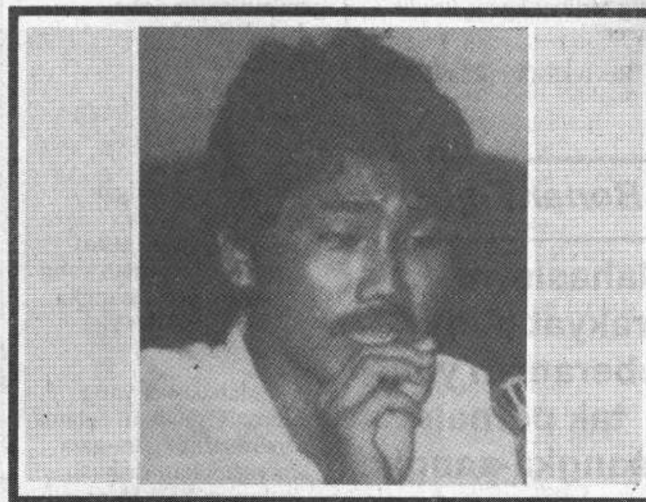
Gerakan mahasiswa memang sangat akrab dengan isu "penunggangan". Berbagai tangan dari kekuatan elitis yang mencampuri gerakan mahasiswa sejak angkatan '66, menyebabkan label "ditunggangi" itu tidak pernah lepas sampai sekarang. Tetapi gerakan mahasiswa terutama pasca 1987, dinilai oleh banyak kalangan justru lebih mandiri. Mereka tidak mencari cantolan jalur-jalur ke pusat kekuasaan tetapi membangun kekuatan melalui kolaborasi dengan rakyat. "Sekarang sangat jarang ada aksi-aksi mahasiswa yang dilakukan karena instruksi dari elit kekuasaan kecuali aksi konyol pendukung pencabutan SIUPP yang tidak tahu apa itu SIUPP", kata Nirwan. Ia mengungkapkan , independensi itu jauh lebih tinggi dibanding angkatan '66 yang selalu memulai aksinya dari Mabes ABRI, paling tidak dari restu petunjuk dan perlindungan mereka.

Dengan kemandirian itu bukan berarti gerak mahasiswa mutlak berdiri sendiri. Justru makin dirasakan bahwa gerakan mahasiswa (hanyalah) satu elemen saja dari penggerak perubahan masyarakat. Menurut Bonar gerakan mahasiswa sekarang bekerja sama dengan LSM, kelompok-kelompok oposisi baik untuk advokasi, tema atau

pun pendanaan. Pilihan ini tentu bukan tanpa alasan, seperti diamati Nirwan, banyak mahasiswa yang ikut dalam LSM dan banyak yang dalam kegiatannya melibatkan mahasiswa. "Ada saja kesejajaran kepentingan antara mahasiswa dan LSM", ujarnya.

Boby Raymond, Presidium Senat Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga melihat bahwa fenomena ini bukan proses yang pendek. Kalau dirunut bermula dari kebijakan NKK/BKK yang bertujuan melahirkan *man of analysist.* Karena itu kegiatan kampus dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan dunia akademik dan melarang semua bentuk kegiatan politik mahasiswa di luar kampus. Dewan Mahasiswa -- yang menjadi pusat gerakan dan penyaluran aspirasi -- ketika itu dibubarkan, maka banyak mahasiswa lari ke LSM. Mahasiswa yang juga turut aktif di LSM ini melihat bahwa potensi dan energi mahasiswa untuk mencari saluran baru di luar kampus. Kemudian ramai dengan kelompok studi sampai periode 1980-an yang dikenal sebagai generasi kelompok studi. Melalui kelompok itu pikiran kritis diasah. Tetapi lambat laun kalangan aktifis mahasiswa tidak puas dengan pemikiran kritis yang hanya ada di atas kepala. Maka sejak 1987 mulailah mahasiswa turun ke jalan berkolaborasi dengan rakyat, mengangkat tema-tema populis.

Rizal Mallarangeng aktifis mahasiswa angkatan 1980-an mengatakan bahwa orientasi ini kemungkinan juga diakibatkan oleh teori-teori Marxis dan neo-Marxis yang mereka baca. Saluran pemikiran-pemikiran kiri dalam gerakan mahasiswa adalah kelompok studi yang membahas teori-teori tersebut pada pertengahan '80-an. Dengan dipengaruhi oleh pembahasan teori radikal



gerakan mahasiswa di Filipina dan Korea Selatan, muncul suatu pemikiran untuk meletakkan kekuatan rakyat sebagai posisi krusial bagi suatu

Rizal Mallarangeng:

Terpengaruh gerakan radikal mahasiswa Korsel dan Filipina

proses demokrasi yang fundamental. Faktor ini, lanjut Rizal dapat dilihat dalam sebagian diskursus dari gerakan dan dari *sustained organized work* yang dilakukan banyak aktifis khususnya di kalangan buruh.

Tetapi ada juga yang melihat fenomena ini sebagai pilihan strategi gerakan mahasiswa. Nirwan Arsuka misalnya menilai gerakan "turun ke bawah" adalah cara untuk menghindari kenyinyiran dan represi paranoid negara. Di samping itu pilihan ini yang paling efektif, setelah Dewan Mahasiswa dibekukan praktis tidak ada organisasi formal sebagai sarana komunikasi dan kelembagaan. "Tetapi pilihan itu sama saja, sebab terbukti meski mengangkat kasus-kasus lokal, isu yang dibawa bisa menggema ke tingkat nasional sebab ada kesamaan isu yang diangkat antar berbagai aktifis di berbagai kota", tuturnya menjelaskan.

Tentu saja banyak kritik dilontarkan pada gerakan mahasiswa. Nirwan sendiri menilai bahwa gerakan mahasiswa saat ini pada umumnya masih belum pandai betul menghargai "sang lain", orang di luar mereka. Antar berbagai aktivis baik kelompok studi, LSM dan kelompok aksi masih saling "rebutan". Mahasiswa sering juga "arogan", sok menganggap dirinya terdepan, dengan memanggul peran historis yang pernah mereka mainkan. Padahal, mahasiswa tanpa dibantu oleh elemen lain, maka perubahan yang dicita-citakan tidak akan pernah berhasil. Toh kalau ada pemukulan sebagian dari mereka bisa *ngacir* duluan; naik taksi!

Sementara Anis Rasjid Baswedan mantan Ketua SM UGM memberi tiga catatan. Pertama kekhawatiran kita pada lembaga kemahasiswaan perlu dievaluasi kembali. Dalam arti bagaimana kita melihat lembaga kemahasiswaan itu sebagai salah satu komponen gerakan mahasiswa. Lupakan SK Menteri dan kita bangun struktur serta kultur yang sesuai dengan situasi mahasiswa. Kedua, perlu dibangun kemandirian, keberanian untuk membangun dinamika gerakan mahasiswa. "Karena saya melihat gerakan mahasiswa sekarang cenderung sudah mulai menurun dinamikanya", paparnya. Ketiga, yang penting adalah kesadaran tidak berpikir *instant.* Nah kemudian, masih menurut Anis, ada satu peluang tapi bisa juga tantangan. Jumlah aktor gerakan mahasiswa makin menurun kemudian pola-pola gerakan yang dimunculkan itu sudah semakin klasik. Diperlukan untuk ke depan satu strategi khusus untuk: pertama, menambah jumlah aktor dan yang kedua adalah menambah variasi pola.

Kritik dan catatan apapun, yang pasti mahasiswa senantiasa bergerak, mencari jalannya sendiri, memakai logikanya sendiri di setiap masanya.

Eriyanto
Djudjur, Eri, Choiron, Sodjang

Malam itu ruang tunggu di depan loket karcis stasiun Tugu cukup ramai oleh calon penumpang. Ada yang sedang antre karcis di loket, ada pula yang menanti kereta lewat sambil duduk bersandar pada dinding atau tiduran di lantai dengan berbantal barang bawaannya. Di sudut ruang sekelompok anak muda nampak asyik ngobrol sambil menghisap rokok. Mereka sedang menanti kereta. Tak jauh dari tempat itu seorang bocah bertubuh dekil memperhatikan dari tempatnya duduk. Lalu bocah itu beranjak mendekat. Dengan wajah tanpa dosa ia duduk di dekat pemuda yang berambut gondrong. Si bocah turut menyimak pembicaraan mereka. Sesekali ia tersenyum begitu mendengar obrolan yang lucu. "Ngapain kamu?" Tanya si gondrong tiba-tiba.



Jejak kecil di Jalanan

MATANYA menatap curiga pada anak jalanan itu.

"Sepatunya disemir ya, Mas," si bocah mencoba mengusir kecurigaannya. Pemuda gondrong itu lantas memperhatikan sepatu bootnya. "Berapa duit?" tanyanya kemudian. Bocah itu tak menjawab. "Dua ratus, ya?" Kata si gondrong lagi. Lalu ia melepas kedua sepatunya. "Nih!" ia mendorong sepatu itu ke arah si bocah. "Dua ratus perak. Yang licin!" lanjutnya.

Bocah itu hanya menganggukk lalu beranjak mengambil kotak semir. Satu persatu isi kotak itu dikeluarkannya. Sikat, selembar kain lusuh, dan semir kaleng bermerek *Red Bird*. Sesaat kemudian ia sudah disibukkan dengan sepasang sepatu boot milik si gondrong. Ia tak lagi mempedulikan obrolan pemuda-pemuda itu. Sepasang sepatu jauh lebih berarti bagi dirinya.

"Kok nggak mengkilap?" Tanya si gondrong begitu disodori sepatu yang selesai disemirnya. "Sepatunya nggak kulit, Mas...," bocah penyemir itu membela diri. Seketika si gondrong melotot. "Sembarangan saja ngomong! Nih, lihat nih..." ia memperlihatkan bagian dalam sepatunya tepat di depan mata bocah penyemir. "Kulit, kan!" Katanya geram.

Untung, nama bocah penyemir itu, menatap takut wajah garang di hadapannya. Ia diam membisu, tak berani berkutik. Begitu juga ketika si gondrong merebut semir dan sikat dari tangannya. Untung hanya mampu diam terpaku memperhatikan si gondrong menyemir ulang sepatu yang baru saja disemirnya. Tak ada keberanian menegur si gondrong yang dengan *cueknya* mengoleskan semir hitam pada permukaan sepatu boot yang setinggi betis orang dewasa itu. Untung juga tak mampu meminta lebih ketika dua keping uang logam seratusan disodorkan padanya. Sambil menutup kaleng semir yang nyaris habis, Untung hanya mampu mengangguk dan berucap, "Terima kasih, Mas."

Untung hanyalah salah satu dari sekian banyak anak jalanan di Yogyakarta. Jika kita rela menyempatkan diri memperhatikan keramaian orang di stasiun, terminal, atau di sepanjang jalan Malioboro yang padat itu pastilah akan kita temui bocah-bocah berbaju lusuh. Entah tukang semir, pengamen, penjual koran, penjual gelang, atau hanya berdiri di bawah tiang *traffic-light* sambil menanti lemparan receh dari pengendara kendaraan. Bagi sebagian orang, anak-anak jalanan itu merupakan pemandangan kotor dan menjijikkan yang dapat merusak citra Kota Berhati Nyaman, hingga para aparat berseragam sibuk menyingkirkan mereka. Mereka diusir dari pusat-pusat keramaian kota yang menjadi lahan mencari nafkah tanpa mau peduli siapa sebenarnya *tekyan* (anak jalanan, red) itu.

Kehadiran anak-anak usia sekolah di jalanan berawal dari lepasnya ikatan dengan keluarga. Ada beberapa faktor yang membuat mereka terlepas dari hubungan keluarga. Ada yang menjadi korban penggusuran, ada yang *minggat* dari rumah karena sering dimarahi, ada pula yang sejak lahir tidak mengenal orang tuanya.

Seperti Supri, penjual gelang di Malioboro ini tak pernah mengenal wajah ayah dan ibunya. Sejak kecil, bersama tiga orang saudara tirinya dari ayah yang berbeda-beda, Supri diasuh neneknya yang tinggal di Tanjung Priok, Jakarta. Menginjak usia 9 tahun ia mendengar desas-desus dari tetangganya bahwa sejak lahir ia sudah ditinggal pergi ayah dan ibunya. Lantas Supri mendesak neneknya untuk memberitahu di mana sebenarnya kedua orang tuanya. Tapi sang nenek tak mau memberitahu secara pasti. Karena mangkel ia pun jadi sering minggat dari rumah. "Kalau saya pergi, nenek dan kakak-kakak saya pasti mencari saya. Tapi begitu ketemu saya langsung dihajar dan dihukum. Lama-lama saya nggak betah terus ikut orang ke Surabaya sampai dua tahun, lalu di Yogya sampai sekarang," kata *tekyan* yang sudah tiga tahun menetap di Yogya.

Lain halnya dengan Untung. Bocah 14 tahun ini dengan sengaja meninggalkan rumah. "Mamak tiri saya galak. Saya sering *digebuki*," katanya perlahan. Sejak kematian ibunya ketika melahirkan adiknya,



Si Untung yang tak beruntung
Berjuang menghidupi diri sendiri

ayah Untung lantas mengambil istri lagi. Saat itu Untung masih berusia 3 tahun. Mereka hidup miskin di sebuah desa di kabupaten Kebumen. Ayahnya yang *petani gurem* itu harus berjuang menhidupi istri dan ketiga anaknya. Perjuangan hidup yang berat tersebut terasa kian berat ketika sang ayah yang selama ini menjadi tiang penyangga ekonomi keluarga berpulang pada Tuhan. Praktis mamak tiri harus berjuang menyambung hidup yang kian compang-camping. Untung tak lagi punya kesempatan bermain. Selain sekolah hari-harinya penuh kerja membantu ibu tirinya. Tak hanya itu, Untung dan kedua saudaranya juga menjadi sasaran marah mamaknya akibat kondisi ekonomi keluarga yang sangat marginal. "Karena tak tahan, setelah lulus SD saya minggat dari rumah."

Hari-hari selanjutnya adalah perjuangan hidup sepanjang rel kereta. Sengaja ia memilih hidup di atas kereta karena kereta api akan membawanya jauh meninggalkan desa kelahirannya yang penuh kenangan buruk. Untung melompat dari satu gerbong ke gerbong lain, dan dari satu kereta ke kereta yang lain tanpa peduli arah mana tujuannya. Jika terasa lelah ia akan membaringkan tubuh dekilnya di atas lantai stasiun yang dingin.

Di sana pula Untung menemukan teman-teman seusianya yang berjuang menghidupi diri sendiri. Ada yang menjadi tukang semir, pedagong asongan, pengamen, pengumpul sendok plastik bekas makan para penumpang, bahkan *rendan* (berasal dari kata *kere dandan* yang berarti pelacur jalanan, red) yang sering menjual jasa di atas gerbong hanya dengan upah dua ribu perak!

"Kadang-kadang malah nggak dibayar," aku Eti, *rendan* yang biasa mangkal di sekitar Senisono. Meski sedikit kecewa Eti tak pernah protes karena ia juga menyadari konsumennya yang sesama penghuni jalanan tak punya uang cukup untuk membayarnya. Toh jika sedang mujur ada orang yang berbaik hati dengan memberinya tiga lembar lima ribuan. "Saya melakukannya sekedar untuk dapat makan," lanjutnya sambil menjentikkan abu rokok.

Profesi *rendan* sudah diakrabinya sejak lima tahun lalu. Semua berawal dari kondisi ekonomi keluarga yang marginal. Ayahnya seorang penarik becak sementara ibunya berjualan makanan kecil. Eti, yang saat itu mulai tumbuh remaja iseng-iseng bermain cinta sampai terjerumus. Hingga akhirnya ia merasa itulah jalan untuk mencari nafkah, untuk dapat bertahan hidup. Tapi lantaran di Semarang, kota kelahirannya, Eti lebh sering melayani orang-orang yang tak mau mengganti ongkos 'jasa' yang telah diberikannya, ia pun mencoba mengais rejeki di kota Budaya Yogya. Meski harus menumpang tidur kesana kemari --di rumah teman-teman seprofesinya-- Eti merasa lebih *sreg* 'mangkal' di Yogya. Selain banyak pelanggan ia mengaku bahwa Yogya lebih bersahabat. "Petugasnya juga tidak segalak di kota lain seperti Semarang," katanya tentang petugas *garukan* (Tibum, red).

Hal serupa juga diakui Untung. Meski untuk menyemir sepatu ia sering berkelana ke kota lain dengan menumpang kereta, tapi Untung memilih stasiun Tugu sebagai tempat tidurnya di malam hari. Di stasiun Tugu ia bisa merebahkan tubuhnya dengan tenang, tanpa merasa takut bakal kena operasi garukan. Sementara di stasiun kota lain, menurutnya, sering ada garukan di tengah malam disaat ia tidur.

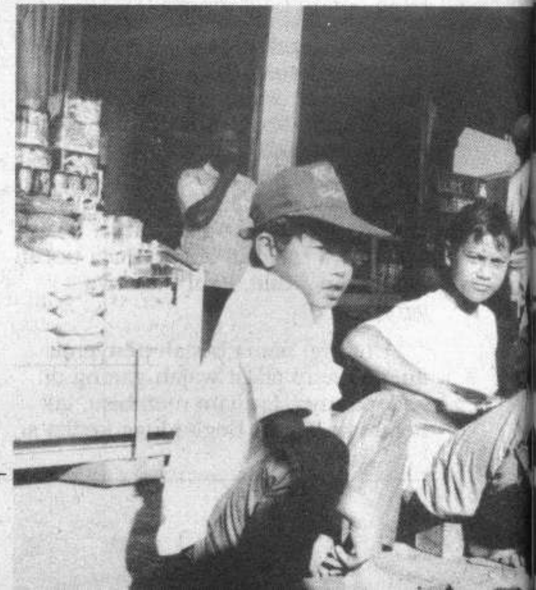
Memang, kehidupan jalanan tak bisa dilepaskan dari petugas berseragam yang bertampang garang. Dikeluarkannya peraturan pemerintah yang diberi label *Operasi Tibum, Operasi Esok Penuh Harapan,* dan entah operasi apa lagi telah mengharuskan polsus-polsus bersenjata siap menciduk anak-anak jalanan. Dan begitu tertangkap, tekyan-tekyan itu akan mendapat ganjaran push-up, pukulan, caci maki, dan berbagai kekerasan lainnya.

Tapi mereka butuh uang untuk makan. Tidak melulu makan *boyen* (makanan sisa, red). Mereka juga ingin bermain *ding-dong* seperti anak- anak lain seusianya. Dan semua itu hanya bisa dilakukannya dengan menyemir sepatu, mengamen, atau berjualan (asongan). Tapi kehadiran operasi-operasi bersih yang digelar pemerintah justru menjadikan kehidupan mereka yang marginal semakin terdesak. Mereka diusir ketika menyemir di atas gerbong kereta, atau diciduk saat tidur di tempat- tempat umum.

Akibatnya tekyan-tekyan sering bermain *kucing-kucingan* dengan petugas. Meski mereka tahu ada larangan tapi lantaran kebutuhan lain jauh lebih mendesak, akhirnya *zone* terlarang itu pun diterabasnya. "Kalau ada petugas, saya sering ngumpet di wc," kisah Untung tentang kiatnya menyelamatkan diri dari maut yang mengancamnya di atas gerbong kereta. Kadang-kadang ia juga harus lari ke sana kemari di atas gerbong untuk menghindari tangkapan petugas.

Tak hanya masalah garukan. Ancaman dan hirarki milik pemerintah menjadikan para tekyan semakin tersisih dari posisi semula yang sudah terjepit.

Kasus menggegerkan di bulan Desember 1991 lalu, misalnya. Anak-anak jalanan yang terhimpun dalam Keluarga GIRLI nyaris diusir dari kampung Juminahan. Kehadiran mereka di kampung tersebut dianggap menyalahi aturan yang intinya berbunyi bahwa penghuni wilayah Kodya Yogyakarta pada



jangka waktu 3 bulan berturut-turut harus mempunyai surat keterangan jalan, sedangkan apabila menghuni selama 6 bulan berturut-turut harus mempunyai surat keterangan penduduk.

Aturan birokratis tersebut jelas sangat memojokkan posisi anak-anak jalanan. Bagaimana mungkin seorang tekyan dapat memperoleh surat keterangan jalan jika mereka sendiri tak tahu dari mana berasal. Sementara untuk memperoleh selembar surat keterangan jalan tak sekedar bermodal mengetahui daerah asalnya, tapi masih diikuti serentetan aturan lain yang menyulitkan. Dan itu tak mungkin bisa dengan mudah diperoleh para tekyan. Atau kalaupun ada paling hanya segelintir tekyan saja.

Anehnya masalah birokratis yang rumit itu tak sekedar menimpa tekyan-tekyan yang masih berkeliaran di jalanan. Seorang Dodo yang mati tertusuk di Shopping Centre bulan Januari 1992 lalu pun menerima perlakuan yang sama. Jenasahnya terkatung-katung selama dua hari lantaran warga Krangkungan-Minomartani tak mengijinkan jenasah Dodo dimakamkan di sana. Alasannya; Dodo bukan warga Krangkungan! Tidak ada kartu identitas (KTP) yang menunjukkan bahwa Dodo adalah anggota masyarakat Krangkungan.

Tragis memang nasib Dodo; ketika masih orok ia dibuang ibunya, menginjak remaja terpaksa hidup di jalanan, lalu menjadi korban akibat salah tusuk, hingga matipun sempat terkatung-katung. Tak ada orang tua yang merasa kehilangan anaknya, Kepala Desa yang kehilangan warganya, atau negara kehilangan rakyatnya. Dodo tak ubahnya seekor anjing liar yang hidup dan matinya tak ada yang mengurusi, tapi justru diusir kesana kemari.



Lepas dari urusan birokratis yang menindas, anak jalanan masih menghadapai tekanan sosial dari masyarakat. Harus diakui bahwa masyarakat masih cenderung memberikan label negatif pada anak-anak jalanan. Mereka dianggap sebagai pencuri, anak liar, atau sumber keonaran. Akibatnya mereka menjadi 'fokus tuduhan' bagi setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kasus pengusiran di Juminahan itu misalnya, tak sekedar alasan administrasi. Dalam wawancaranya dengan sebuah surat kabar aparat setempat mengatakan bahwa anak-anak tersebut pernah 'berulah' sehingga mengganggu ketertiban kampung.

Entah ulah yang seperti apa. Kehidupan jalanan yang ganas memang telah menjadikan mereka tumbuh bersama alam. Tidak adanya orang tua yang memberikan bimbingan dan kasih sayang mengakibatkan mereka menjadi liar. Pengalaman hidup yang relatif berbeda dengan anak-anak kampung tersebut membuat mereka memiliki pola hidup yang berbeda pula. Mereka tumbuh sebagai jiwa yang merdeka; melangkah kemanapun kehendak kaki tanpa ada yang melarang atau melakukan apa saja yang diinginkan. Bermain *thithikan* (judi, red), menikmati surga dunia bersama rendan, atau sekedar nongkrong di trotoar Malioboro sambil menghisap rokok dan menegak minuman keras.

Kultur yang begitu kontras itulah yang mendorong masyarakat memandang anak-anak jalanan dengan sebelah mata sambil mencibirkan bibirnya. Lalu masyarakat pun membuat garis pemisah yang tebal; kelompok anak jalanan dengan label negatif dan masyarakat umum dengan label positif. Sungguh pemisahan yang begitu sepihak dan sangat tidak adil.

"Kalau ada orang kampung kecurian kami sering dituduh," kata Supri salah seorang Keluarga GIRLI yang menempati rumah kontrakan di Mlandangan. Kehadiran mereka di kampung Mlandangan menjadi pusat perhatian warga setempat. Bagaikan anjing hutan tersesat masuk kampung, setiap gerak-gerik mereka selalu diawasi dan dicurigai. Mereka juga mengalami kesulitan untuk berbaur dengan anak-anak kampung tersebut. Ketika mereka mencoba membaur, bermain bersama, maka seorang demi seorang anak kampung akan menyisih meninggalkan mereka. Atau membiarkan mereka bermain sendiri sementara anak-anak kampung itu memilih menjadi penonton.

TITHA



Seorang tekyan sedang terlelap
Di gerbong kereta atau di lantai dingin pun jadi

Citra buruk yang dibebankan anak jalanan benar-benar memisahkan mereka dari kehidupan normal bermasyarakat. Tak sekedar itu, masyarakat kampung sendiri sering memanfaatkan citra anak jalanan tersebut untuk kepentingannya pribadi. Masalah pencurian misalnya. Selama ini anak-anak jalanan itu yang selalu dituduh sebagai pelakunya setiap ada isu kemalingan di kampung. Entah benar entah sekedar isu untuk menjatuhkan para tekyan. Yang jelas di kampung tekyan-tekyan itu tak pernah melakukannya. Malah suatu ketika rumah mereka kebobolan dan sebuah radio tape raib tanpa ada yang berani mengadu pada petugas keamanan kampung atau RT. "Sudah kere masih kemalingan," ungkap Supri kesal.

Supri, Untung, Beti, dan tekyan-tekyan yang lain sebenarnya tak mengharap lebih. Mereka sekedar butuh pengakuan dari masyarakat. Mereka tak menginginkan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai *koreng*, tapi sebagai manusia yang wajar lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Sehingga mereka menjadi bagian dari anggota masyarakat yang utuh, bukan menjadi *anak matahari dan rembulan* yang tak tentu rimbanya.

Suluh Pratithasari dan Asip A. Hasani

FRANCO

Para diktator akan selalu dihantui rasa ketakutan pada masa tuanya. Tindakan balas dendam dari orang-orang yang telah ditindasnya selalu membayangi, bahkan dalam keheningan kamar peristirahatannya. Ingat, Mussolini mati dengan cara mengenaskan, digantung pada tiang lampu jalan raya, di tengah kota Millan. Sehingga wajar jika Sang Jenderal, tokoh penguasa dengan naluri politik yang rendah, dalam *El Otono del Patriarca*, novel karya Gabriela Garcia Marquez, selalu mengunci kamarnya dengan kunci nan tiga, gembok nan tiga, serta palang pintu nan tiga. Tapi tidak bagi Francisco Franco, yang mentasbihkan dirinya sebagai El Caudillo, Pemimpin bagi bangsa Spanyol. Dia tidak takut pada siapa-siapa. Baginya, kekuasaan hanya dipertanggung jawabkan kepada tuhan dan sejarah. Kekuasaan digenggamnya, bahkan sampai masa tuanya, Franco telah menyiapkan penggantinya, Juan Carlos, salah seorang anak didiknya yang kemudian hari dinobatkan sebagai raja Spanyol. Dan Franco pun mati dalam kedamaian, di atas ranjang empuk. Kematiannya diratapi oleh 400.000 pemujanya.

Franco dan Sang Jenderal punya kesamaan. Keduanya tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang politikus. Sang Jenderal adalah anak haram jadah dari seorang wanita kampungan penjual burung mainan. Tapi dia punya bakat komando yang luar biasa. Demikan pula Franco. Dia naik tahta sebagai jenderal yang menang perang, dalam perang saudara Spanyol yang melelahkan (1936-1939), yang menghilangkan 600.000 nyawa.

Tetapi Franco, tidak menerapkan kekuasaan dengan membabi buta. Dia tidak mau menjadi Mussolini yang mati ditiang gantungan. Untuk itu tanpa malu-malu telah mengadopsi teoritisi dari ideolog kaum Falangis, Jose Antonio Primo de Rivera, tentang Nasionalisme Reaksioner yang fasis.

Begitu naik dalam tampuk kekuasaan, Franco menata Spanyol dalam sistem yang totaliter penuh. Semua lembaga nasional dikerahkan untuk menjamin totalitas, persatuan, serta menjaga kelestariannya. Untuk itu dia membentuk partai tunggal Movimiento dan mengharamkan semua bentuk oposisi. Untuk meredam gejolak kaum buruh, maka dibuatlah wadah tunggal Sindicatos Verticales yang dipimpin oleh kaum Falangis. Seluruh lembaga kepentingan dikooptasi negara. Kaum separatis ditindas sekaligus dihancurkan akar budayanya. Dan tentara disebar kemana - mana untuk mempertontonkan keperkasaan negara.

Bentuk penindasan ini mendapat sanjungan dari penyokongnya, terutama kalangan borjuasi yang telah membiayai program-program Franco sejak perang saudara. Karena dengan penindasan berarti akar konflik yang diwarisi dari regim sebelumnya bisa diredam. Dan modernisasi pun dengan mulus digelindingkan.

Franco tahu betul, bahwa rakyat yang ditekan memiliki rasa kebencian pada rejimnya. Rasa kebencian itu perlu disalurkan dengan membuatkan musuh-musuh nyata maupun imajiner, atau meminjam ucapan Mussolini perlu dibikin ketegangan yang ideal (*strong ideal tension*).Maka tak ayal lagi kalau komunis selalu menjadi kambing hitam.

Namun kebungkaman politik dan kepatuhan artifisial itu ada batasnya. Kaum buruh yang tingkat hidupnya semakin turun tidak bisa lagi dibendung kegarangannya. Riak-riak aksi pun menggelombang dan meluas tidak hanya pada persoalan upah, tetapi semakin berdimensi politis. Sedangkan tokoh-tokoh oposisi bawah tanah maupun di pengasingan mulai menampakkan diri. Gerakan pro demokrasi ini berkumpul di Munich dalam sebuah konvensi tahun 1962.

Ketegangan ini jumbuh dengan semakin tuanya Franco. Barangkali karena usia senjanya, kelihaian untuk mengendalikan kekuasaan mulai menurun. Terjadilah friksi antara faksi pendukung Franco pada pusat kekuasaan. Opus Dei, kelompok teknokrat yang berasal dari kelompok religius awam Katholik yang menghendaki liberalisasi, bertubrukan dengan keinginan kaum birokrat Falangis mempertahankan gerakannya.

Dengan keyakinan yang mantap, Franco memberi konsesi partai politik untuk hidup. Kekejaman *opus mundo* dihentikan, tahanan politik dibebaskan, sensor diperlonggar, dan polemik suksesi pun dibiarkannya. Tapi ini hanyalah taktik untuk mendapatkan dukungan, sehingga kekuasaannya tidak goyah sampai tahun-tahun terakhir.

Akhirnya pada tahun 1969 Franco mendekritkan penunjukan pangeran Juan Carlos sebagai raja. Rupanya dia ingin berterima kasih terhadap kaum monarki yang mendukung perjuangannya pada masa perang saudara. Walaupun skandal keuangan yang melibatkan beberapa anggota keluarga dan pembantu-pembantu dekatnya terbongkar pada tahun-tahun terakhir, dia tetap selamat. Pada tanggal 20 Nopember tahun 1975 Franco dipanggil tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuataannya.

Beberapa tahun kemudian sejarah menghukumnya. Ajaran Franco dilarang. Orang Spanyol selalu menyebutnya dengan nada gemas dan geram.

Belakangan, di negara dunia ketiga banyak bermunculan Franco dengan sosok yang lain. Tapi tidak ada yang bisa menjamin keselamatan jiwanya.

Sunarto Cipto Harjono

I-One

Membedah daun Memanen Rupiah

Di negara Jepang pemanfaatan Algae sebagai bahan makanan yang bergizi tinggi telah dilakukan bebarapa tahun terakhir ini. Sebuah lembaga riset milik perusahaan farmasi telah berhasil memecah dinding sel Algae ini. Suatu hal yang sulit dilakukan sebelumnya karena kita ketahui sel Algae terbungkus oleh *lignin*. Dari hasil eksperimen ini diperoleh suatu zat yang dalam ilmu nutrisi disebut sebagai sel tunggal atau *sigle cell protein*.

PENGUASAAN konsep dasar ini sebenarnya telah diawali oleh penelitian di bidang anatomi tumbuhan oleh para ahli botani yang dimulai pada beberapa abad yang lalu. Gerakan *back to nature* di seluruh dunia telah membuat manusia kembali melirik potensi yang terkandung di berbagai agen sumber daya hayati di muka planet bumi ini. Konferensi tingkat dunia yang membahas keanekaragaman hayati di Rio de Jeneiro, Brazil, pada tahun 1992 telah menelurkan berbagai agenda yang dikenal sebagai Agenda-21, yang salah satu ketentuannya juga memuat persetujuan pelestarian keanekaragaman hayati . Dari pertemuan yang dihadiri wakil beberapa negara industri ini dikeluarkan pula kesepakatan mengenai pengelolaan kekayaan alam yang disinyalir banyak tersimpan di wilayah negara-negara dunia ketiga di belahan dunia bagian selatan.

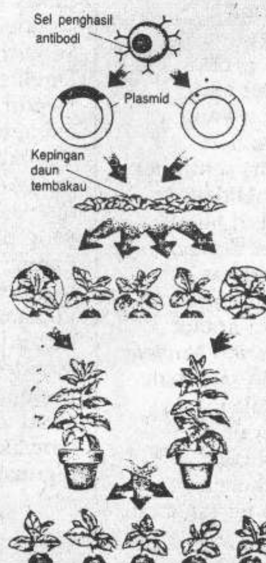
Begitu pentingnya pengelolaan kekayaan hayati alam di masa depan, maka Indonesia yang memiliki nomer dua terbesar dunia kekayaan genetik tumbuh-tumbuhannya yang tersimpan di ribuan hektar hutan tropisnya perlu mengantisipasi laju kepunahannya. Usaha yang perlu segera dilakukan adalah dengan membangun berbagai lembaga penelitian tumbuh-tumbuhan dan meningkatkan kemampuan tenaga penelitinya. Paling tidak ini menjawab perspektif *Vandana Shiva* dalam bukunya *Dari Bio-Imperialisme ke Bio-Demokrasi*, bahwa keragaman hayati akan selalu diraup negara industri karena kelemahan intelektual negara dunia ketiga. Barangkali hasil dari program itu adalah munculnya Prof. Dr. Issirep Sumardi sebagai guru besar madya di bidang Anatomi Tumbuhan di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Berbagai rangkaian penelitian bidang anatomi dan embriologi tumbuhan terapan telah mengantarkan prestasi itu. Gelar Profesornya dikukuhkan di depan Senat Guru Besar Universitas Gadjah Mada tanggal 20 April 1994 yang lalu, sekaligus menjadi guru besar wanita pertama di lingkungan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.

Penelitian di bidang anatomi tumbuhan, seperti ungkapnya mempunyai dimensi yang sangat luas. Hal ini berkaitan dengan berkembangpesatnya teknologi perbanyakan tanaman baru yang ber- araskan jaringan atau molekuler. Selama ini perbanyakan berbagai tanaman industri hanya menggunakan metode konvensional seperti biji dan stek. Di masa depan perencanaan proyek pembuatan sebuah areal hutan tanaman industri bermula dari isolasi sel-sel jaringan meristematik tanaman tetua (induk) di laboratorium tak lebih dari 4 x 4 meter persegi. Di laboratorium- laboratorium tersebut tanaman digandakan menjadi jutaan tanaman baru dalam waktu yang teramat pendek.

"Anatomi Tumbuhan adalah ilmu dasar yang mempelajari struktur dalam tubuh tumbuhan, dan mempunyai kaitan yang erat dengan ilmu dasar lain seperti fisiologi tumbuhan, taksonomi tumbuhan, morfologi, ekologi, genetika dan biokimia" kata Prof. Issirep dalam pidato pengukuhannya. Selain itu juga mempunyai peranan penting dalam ilmu-ilmu terapan. Berkenaan dengan itu Prof. Dr. E. Noerhadi, Kepala Laboratorium Bioteknologi Jurusan Biologi ITB menambahkan bahwa di daerah tropis seperti Indonesia, Bioteknologi tumbuhan seperti kultur jaringan tumbuhan mempunyai peranan yang sedikitnya ada dalam tiga bidang; yaitu pengadaan bibit atau perbanyakan tanaman secara klonal, perbaikan sifat dan membentuk varian baru yang unggul, serta tranformasi senyawa berkhasiat dalam tanaman obat.

Teknik *in vitro* sendiri sudah lama dipergunakan untuk penelitian

Transfer Gen Permanen



Gen-gen yang menghasilkan antibodi manusia diisolasi. Yang sebuah disebut rantai ringan, yang lain disebut rantai berat. Masing-masing dimasukkan ke dalam gelang-gelang DNA yang disebut plasmid. Plasmid diletakkan dalam bakteria.

Bakteria ditambahkan pada kepingan daun tembakau dan memindahkan plasmid pada sel tanaman. Sebagian sel memasukkan rantai berat atau rantai dingin ke dalam DNA mereka.

Tanaman di-klon dari kepingan daun. Sebagian memiliki rantai ringan atau rantai berat.

Tanaman yang memiliki gen ringan atau berat ditanam sampai dewasa dan disilangkan. Turunan mereka a'la yang memiliki kedua gen dan menggabungkannya sehingga mereka dapat menghasilkan antibodi yang berfungsi.

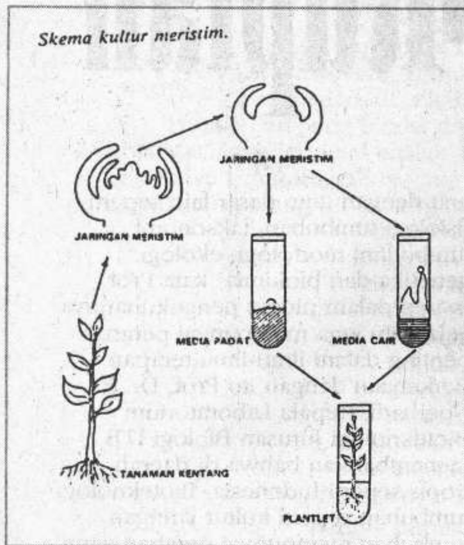




Pabrik Enzim

Suatu gen manusia untuk suatu protein yang diinginkan dapat dimasukkan untuk sementara waktu pada sel tanaman. Gen tersebut dibawa oleh sebuah molekul RNA yang membiakkan dan menempelkan dirinya serta gen baru itu pada sel-sel yang berdekatan. Segera saja seluruh tanaman menghasilkan protein yang diinginkan tersebut.

di bidang bioteknologi tumbuhan untuk memproduksi metabolit sekunder. Sedang kultur sel yang sekarang sangat populer ini mulai berkembang tahun 1950, setelah teknik biak akar dirasa kurang efisien, karena pertumbuhan akar secara *in vitro* sangat lambat. Negara Jepang telah memasarkan hasil teknologi kultur sel ini pertama kali



Skema kultur meristim.

pada tahun 1983 yang lalu, yaitu *alkaloid sikoin,* yang merupakan hasil isolasi *Lithosperma erythrorizon.*

Berbagai penelitian biologi molekuler di masa sekarang selalu menekankan struktur anatomi ini, terutama dalam pelacakan lokalisasi gen atau untuk melihat zat-zat kimia tertentu dalam jaringan dan sel suatu tanaman. Dengan dipaparkannya teknik *in vitro* baru pada tahun 1980 yaitu biak akar rambut atau *Hairy root culture* semakin cerahlah penelitian di bidang biologi molekuler. Teknik ini berpotensi besar dalam mempelajari proses sintesis metabolit sekunder atau untuk mengetahui gen-gen yang terlibat dalam pembentukan produk-produk (metabolit) sekunder itu. Dari hasil sebuah penelitian mengenai kerjasama bakteri tanah *Agrobacterium rhizogenes* dengan tanaman tingkat tinggi, terlihat bahwa biak akar rambut merupakan hasil transformasi genetika antara gen-gen dari DNA (*Deoxiribo Nucleic Acid*) bakteri dengan DNA tanaman yang kemudian menginduksi sehingga mampu diisolasi dan tumbuh secara *in vitro*. Selain tumbuh lebih cepat, produksi senyawa metabolit sekunder tanaman hasil biak akar rambut berkadar lebih tinggi daripada produksi senyawa metabolit sekunder tanaman induknya. Metabolit primer dan metabolit sekunder sendiri adalah merupakan senyawa kimia yang mempunyai khasiat seperti *alkaloid, terpenoid, asam amino non protein,* dan pigmen yang kesemuanya merupakan komoditi industri yang bernilai ekonomi.

Biologi molekuler juga menjanjikan masa depan teknologi yang sangat revolusioner melalui sebuah fenomena teknologi yang disebut sebagai tanaman obat. Dari teknik ini diharapkan suatu tanaman kentang misalnya, dapat membuat sekaligus memproduksi *albumin serum,* yaitu suatu protein darah manusia yang banyak dipakai dalam pembedahan atau tanaman tembakau yang mampu menghasilkan antibodi bagi manusia.

Fusi protoplasma adalah teknik *in vitro* perbanyakan tanaman yang terus berkembang. Teknik ini berusaha mendapatkan sebuah varietas tanaman baru dengan menggabungkan sifat dua tanaman. Dengan melarutkan dinding sel tanaman maka akan didapatkan protoplast yaitu segala isi sel tanpa dinding pembungkus. Apabila dari protoplast-protoplast tanaman yang berbeda ini ditempatkan pada *media agar* dan diberi pulsa listrik maka lima menit kemudian akan bergabung atau fusi. Itulah teknologi buah karya manusia yang spektakuler di masa depan.

Di bidang genetika tanaman penelitian untuk evaluasi genotip tanaman sampai sekarang yang sudah dilakukan adalah dengan metode *elektrophoresis.* Terutama ini untuk mengetahui keanekaragaman sumber genetik tanaman kehutanan. Seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal rehabilitasi lahan Departemen Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengontrolan ini menjadi hal yang penting karena untuk mengendalikan kualitas tanaman hutan. Prinsip Mendel dan populasi genetik tentu saja sangat banyak digunakan di sini.

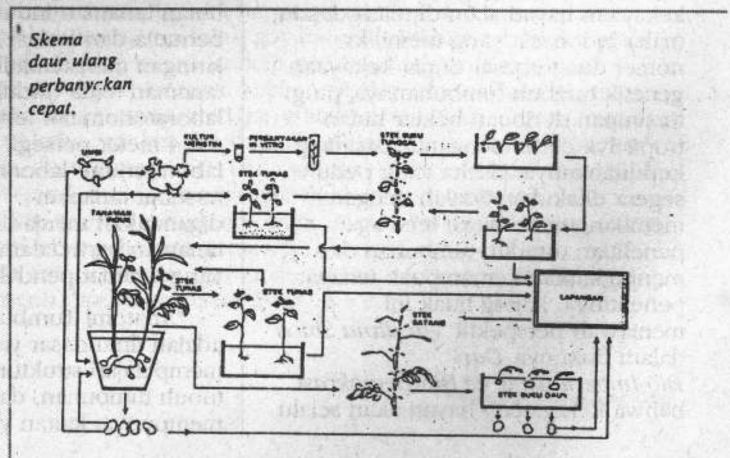
Penelitian bioteknologi tanaman sendiri kini terus dikembangkan di Indonesia. Seperti penelitian mengenai transfer kloroplast *Sorghum bicolor, L* ke dalam protoplast *Saccharum officinarum, L.*

Sementara pemasyarakatan teknik kultur jaringan sebagai salah satu teknologi baru di bidang budi daya tanaman tersebut kepada masyarakat awam kini masih sangat kurang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh keterbatasan penerapan teknik ini yang sampai sekarang hanya sampai pada "tanaman elit" seperti anggrek.

Penerapan dan teknologi ini diharapkan dapat membantu pemuliaan dalam mengembangkan varietas-varietas baru dengan waktu hanya singkat. Hal ini terutama pada jenis tanaman dimana metode konvensional terbentur halangan alamiah seperti inkompatibilitas atau embrio tanaman yang abortus.

Perlulah kiranya kita menelusuri pernik-pernik proses yang ada dalam teknik kultur jaringan ini. Secara garis besar diawali oleh proses sterilisasi potongan tanaman. Dari cawan petri yang berisi air steril dan setetes *betadine* di pindah kedalam botol yang berisi media tumbuh di dalam ruangan kulture. Bagi para profesional yang sudah terbiasa dengan pekerjaan semacam ini, maka akan mampu menanam sebanyak 200 per harinya. Tetapi ketika *BALAIRUNG* menemui seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk S-1 nya sempat bicara," Tetapi tidak semudah dengan apa yang tertulis di jurnal itu!". Itulah paling tidak wajah dunia penelitian IPTEK negara dunia ketiga, meskipun kaya akan sumber daya genetik monopoli selalu dipegang negara maju.

abid,i-one



Skema daur ulang perbanyakan cepat.

Doa seorang demonstran

Bu,
belikan aku
keberanian
di pasar loak
atau di supermarket
besok!
aku mau demonstrasi

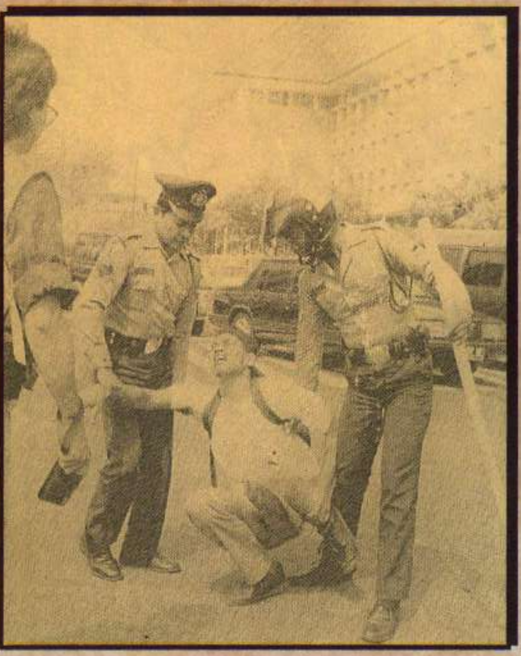
Alnan Malay



Kata-kata itukah yang terucap di batin seorang demonstran ketika menunggu fajar?

Andaikan ya, betapa berharganya sepotong keberanian.

Telah menggerakkan beratus-ratus kaki menyusuri lorong kota yang kusam. Sembari membawa coretan-coretan ketidakpuasan di atas kertas karton, kain-kain, selebaran-selebaran, dan suara-suara mereka yang langsung ingin didengar.





Tetapi kenapa selalu ada jarak?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu membentur dinding-dinding beku, lalu dijawab dengan bahasa besi. Di mana sepatu-sepatu lars, pentungan, bilah-bilah rotan begitu membabi buta, merajam sekujur tubuh. Semakin memperdalam luka dan borok.

Sementara mereka yang lolos dari kejaran, masih dihinggapi ketakutan.







"Ternyata sepotong keberanian belum cukup, Emak. Karena wajah tuhan yang ada di bumi lebih membuat kutakut. Bisa memangkas seluruh keberanianku," batin seorang demonstran itu lagi. Di ujung senja dan pekatnya gumpalan mendung di langit, terdengar sayup-sayup gumaman suara.

"Aku tak punya kerja."
"Penjualanku banyak berkurang."
"Wajah kita semakin lenyap."
"Aku asing dengan majalah serta koran yang ada di pinggir jalan. Seakan-akan aku tidak mengenalnya lagi. Karena yang bisa kupercayai telah hilang."
Setelah itu, semakin subur berita-berita selebaran, karena orang butuh kabar.

Tapi perjalanan masih jauh.
Makanya,
"Emak, tetaplah beri aku sepotong keberanian karena kami ingin tetap berjalan."

Naskah : Dwi Soufnita
Foto : Timbul, REUTER, Yuyun (PPC), Lexi (PPC)

Erotisme Karang Karimunjawa :

Konservasi atau Investasi ?

Fantasi apa yang muncul di benak kita saat bicara soal taman nasional laut. Akankah seindah apa yang kita biasa lihat lewat film Sea Quest di SCTV, ada dunia lain di bawah air sana, dimana kita kenal berbagai makhluk hidup dengan bentuk yang aneh-aneh, atau bahkan kita pun mampu bercakap dengan lumba-lumba dalam kedalaman air di bawah sana ....

LAYAR mulai diturunkan sebelum akhirnya selat yang memisahkan Pulau Menjangan Besar dan Karimunjawa terlampaui. Perjalanan berakhir di dermaga kecil, salah satu sudut dari Karimunjawa, Kepulauan yang membentang 107.220 Ha, dengan luas daratan 7.120 Ha.

Beberapa nelayan tampak sedang mempersiapkan diri. Mereka terlihat tidak begitu sibuk, karena ini belum lagi musim badai. Angin dari "lautan besar" yang membawa ikan-ikan Tongkol ke perairan Karimunjawa hanya datang pada bulan September sampai Maret. Bulan-bulan dengan ombak tenang seperti ini hanya Teri dan beberapa ikan Todak yang tersangkut di jala mereka.

"Pelaut dan nelayan dari luar banyak yang cari ikan di sini, 'mbak. Mereka pakai pukat, kadang-kadang di bom segala. Tongkol kami sekarang tidak banyak lagi, tidak seperti dulu..." keluh nelayan setempat yang mengaku hanya mendapatkan tiga keranjang teri dan beberapa ekor cumi-cumi. Bergegas keranjangnya kemudian diangkat ke dekat TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang pada musim saat itu memang tak terpakai. Teri-teri itu akan ditimbang untuk langsung dibeli oleh pedagang dan biasanya esok paginya dijemur di sepanjang tepi jalan kampung.

Beberapa rumah dibangun semi permanen. Dengan cara menguruk pantai, sebagian penduduk membuat rumah panggung beratapkan daun rumbia dan berdinding papan. Yang agak mengejutkan, hampir di semua halaman rumah yang berhimpitan dengan jalan raya tersebut bertumpukan batu-batu karang. Karang batu yang teronggok tak terperhatikan itu sebenarnya adalah *substrat* yang menjadi media tumbuhnya karang, dimana hanya di atas media batu itulah karang dapat tumbuh dan terus tumbuh selama puluhan bahkan ratusan tahun untuk membentuk sebuah bangun terumbu karang.

Menurut salah seorang penduduk, pengambilan ini dilakukan karena memang tidak ada material lain yang bisa digunakan. "Mau apa lagi, ini tanah mereka. Dan semua yang diambil dari laut adalah karunia Tuhan yang menjadi punya mereka." kata Ipong, petugas PHPA setempat. Namun sebenarnya tanpa disadari pengambilan itu telah membawa konsekuensi yang hebat bagi eksistensi terumbu karang. Eksploitasi karang oleh manusia untuk tujuan komersial atau pengambilan karang batu sebagai bahan membuat rumah adalah jenis perusakan langsung dan paling aktif. Perusakan jenis ini tergolong berat dan sangat total, karena untuk kembali ke kondisi semula membutuhkan waktu yang teramat lama. Eksploitasi karang batu yang merupakan *substrat* karang akan mengangkat seluruh tempat tumbuh karang tersebut dan hanya menyisakan pasir dan lumpur belaka. Akibat selanjutnya dapat ditebak, karang tidak lagi dapat tumbuh disana.

Biasanya pada musim ombak tenang, banyak nelayan setempat yang melakukan pengambilan karang dengan cara menyelam secara tradisional. Karang-karang yang rata-rata berbentuk indah tersebut sangat laku dijual di Jepara. "Kami menyelam kalau ada pesanan karang. Tapi sekarang jarang kami lakukan karena harganya sudah murah." kata Abdul Hakim, nelayan

yang mengaku telah mampu membeli tabung oksigen dan sepatu selam untuk keperluan mengambil karang dan udang hias.

Konservasi Terumbu Karang yang dilematis

Selain hutan pantai dan *mangrove*, ada komunitas yang unik di kepulauan yang terbagi dalam 27 pulau besar dan kecil ini, yakni terumbu karang. Dalam terumbu karang ini pula kehidupan baik karang maupun berbagai jenis ikan karang langka hidup. Di samping itu berperan penting dalam melindungi pesisir pantai dari erosi dan abrasi akibat terjangan ombak. Pantai bagian selatan Pulau Jawa adalah salah satu contoh telah memburuknya kondisi ekosistem terumbu karang, sehingga ombak yang datang dengan cepat tak tertahan oleh apapun dan erosi yang terjadi makin parah dari tahun ke tahun.

Upaya konservasi terhadap ekosistem ini bukannya tak dilakukan, namun beberapa kendala yang cukup dilematis muncul lantaran ada tarik ulur antara usaha konservasi dan kebutuhan mengisi perut dari penduduk yang menggantungkan diri dari ekosistem ini. Pada akhirnya kerusakan ekosistem terumbu karang ini tak terhindarkan.

Kerusakan lantaran aktifitas manusia yang dengan tidak sengaja-mengimbas pada keseimbangan ekosistem karang ini menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Ketika beberapa nelayan memburu ikan jenis tertentu di daerah karang, itulah saat yang paling potensial untuk merusakkannya karena tanpa sengaja mata kail, jala dan dayung yang dipergunakan akan menyangkut pada ujung-ujung karang dan mematahkannya atau bahkan membedol sampai hulu terumbu karang.

"Ikan yang ada di sekitar karang biasanya jenis Ekor Kuning dan Ikan Lemak. Keduanya mahal harganya," tutur seorang nelayan yang mengaku tidak lagi mencari kedua jenis ikan ini. "Kata PHPA, itu termasuk ikan langka, lagipula kami tidak mau masuk ke daerah yang dilindungi," akunya polos.

Aktivitas beberapa nelayan agak modern yang mencuri-curi menggunakan bahan kimia (apotas) atau bahan peledak untuk melacak ikan-ikan yang menyelip di sela-sela karang mengakibatkan kerusakan serupa. Menurut penduduk setempat, nelayan itu datang dari Jakarta, Pekalongan, atau daerah-daerah lain di luar Karimunjawa.


DOK. BAL

Kerusakan terumbu karang yang dilematis
Dinodai zat kimia untuk mengeksploitasi hasil laut demi perut

"Ketika bahan peledak dijatuhkan ke air, suara ledakannya memang agak teredam, tapi muncratan air yang bisa sampai setinggi 10 meter dan getarannya yang mencapai radius satu kilometer tidak hanya mematikan hewan penghuni karang tapi juga memusnahkan biota terumbu karang secara total," demikian Mas Ipong. Menurut salah satu dari empat petugas PHPA yang aktif berpatroli laut sendirian ini, pernah ada kapal yang tertangkap tangan di perairan Karimun, dan di dalamnya ditemukan alat-alat penangkap ikan dan bahan peledak. "Tapi mereka hanya dikenai hukuman beberapa bulan kurungan dan denda yang tak sebanding dengan kerusakan hebat yang telah dilakukannya," sesal mas Ipong.

Akibat ledakan itu bisa dideskripsikan sebagai pembantaian yang brutal terhadap makhluk-makhluk laut. Ikan-ikan hias langka dan ikan konsumsi yang agak besar mati atau pingsan seketika, bangkai ikan-ikan kecil terapung menghampari permukaan laut, rumpon-rumpon lumat, dan terumbu karang hancur berantakan. Memang beberapa diantaranya masih memiliki bentuk utuh tetapi telah mati dan berwarna kecoklatan karena zat kimia beracun. Selain karena apotas, bahan kimia beracun bisa berasal dari polusi akibat limbah yang mengalir ke laut (terutama untuk perairan yang dekat dengan aktifitas manusia).

Menurut hasil pengamatan Tim Eksplorasi Karimunjawa I yang diselenggarakan oleh Fakultas Biologi dan Kehutanan UGM (1992), Walaupun dari 27 pulau hanya 4 yang dihuni dengan penduduk sekitar 8874 jiwa, eksploitasi karang yang dilakukan oleh penduduk telah mencapai taraf memprihatinkan. Pengambilan karang baik untuk keperluan komersial maupun untuk pencarian material bangunan rupanya telah menjadi pekerjaan sehari-hari. Tapi pada Eksplorasi yang ke II pengambilan karang secara membabi buta tersebut telah dapat dihentikan berkat kerja keras petugas PHPA yang rajin memberi penyuluhan dan berpatroli secara intensif. Bahkan menurut LIPI, kondisi terumbu karang di kepulauan Karimun secara umum masih bagus apabila dibandingkan dengan perairan lain terutama Kepaulauan Seribu yang digambarkan telah mencapai kerusakan tingkat kronis. Tak kurang dari Presiden Soeharto sendiri memerintahkan untuk menciptakan rumpon-rumpon buatan (karena itulah becak-becak ditenggelamkan ke laut) dan memasang ban-ban bekas sebagai pengganti media tumbuh karang yang telah hancur.

Sebenarnya kerusakan terumbu karang secara alamiah bukan tak terjadi. Misalnya karena pergantian musim yang menyebabkan arus berputar deras, perubahan kualitas air (pH, salinitas, temperatur, kejenuhan) maupun karena kompetisi antara penghuni terumbu karang sendiri (ada beberapa jenis ikan tertentu yang memakan karang). Tapi kerusakan jenis ini masih seimbang apabila dibandingkan dengan proses pertumbuhan karang dan rehabilitasi alamiahnya. Jadi

tetap saja kerusakan akibat aktivitas manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya menjadi penghalang utama keberhasilan konservasi ini.

Taman Nasional Laut, Konservasi atau Investasi?

Dua tahun yang lalu, salah seorang anggota tim Eksplorasi Karimunjawa menulis di harian *Kompas*: "Kepulauan Karimunjawa meskipun sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam sejak 9 April 1986 dan ditingkatkan menjadi Taman Nasional Laut (TNL), namun penanganannya belum terlihat nyata dan terkesan tidak serius. Dengan kata lain Karimunjawa pengelolaannya masih tetap 'krimun' (samar-samar -red)".

Dalam kondisinya yang sekarang, kesan Karimunjawa sebagai kawasan Taman Nasional laut amat lemah. Menurut mas Ipong, memang terjadi

TERUMBU KARANG
Ekosistem yang Istimewa

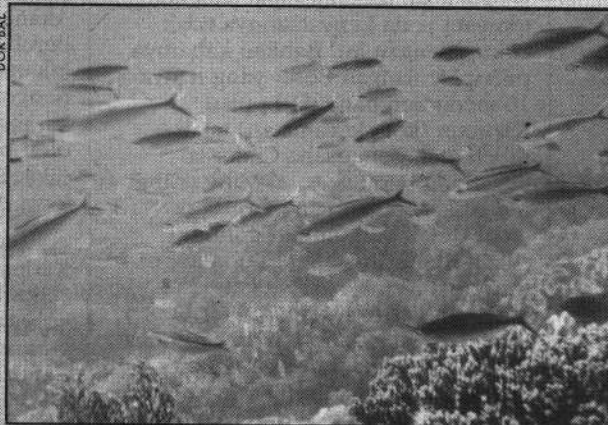
SEBENARNYA sumber daya terumbu karang di Indonesia tergolong melimpah ruah, terhitung lebih dari 3000 jenis dan biota terumbu karang memenuhi perairan negeri ini. Daerah sebaran terumbu karang terbesar berada di wilayah bagian timur, membentangi perairan Sulawesi, Maluku hingga Irian Jaya. Namun demikian hampir di sepanjang garis pantai pulau besar maupun kecil di Indonesia dapat ditemui biota tersebut, termasuk di kepulauan Karimunjawa.

Terumbu karang sebagai ekosistem yang khas dan spesifik amatlah menarik perhatian. Selain memiliki produktivitas biologik yang tinggi, terumbu karang juga mempunyai keragaman jenis serta nilai estetika yang hampir tiada taranya. Bagi ikan-ikan dan jenis invertebrata lainnya, terumbu karang menjadi tempat hidup yang nyaman dan perlindungan yang kokoh. Lebih dari itu, disanalah tempat ikan-ikan jenis tertentu melakukan percumbuan sepanjang musim dan berkembang biak dengan aman.

Pertumbuhan Terumbu Karang

Dalam pertumbuhannya, terumbu karang tidak dapat dipisahkan dengan adanya simbiose dengan Zooxanthella. Zooxanthella adalah suatu algae uniseluler yang hidup dalam jaringan hewan karang dan invertebrata lainnya . Zooxanthella merupakan anggota Dinophyceal dan sering dikatakan sebagai plankton yang terjebak. Simbiotik mutualisme antara hewan karang dengan zooxanthella sangat menentukan metabolisme hewan karang, termasuk juga kemampuannya dalam membentuk kerangka karang.

Pertumbuhan karang merupakan penambahan massa berarti juga bertambahnya massa kapur dan karang dan bertambahnya jumlah koloni hewan karang. Proses penambahan massa kapur atau Kalsifikasi sangat kompleks dan dinamis. Di bawah kontrol temperatur dan cahaya, simbiose ini menghasilkan endapan kalsium (CaCo3) yang masif. Hasil ini dalam jangka waktu berpuluh-puluh tahun ditimbun dan hasilnya dapat kita lihat sebagai karang atau gugusan karang di perairan yang dangkal. Secara umum bentuk dasar karang adalah sama, tapi adanya perbedaan pengendapan CaCo3 dan adanya faktor genetik tiap jenis akan memberikan bentuk-bentuk yang spesifik pada masing-masing jenis karang. Pada karang keras laju pertumbuhan karang bercabang jauh lebih cepat dibanding karang masif (karang bercabang adalah karang yang bentuknya bercabang-cabang seperti tumbuhan -misalnya Accropora-, sedang karang masif bentuknya cuma seperti batu tidak bercabang dan biasanya membulat -misalnya Favites).


DOK BAL

Terumbu karang dan ikan laut
Tempat percumbuan sepanjang musim

Kecepatan tumbuh karang bervariasi tergantung dari jenisnya, tempat tumbuh dan lain-lain. Dari penelitian yang ada pertumbuhan karang sangat bervariasi. Jenis Favia Sp pertumbuhannya 4,6 mm/tahun, sedangkan jenis Qulophylla agpera mencapai 20 mm/tahun. Secara umum pertumbuhan karang rata-rata pertahunnya adalah 9 mm.

Dalam suatu ekosistem terumbu karang akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara karang-karang yang ada dengan biota terumbu karang, misalnya ikan, crustacea, dan lain-lain, dimana dalam daur hidupnya akan saling menguntungkan, saling memberikan energi, *pakan* maupun perlindungan serta perkembangbiakan dan pertumbuhan. Ratusan jenis ikan dan crustacea akan dengan mudah ditemui pada terumbu karang. Karena itu dalam ekosistem terumbu karang akan terjadi perdauran hara yang sangat efisien dan pengaliran energi yang lancar diantara komponen komponen sistemnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan betapa pentingnya eksistensi terumbu karang bagi kelangsungan hidup biota laut dan selanjutnya bagi manusia. Perusakan sekecil apapun akan sangat berharga karena membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan ke kondisi semula.

Agung Budiharjo & Danar Wulandari
Diambil dari berbagai sumber

tabrakan kepentingan antara pihak yang berkompeten dengan pariwisata dengan pihak yang berdiri di belakang aturan PHPA. Memang konsekuensi sebuah proyek konservasi adalah menggunungnya anggaran biaya, pada sisi lain ada godaan untuk mengembangkan sebagai obyek wisata lantaran proyek ini lebih bisa diharapkan menciptakan penumpukan kapital. Yang terjadi pada Karimunjawa saat ini lebih pada yang kedua. Terlihat dari giatnya usaha penyediaan fasilitas wisata dari villa sampai lapangan terbang.

Wisatawan yang datang ke daerah itu akan dipandu menggunakan kapal kaca dan diantar berkeliling ke beberapa pulau kecil yang tersebar di sekitar Karimunjawa. Terutama dalam wilayah yang disediakan khusus untuk wisata secara intensif. Di wilayah ini pula diharapkan dikembangkan prasarana wisata. Daerah ini di sebut Zona Pemanfaatan, meliputi pulau Karimunjawa, Kemujan Menjangan Besar, Menjangan Kecil, Kumbang, Parang, Kembar Karang Besi, Karang Katang, Krakal Besar, Krakal Kecil dan Karang Kapal.

Tetapi ada kawasan yang terlarang untuk di jamah karena termasuk dalam Zona Inti (P. Burung dan P Geleang). Di tempat seluas 25 ha dengan perairan 1.299 ha inilah burung Garuda dan ekosistem terumbu karang dilindungi. Sulitnya, justru dalam wilayah Zona Inti itulah pesona keindahan laut beserta karangnya bersemayam. Karena wisata budaya, wisata kota dan legenda Dewa Daru (semacam pohon/kayu langka yang menurut kabar menyimpan kekuatan mistis) kurang menawarkan daya pesona, apalagi yang dicari oleh seorang pelancong di kawasan perairan seindah Karimun kalau bukan *diving* (menyelam) ? Maka kesepakatan pembagian Zona yang di tetapkan oleh Dirjen PHPA NO. 53/Kpts/DJ-VI/1990 tersebut terkesan hanya sebagai peraturan di atas kertas belaka. Petugas PHPA-pun sering pura-pura tidak tahu bila ada wisatawan yang menyelam di kawasan Zona Inti. "Paling kami cuma pesan tolong jangan sampai nginjak-injak karang. Apalagi merusaknya." kata Mas Pong.



DOK. BAL

Pulau Burung dan burung Garuda
Pembagian zona cuma di atas kertas

Selain Zona Inti juga terdapat Zona Rimba yang merupakan pelindung bagi Zona Inti tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi, meliputi pulau-pulau Krakal Besar, Krakal Kecil, Cemara Besar, Cemara Kecil, serta hutan tropis dataran rendah di P. Karimunjawa dan Kemujan. Sedang wilayah tempat penduduk memanfaatkan sumber daya alam (eksploitasi secara tradisional) dan membangun tempat bermukim hanya tersisa P. Karimunjawa, P. Kemujan, dan P. Parang yang disebut sebagai Zona Penyangga.

Jadi walaupun untuk tujuan wisata telah diberi tempat tersendiri ternyata pada kenyataannya tidak cukup dengan itu. Bahkan kabarnya pulau Menjangan Besar yang hanya 10 menit berenang dari pulau Karimun (kota kecamatan) telah dibeli oleh pengusaha Cina asal Semarang bernama Chu Ming. Yang menarik di pulau yang termasuk datar (tidak bergunung- gunung) selain Kemujan (salah satu faktor mengapa Kemujan dijadikan landasan Pesawat terbang) tersebut dibangun villa dan terdapat Karamba untuk memelihara berbagai ikan langka termasuk Hiu. Demikian juga daerah Legon Lele di P. Karimunjawa yang tergolong subur dan beberapa pulau kecil di kawasan itu kabarnya telah banyak yang dibeli oleh pengusaha Jakarta.

Apabila kabar tersebut benar, maka langkah Pemda Jateng untuk memanfaatkan Karimunjawa sebagai daerah tujuan wisata telah mendapat respon positif dari para pemilik modal. Namun rupanya respon tersebut datang terlalu dini, apalagi bila dibandingkan dengan langkah Pemda Jateng yang makin lambat dan tersendat-sendat. Tidak hanya obyek wisata bawah air terutama karangnya yang terancam rusak, tapi juga sarana seperti 2 kapal kaca yang telah hancur, kini teronggok tak berguna.

Lagi pula pembangunan prasarana wisata seperti pelebaran jalan Karimunjawa menuju arah bandara di P. Kemujan (kedua pulau ini dipisahkan oleh selat kecil tapi telah dibangun jembatan sederhana) hingga kini masih bermasalah karena tidak adanya ganti rugi bagi penduduk yang tanahnya tergusur. Akankah Karimunjawa segera berubah seperti Kepulauan Seribu Jakarta yang terinfeksi polusi, pengrusakan terumbu dan biota karang, serta pengaplingan wilayah oleh pemilikan pribadi yang dilakukan segelintir orang-orang kaya di Jakarta ?



DOK. BAL

Sengketa pelebaran jalan di desa Alang-alang
Melebarkan jalan masuk buat investor

Apa yang dialami oleh Karimunjawa memang tidak sendirian.Misalnya apa yang terjadi di beberapa sudut Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Beberapa pohon yang dilestarikan cukup sebagai saksi sejarah guratan-guratan pisau dari wisatawan yang ingin meninggalkan kenangan. Hampir setiap proyek konservasi ketika bersinggungan dengan kepentingan wisata selalu kehilangan "roh" nya. Ataukah memang pada akhirnya upaya konservasi telah menjadi sarana lain untuk melakukan eksploitasi bentuk lain pada alam? Atau memang butuh sebuah restrospeksi terhadap efektifitas aturan hukum yang telah tidak sedikit dibuat untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup ini.

Indriaswati D.S.
Danarti, Dewi RW

Pendulum Sang Dukun: *Alternatif Terapi Masa Depan*

Seorang pasien sudah hampir putus harapan ketika dokter yang memeriksa anaknya mengatakan bahwa benjolan di kepala anaknya positif tumor. Para dokter sudah angkat tangan karena tipisnya harapan untuk menolong. Namun oleh tetangganya ia disarankan untuk menemui paranormal. Disana, anaknya lalu ditolong dengan terapi obat-obatan. Hasilnya, sang anak hingga sekarang telah hampir lulus sarjana dan benjolan di kepalanya telah dinyatakan tidak ada setelah dirontgen

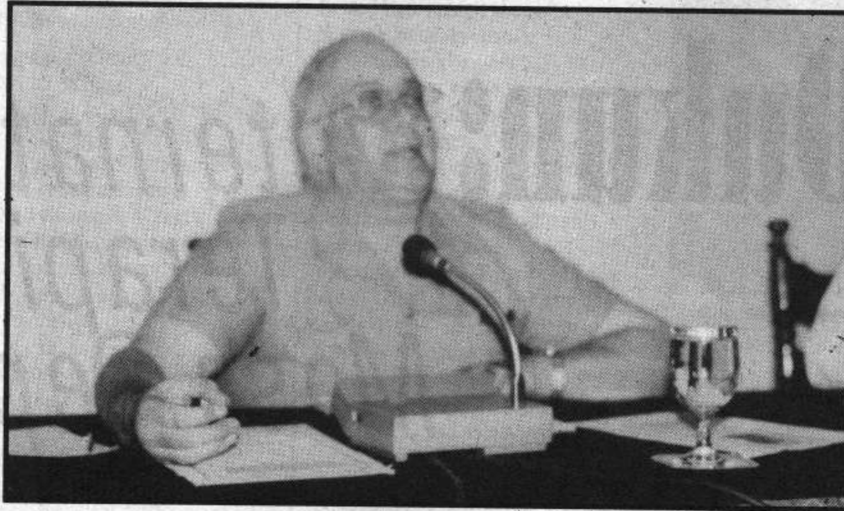
ADA lagi cerita seorang penderita jantung koroner yang hendak melakukan operasi. Ketika datang berkonsultasi dengan seorang paranormal, ia diminta menunda operasinya karena sang paranormal mengaku menerima gelombang tidak enak tentang resiko operasinya. Si pasien ternyata nekad operasi. Akhirnya, di tengah berlangsungnya operasi itu, timbul reaksi badan yang menolak dan ajalpun menjemput ketika operasi belum selesai.

Beberapa cerita pengobatan seperti itu tak jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang spektakuler, mengherankan, dan hampir-hampir bisa dianggap mukjizat. Mungkin karena terpikat mendengar keberhasilan pengobatan altermartif ini, banyak yang lalu beralih ke pengobatan semacam ini.

Menjamurnya orang-orang yang berobat ke "dokter-dokter non medis" bukanlah fenomena baru. Di negara kita misalnya, orang sudah terbiasa dengan pengobatan jamu-jamuan tradisional. Di negara Cina ada istilah *sin she* untuk para ahli pengobatan yang mengobati penyakit de-ngan ekstrak herbal kering atau bahan-bahan alam lainnya. Pengobatan alternatif ini sudah melekat dengan kehidupan masyarakat sejak dulu dan seiring dengan perkem- bangan waktu, pengobatan ini makin diilmiahkan dan makin beragam jenis serta teknik pengobatannya.

Pengobatan alternatif cenderung disukai karena keuntungannya yang besar serta resikonya yang relatif kecil. Selain karena biayanya yang jauh lebih murah juga tak kalah manjurnya dengan pengobatan oleh dokter ahli. Sering kali suatu penyakit yang butuh berbulan-bulan untuk dideteksi oleh dokter lewat bantuan pemeriksaan laboratorium yang rinci ternyata dapat ditentukan dengan mudah oleh paranormal dengan "pendulum"nya. Banyak pula penyakit yang sudah tidak mungkin diobati lagi dengan pengobatan medis biasa dapat disembuhkan oleh para pengobat alternatif ini.

Terhadap munculnya berbagai pengobatan alternatif yang sedang marak saat ini, reaksi yang lebih se-ring muncul, terutama dari kalangan medis, adalah menolak. Reaksi penolakan ini biasanya berdasarkan pada pertimbangan bahwa apa yang dilakukan oleh para dukun, tabib, paranormal, atau *sin she* tersebut seringkali tidak rasional, subyektif, dan spekulatif. Para dokter yang dihubungi BALAIRUNG menyatakan bahwa bagaimanapun kemampuan pengobatan medis yang ada saat ini memang ada batasnya, namun pengobatan alternatif mestinya menjadi alternatif kedua setelah pengobatan medis yang telah teruji sebelumnya.



DOK. BERNAS

Mungkin disitulah menariknya. Justru karena sifatnya yang terkadang terkesan spekulatif ini, pengobatan alternatif diminati oleh para penderita penyakit parah yang sudah ditolak oleh dokter di mana-mana. Setiap kali praktek, ada sekitar seratus pasien yang antri minta diobati hingga ruang praktek penuh sesak.

Menanggapi istilah spekulatif dan non-empiris pada model pengobatan ini, banyak pengobat alternatif yang tak setuju. Misalnya saja Ir. RM. Gembong Danudiningrat, seorang paranormal ahli pengobatan kondang yang berdomisili di Yogya, menganggap pekerjaan paranormal (yang diistilahkannya sebagai pengobatan para-psikologi), justru sangat empiris, obyektif, dan ilmiah. Begitu pula Romo Handoyo Lukman, yang ditemui BALAIRUNG setelah memberikan ceramah dalam sebuah seminar pengobatan alternatif yang padat dipenuhi pengunjung, mengatakan bahwa pengobatan alternatif justru sangat ilmiah serta mengikuti kaidah- kaidah hukum alam. Hanya saja, para pakar pengobatan alternatif ini biasanya punya kemampuan lebih untuk menangkap gejala paranormal yang sulit dideteksi oleh orang-orang awam. Karena sulit dimengerti inilah menurut para pakar yang dihubungi BALAIRUNG, masyarakat menganggap pengobatan ini sebagai sesuatu yang mistis dan tidak empiris. Padahal, menurut mereka hal ini sesungguhnya bisa dijelaskan.

Romo Handoyo Lukman, MSc:

"Pengobatan alternatif justru sangat ilmiah serta mengikuti kaidah-kaidah hukum alam."

Ada bermacam-macam metode pengobatan alternatif ini yang masing- masing punya istilah sendiri dan cara yang berbeda dalam mengobati. Romo Lukman, yang membuka praktek pengobatan di Purworejo menyebut model pengobatannya sebagai radiasthesi.

Ir. RM. Gembong Danuningrat:

"Kedokteran tak perlu merasa terancam oleh pengobatan alternatif. Kami ingin menjadi partner.

Radiasthesi merupakan suatu seni merasakan adanya gelombang elektrostatis dari benda-benda seperti logam, mineral, manusia, dan lain-lain, dengan memakai suatu pendulum. Dalam teknik pengobatannya seorang pengobat radiasthesi akan berkonsentrasi memancarkan energi magnetis dan menerima kembali sinyal magnetis dari pasien yang dihadapi. Pancaran gelombang balik ini akan dicatat untuk senjutnya disusunlah diagnosa pe-nyakit untuk menentukan terapinya. Biasanya jamu-jamuan atau obat-obatan lain.

Sedikit berbeda dengan Romo Lukman, bapak Gembong memakai metode pengobatan yang disebutnya EEM (*Electro Enchepalo Magnetic)*. Kekuatan ini merupakan kekuatan yang datang dari gelombang otak sang paranormal yang mengobati. Melalui kekuatan gelombang ini, seorang penderita kelainan penyakit akan mudah dideteksi dengan waktu yang relatif singkat. Kepada BALAIRUNG, seorang pasien menyatakan kekaguman metode ini ketika ia didiagnosa menderita alergi setelah hanya lima menit pertemuan dengan bapak Gembong. Padahal ia harus datang ke dokter ahli berkali-kali hingga akhirnya didiagnosa menderita alergi. Biasanya setelah didiagnosa penyakitnya, pak Gembong yang memakai terapi EEM ini memakai ramu-ramuan yang dibuatnya sendiri atau bahkan jika memang memungkinkan, pasiennya diserahkan pada dokter biasa.

Ada pula model pengobatan alternatif lain yang menggunakan air seni. Sebenarnya terapi ini tergolong kuno dan telah berkembang di India dan Cina. Pengobatannya relatif mudah dan tidak terlalu membutuhkan bantuan orang lain. Para penderita penyakit disuruh meminum air seni secara teratur. Teknik detilnya, misalkan yang disarankan oleh Prof. HM. Hembing Wijaya adalah mengambil gelas bersih untuk menampung air seni di waktu pagi. Yang diambil adalah bagian tengah, bagian awal dan bagian akhir dibuang. Volume awal sekitar 30 cc, baru kemudian boleh pelan-pelan ditingkatkan menjadi 50 cc hingga 250 cc. Namun memang tidak semua orang bisa dianjurkan meminum air seninya, terutama bagi penderita infeksi saluran kencing atau penderita penyakit kelamin.


DOK. BERNAS

Terapi air seni ini ternyata cukup manjur dan sebenarnya ilmiah pula. Menurut Hembing, air seni berasal dari darah yang disaring oleh ginjal. Karena itu, air seni mengandung zat-zat antibodi yang di dalam tubuh manusia memberikan tonik untuk sel-sel dalam jaringan tubuh, berfungsi analgesik dan menetralkan racun-racun.

Lalu penyakit apa saja yang bisa diobati dengan terapi model diatas? Masing-masing terapi punya keberhasilan tersendiri. Misalnya terapi EEM sanggup melakukan terapi jarak jauh tanpa kontak langsung dengan pasiennya (misalnya melalui foto pasien). Terapi EEM pun efektif untuk penderita penyakit psikis semacam stress, depresi, hingga *skizofrenia* (gila). Terapi air seni ternyata efektif untuk penyakit seperti kanker, radang lambung, bronkhitis, asma, katarak, jerawat, hepatitis, insomania, epilepsi, sakit kepala, diabetes, ginjal hingga mengurangi uban dan melancarkan peredaran darah.

Kemudian bagaimana halnya de-ngan pengobatan medis saat ini? Apakah akan tersaingi oleh pengobatan alternatif? Bagi para pakar pengobat alternatif, mereka tidak beranggapan akan menjadi saingan para dokter. Bahkan beberapa dari mereka bekerjasama dengan para dokter dan ada dokter yang terlibat dengan mencampurkan pengobatan medis dan pengobatan radiasthesi. Kemajuan ilmu kedokteran saat ini menurut para pakar pengobatan alternatif sudah sangat canggih. Masing-masing pengobatan, baik medis maupun non medis, mempunyai kemampuan, fasilitas-fasilitas dan cara tersendiri.

Berbicara soal pengobatan alternatif, mungkin kita harus belajar dari negara Jerman yang mau mengakui pengobatan ini sebagai pengobatan yang efektif dan resmi. Yang penting adalah hasil dan manfaat yang bisa diperoleh dari pengobatan alternatif ini. Soal penjelasan ilmiahnya adalah soal kedua yang bisa dijelaskan kemudian. Kebijaksanaan di Jerman tersebut, telah memberikan sumbangan yang banyak sekali dan bermanfaat bagi dunia medis maupun dunia pengobatan tradisional. Bagaimana dengan Indonesia dengan seribu paranormalnya?

Anthony Dio Martin
Bimo Sekundatmo, Asip, dan Wiwi Andralia (Mahasiswi FKU-Atma Jaya Jakarta)

Perburuan dan "Saudara Tua"

PENERBITAN sebuah buku tidak sama dengan kencing di wc. Dalam penerbitan terjadi suatu proses pembekuan realitas yang kelahirannya sendiri sangat kontekstual. Dia lahir dalam suatu zaman, suatu masa, dengan suasana batin tertentu. Keberlanjutan pengkayaan dirinya sangat tergantung dari kualitas interpretasi pembaca, karena karyanya sendiri sudah tuntas dan beku dalam deretan huruf-huruf. Hal inilah yang memungkinkan tetap aktual atau tidaknya ide-ide dari karya-karya klasik. Lakon-lakon Shakespeare, novel-novel Albert Camus, Sartre, George Orwell. Juga Mahabharata, Bharatayudha, Ramayana. Lantas kalau novel Pramoedya, Perburuan, diterbitkan kembali, bagaimana?

Kala *Perburuan* ditulis (1949), pengarangnya sedang terpuruk di penjara Bukit Duri. Atas bantuan Prof. Mr. GJ Resink, mahaguru Fakultas Hukum UI, naskah ini diselundupkan keluar dan disertakan dalam lomba mengarang Balai Pustaka. Naskah inilah yang berhasil memperoleh Hadiah Pertama Balai Pustaka 1949. Setelah 45 tahun sejak ditulis, atau 35 tahun sejak terakhir dicetak ulang oleh Balai Pustaka, Perburuan diterbitkan kembali dalam atmosfir yang berbeda. Amosfir dimana pengarangnya "dipenjara" oleh logika kekuasaan dan pengecapan yang menakutkan. Tak ada satu toko buku pun yang berani terang-terangan meletakkan buku ini di rak-raknya. Bukan karena bukunya, tapi karena pengarangnya.

Judul: PERBURUAN
Pengarang: Pramoedya Ananta Toer
Penerbit: Hasta Mitra, Jakarta, 1994, vii + 173 halaman

Karya Awal

Lantas apa guna membaca kembali karya Pram yang memaparkan pejuang bawah tanah di ujung samurai Nippon ini? Kalau hendak mencari struktur dalam novel ini, yang tentu sangat disukai para analis sastra, karya monumental A. Teeuw, *Pramoedya Ananta Toer - De Verbeelding van Indonesia*, dan ditambah *The Early Fiction of Pramoedya Ananta Toer, 1946-1949* -nya Keith Foulcher mungkin cukup merekonstruksi alam batin novel dan penulisnya ini kala Perburuan terbit pertama kali.

Jangan terlalu berharap dalam membaca fiksi ini. Apalagi bagi pembaca yang sudah membaca karya-karya Pramoedya pasca-Perburuan. Perburuan bukanlah karya terbaik Pramoedya dan tidak seheroik judulnya. Karya ini harus diletakkan secara historis sebagai bagian awal dari perjalanan karir kesusastraan Pramoedya yang dengan demikian tak dapat dipungkiri sebagai bagian dari proses kreatifnya hingga mencapai puncak pada tetraloginya. Aspek kesejarahan yang sangat kuat ditemukan pada tetralogi *Bumi Manusia-Anak Semua Bangsa-Jejak Langkah-Rumah Kaca* belum digali secara optimal pada Perburuan. Namun aspek kemanusiaan sebagai isu sentral karya-karya Pramoedya sudah mulai tergarap dan muncul dalam karakter tokoh-tokohnya.

Perburuan berkisah tentang Hardo, tipikal pemuda pejuang yang malang melintang dalam perang kemerdekaan. Hardo bertempur melawan Nippon di Surabaya dan sempat ditawan di Mojokerto. Waktu masuk jadi prajurit Pembela Tanah Air (Peta) -- organisasi tentara bentukan Jepang untuk mencari dukungan dalam perang -- Hardo memimpin sebuah pemberontakan di Blitar yang menyebabkan dirinya jadi binatang buruan Jepang. Dalam perburuan inilah cerita mengalir. Kisahnya sendiri hanya memakan tempo 24 jam. Mulai dari kehadiran Hardo pada pesta khitanan Ramli, anak lurah Kaliwangan di senja hari, sampai menyerahnya Nippon pada sekutu di keesokan harinya. Namun memuat berbagai tema yang dikemas lewat dialog-dialog para tokohnya. Perburuan merupakan novel tentang gagasan, yang mengitari atribut manusia secara "universal" tentang ketakutan dan keberanian, pengkhianatan dan balas dendam, terhadap pendudukan Jepang dan pecahnya Revolusi (Foulcher, 1994).

Perjuangan Hardo adalah perjuangan demi kebebasan. Berjuang membebaskan diri dari penindasan dan belenggu penjajahan fasisme Jepang. Perjuangan diri merebut kemanusiaannya kembali. Perjuangan Hardo berada dalam bayang-bayang kekuasaan, berada dalam perburuan, dikepung dan digropyok seperti anjing kurap. Menghadapi ini tak cukup fisik yang kuat saja, juga mental, sehingga Hardo memutuskan untuk menarik diri sebentar, masuk ke goa bertapa ala Jawa untuk kemudian kembali.

Hardo adalah profil pejuang kemerdekaan yang memiliki pandangan berbeda tentang makna perjuangan dan kemanusiaan. Pejuang gagah yang dipandang lembek oleh kawan seperjuangannya, Dipo, lantaran selalu memikirkan tunangannya. "Pedanglah apa yang harus kau pedang. Tembaklah apa yang harus kau tembak. Dan bila engkau sudah lepas dari kewajibanmu sebagai prajurit, siapakah yang akan melarang engkau mengecup bibir tunanganmu?" (hal. 96). Hardo tidak

memandang manusia sebagai mahluk super yang tanpa kelemahan, seperti yang diucapkannya, bahwa: "memang, sebagian hidup kita , kita serahkan pada sentimen. Sebagian lagi pada kebijaksanaan. Sebagian lagi pada ketololan. Dan selanjutnya... selanjutnya hidup kita, kita serahkan pada maut" (hal. 95). Dalam kerangka pikir demikian, Hardo lebih bisa memahami keputusan Karmin yang dituduh pengkhianat karena meninggalkan medan perjuangan dan berkolaborasi dengan pihak Jepang.

Hardo sendiri mewakili kelompok penentang kaum konservatif yang cenderung feodalistik dan cari selamat sendiri sehingga rela mengorbankan kemanusiaannya. Dialog menarik tentang ini tertutur dalam bagian pertama Perburuan, antara Hardo dan mertuanya, Lurah Kaliwangan, yang belakangan malah rela mengorbankan anak kandungnya sendiri, Ningsih, yang sangat dicintai Hardo. Hardo memandang bahwa "Orang yang bekerja dalam pemerintahan penindasan termasuk penindas juga. Dalam hal apapun jua sama" (hal. 30). Itulah sebabnya ia berseberangan paham dengan ayahnya dan mertuanya.

Indonesia-Jepang

Lantas apa yang diharapkan dari penerbitan ulang buku ini? Jelas bukan sekedar pengarsipan sejarah sastra belaka. Penerbitnya menujukan sebagai penyambutan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1994 dan suasana keterbukaan dengan mengaitkannya dengan lahirnya produk-produk sosial baru, lahirnya rasio dan paradigma baru, wawasan baru yang rasional dan sehat (halaman vi). Jelas yang dimaksud adalah mencoba memandang karya ini secara lebih obyektif dan dewasa. Artinya mencoba meninggalkan kekonyolan-kekonyolan dalam pengecapan irasional yang tidak sehat.



Bukan suatu kebetulan pula bahwa novel panjang ini muncul di tengah-tengah kode-kode sosial kita yang berorientasi ke negeri Sakura. Syuga yang eksotis dan mengundang polemik. Komik Jepang yang membanjiri toko dan penyewaan buku yang mendesak komikus Indonesia , Jan Mintaraga, untuk urun komentar. Kegelisahan orangtua terhadap anaknya yang menjadi penonton setia Satria Baja Hitam dan Pendekar Sakti Saint Seiya. Terangkatnya masalah ianfu sampai ke layar televisi. Indonesia memang tak pernah bisa lepas dari "saudara tua"-nya itu.

Bukankah proklamasi kemerdekaan bangsa ini dikumandangkan setelah kehadiran bangsa berkulit kuning itu? Bukankah Malari diletupkan karena relasi Indonesia-Jepang? Dua momentum sejarah ini saja cukup menggambarkan seberapa jauh kehadiran Jepang mempengaruhi sejarah perjalanan bangsa ini. Hal ini sedikit banyak memberi kesan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Taufik Abdullah mencatat bahwa kehadiran Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945 begitu tiba-tiba dan mengejutkan. Sehingga sedikit sekali yang sempat dicatat dalam arsip-arsip sejarah republik ini. Namun kehadirannya justru memiliki kesan teramat dalam.

Apakah novel ini dapat merepresentasikan masa itu? Tentu tidak secara utuh. Novel ini hanyalah sebuah fragmen, yang itu pun masih dapat diperdebatkan. Satu hal yang perlu dicatat adalah muatan novel ini, tentang kebebasan, kemanusiaan, dan perjuangannya, adalah isu yang tak pernah tuntas. Selama penindasan masih berjalan, perjuangan kebebasan tetaplah aktual, dan perburuan adalah atmosfir yang terus dibangun penguasa lewat berbagai media dan teknik. Dan penulis pikir inilah yang disebut tantangan kemanusiaaan universal itu.

Kurniawan

Film di Mata Ilmuwan Sosial

SEJAK awal tahun 1960-an, sebagaimana dicatat Jowett (*Movie as Mass Communication*, 1980) ada kecenderungan untuk memandang film tidak lagi sekedar sebagai karya seni tetapi sekaligus *event* sosial. Suatu pendirian yang mendalilkan bahwa film tidak lain merupakan proses sekaligus produk kehidupan sosial dan hanya sepenuhnya dapat dipahami kalau dikaitkan dengan kehidupan sosial tersebut. Mempelajari film harus mempelajari masyarakatnya, baik evolusi teknologi, sistem industri, bentuk isi, dan naratif film maupun perilaku penontonnya. Analisis sosial film dapat mempertinggi tingkat apresiasi, sebab film bukanlah suatu bidang yang tidak bersinggungan dengan realitas hidup sehari-hari.

Jikalau kecenderungan itu ditarik ke Indonesia, orang langsung menunjuk Salim Said. Sejak tahun 1970 berbagai tulisannya mengesankan pendirian bahwa film merupakan cerminan realitas kehidupan masyarakat. Dia bukanlah seorang *technicialist* yang tertarik pada aspek-aspek teknik film atau sinematografi. Dia juga bukan

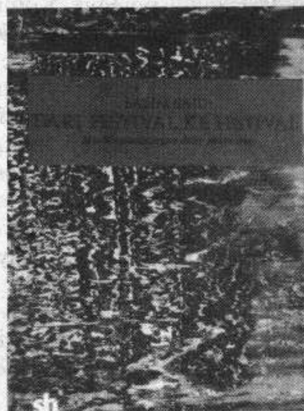
seorang seniman meskipun pernah belajar teater di Akademi Teater Nasional. Salim Said adalah sarjana ilmu sosial dan politik justru disinilah letak perbedaannya dengan kritikus lain, karena pengamatannya terhadap film lebih menunjukkan kedudukannya sebagai ilmuwan sosial yang menerjemahkan narasi film dalam praktek sosial. Beberapa bukunya yang terbit sebelumnya cukup berbicara mengenai kecenderungan itu, diantaranya *Profil Dunia Film Indonesia* (1983), *Pantulan Layar Putih* (1991), *Shadow on The Silver Screen* (1991), dan *Indonesian Film Panorama* (1992).

Buku *Dari Festival ke Festival: Film Mancanegara dalam Perbincangan* adalah kumpulan dari laporan berbagai festival film internasional yang dikunjungi Salaim Said sebagai pejabat festival sekaligus kritikus film dan wartawan. Pada setiap festival, Salim Said menulis laporan kritis tentang festival dan film-film yang ditontonnya.

Judul Buku: DARI FESTIVAL KE FESTIVAL: Film Mancanegara dalam Pembicaraan
Pengarang: Salim Said
Pengantar: Rosihan Anwar
Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, 210 halaman

Mengikuti semua tulisan Salim Said, kita akan menemukan benang merah nuansa sosial untuk memahami film. Analisa historis sosiologis diterapkan Salim Said untuk memahami film dengan berbekal pengetahuan yang luas dalam bidang itu. Analisis ini, seperti kata Andre Tudor (*Image and Influence*,1974) menetapkan struktur naratif film (pemaparan konflik, kontradiksi, serta ending) dengan elemen-elemen cerita rakyat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimana film itu diproduksi. Kritik-kritik subyektif terhadap film memungkinkan mengungkap "aura" misterius mengenai ide-ide kekuatan psikologis konstruksi film.

Dalam film *Stalin with USA*, Said menganalisis dengan menghubungkannya dengan perubahan masyarakat Sovyet terutama ketika zaman Glasnot Gorbachev. Beberapa upaya Glasnot yang dilancarkan Gorbachev membentur *political contuency* yang dulu mendukung Stalin sehingga timbul bentrokan-bentrokan. Perdebatan sengit antara mereka yang dengan yakin membuktikan betapa besar biaya yang dibayar Sovyet bagi kebijaksanaan Stalin tersebut. Banyak diantara yang terlibat debat adalah mereka yang dulu bertahun-tahun berada dalam kamp tahanan Stalin, dan menjadi saksi atas kebrutalan diktator tersebut. Dalam salah satu adegan film, sebuah perkelahian nyaris terjadi antara pembela Stalin dan mereka yang anti Stalin (hal 100). Film *Evening Bell* (sutradara Wu Ziniu) digunakan oleh Said untuk melihat revolusi Cina. Film yang berkisah tentang sekelompok tentara Jepang yang bertahan dalam sebuah gua meski perang berakhir dengan memakan mayat orang-orang Cina yang telah mereka siksa hingga mati, menunjukkan "ideologi" yang hendak diperlihatkan bahwa orang-orang Cina adalah lebih beradab dibanding orang Jepang (hal 105). Berbeda dengan Rusia yang telah membebaskan diri dari trauma kekejaman Nazi pada Perang Dunia- orang-orang Cina daratan masih melihat Jepang sebagai ancaman. Masa lampau masih memainkan peranan di Cina. Keadaan ini menurut Said dapat menolong kita untuk mengerti kesulitan yang dihadapi Deng Ziao Ping dalam memodernkan negaranya. Ini terbukti antara lain pada meningkatnya ancaman terhadap para pemodal Jepang di Cina pada insiden Tian An Men (Juni 1989) dan bangkitnya kembali golongan garis keras setelah peristiwa pembantaian mahasiswa tersebut.



Ketika mengulas film Vietnam, *Quite Town*, dengan tajam ditunjukkan bagaimana mentalitas orang Vietnam tercermin. Film yang berkisah tentang seorang menteri yang mengalami kecelakaan dan meninggal karena tidak sempat dirawat, dengan kocak mengecam mentalitas birokrat serta pejabat partai, tetapi pada saat yang sama menggambarkan mentalitas bobrok rakyat Vietnam. Dengan jelas film ini berseru, birokrat dan aparat partai munafik, sedangkan rakyat yang dipimpinnya juga munafik. Sekian puluh tahun dipimpin oleh partai komunis dengan ideologi sosialis yang mengutamakan kepentingan umum atas kepentingan pribadi, ternyata tidak berhasil merubah orang Vietnam untuk tidak mendahulukan kepentingan pribadi masing-masing. Bahkan ketika jiwa seorang menteri dalam keadaan kritis. Lebih jauh film ini bisa ditafsirkan sebagai sindiran kepada pemimpin yang duduk di Hanoi, ternyata mereka tidak dikenal oleh pemimpin-pemimpin Vietnam tingkat kota kecil (hal 188).

Film yang diulas oleh Salim Said pada umumnya tidak beredar di Indonesia. Sistem import film kita yang sentralistik menutup kemungkinan bagi bangsa kita untuk berhadapan dengan hasil-hasil sinema dunia yang makin lama makin berkembang dan bervariasi. Disinilah arti penting buku ini, karena ia menjadi (semacam) dokumentasi penyelenggaraan festival film internasional beserta film-film yang diputar. Festival barangkali bukan segalanya, tetapi berkumpulnya film-film terbaik dari penjuru dunia, cerita dan tema-tema baru sampai teknik dan plot yang canggih yang celakanya tidak dapat kita nikmati disini.

Eriyanto

Padang Garam Menuju "Batam II"

"Sudah sejak awal abad ke sembilan belas, Pulau Madura mempunyai lebih banyak penduduk .... ketimbang kemampuannya sendiri memberikan pangan melalui hasil panennya". (Rothenbuhler et al. 1954: 110).

AIR laut pelabuhan Tanjung Perak bukan lagi biru. Ombak-ombak kecil ditabrak lalu lintasnya yang ramai, silih berganti. Dari arah Timur sebuah boat patroli polisi meluncur gesit di perairan yang coklat kehitam-hitaman itu. Beberapa kapal tanker melabuh di sebelah Barat, gagah terapung-apung. Tidak jauh dari situ agak ke Timur, berjejer armada perang TNI ALRI yang diperlengkapi dengan senjata mutakhir. Moncong- moncongnya siap menghunjamkan peluru, rudal- rudal maut. Seorang prajurit berdiri berkacak pinggang di atasnya.

Sementara itu, sebuah sampan kayu kecil milik nelayan berjalan pelan terombang-ambing ombak ramai kapal-kapal besar. Ke kanan ke kiri, hendak menepi. Jalannya pelan menyusuri pinggiran Tanjung Perak. Semalaman terkatung-katung di tengah laut.

Dari pelabuhan ini memandang ke Utara, tertatap pada gundukan tanah memanjang ke Timur. Sebuah pulau berukuran sedang, menyembul di pinggiran Laut Jawa menciptakan sebuah selat sempit di antaranya dan Pulau Jawa. Itulah Pulau Madura yang dipisahkan dari Tanah Jawa oleh selat Madura dibagian Selatan dan berbatasan dengan Laut Jawa di bagian Utara.

Pulau Madura hanya bisa dijangkau dengan transportasi laut. Dan pelabuhan Tanjung Perak adalah jalur penyeberangan dari tanah Jawa ke Pulau Madura yang terpadat. Di hari-hari biasa tercatat 37.000 orang menyeberang dari Surabaya ke Madura. Sedang angka tertinggi terlihat dari data yang diperoleh pada seputar lebaran lalu yaitu 77.000 orang setiap harinya.

Sungguh orang Madura sangat mobil.

Pertanian 'kering' Madura

Hamparan tanah gersang dan tandus adalah tanah Madura yang berpenduduk sekitar 2.931.684 jiwa. Di awal-awal musim kemarau pun, tanah pulau ini yang dikategorikan sebagai tanah liat mulai pecah-pecah kekeringan. Dan biasanya kalau sudah menjadi seperti ini tanah menjadi sangat keras. Diperlukan waktu yang lama untuk mencangkul atau membajaknya, atau tanah itu akan dibiarkan menganggur hingga hujan datang. Bahkan bila kemarau telah lama berjalan, maka tidak akan banyak tanaman pertanian yang bisa bertahan hidup.

Kondisi pertanian seperti ini menjadikan ciri tersendiri pula dalam sistem penggarapan tanahnya, yaitu adanya sistem *tegal* atau *ladang*. Tegal, barangkali telah menjadi sistem pengelolaan pertanian yang paling cocok di pulau ini mengingat sulitnya diselenggarakan irigasi teknis. Sawah tidak efektif untuk daerah pertanian yang kesulitan air, apalagi dengan tipografi tanah berbukit-bukit.

Mahalnya air terutama di musim kemarau juga membuat petani Madura menjadikan jagung dan ketela sebagai tanaman utama mereka sekaligus bahan makanan pokok terutama bagi penduduk desa. Padi yang sulit mereka budidayakan lantaran kebutuhan tanaman ini akan air sulit terpenuhi, telah membuatnya berharga di mata penduduk desa Madura.

Sebuah desa miskin di kabupaten Pamekasan barangkali merupakan sebuah potret kecil betapa kering tanah pertanian di Pulau Garam ini.

Desa Angsana. Entah bagaimana penduduknya bisa tetap bertahan dengan kondisi tanah yang sangat sulit untuk lahan pertanian. Di bulan Mei, di mana musim penghujan baru saja berlalu, jagung dan ketela pohon kurus yang banyak di tanam di sana telah menjadi layu. Daun-daunnya berwarna hijau kekuning-kuningan. Bagi petani tembakau harus menyirami tanamannya minimal sekali sehari terutama pada masa-masa awal musim tanam seperti saat ini. Setiap hari mereka menyiram, dari pagi hingga sore. Dengan *ember* yang dirancang khusus untuk pekerjaan ini mereka mengambil air dari sungai yang terletak di dataran yang lebih rendah, menuruni jurang atau di pangkal bukit. Dua ember seng besi dikaitkan dengan tali pada masing-masing ujung sebuah kayu pikulan. Alat sederhana inilah yang digunakan untuk mengambil air sekaligus untuk menyiram tanaman. Di banyak tempat lain di Madura, petani biasanya menggali sumur yang kedalamannya berkisar antara 8-15 meter di sawah dan ladang mereka untuk memenuhi kebutuhan air. Tetapi sulit bagi penduduk Desa Angsana untuk membuat sumur. Pada kedalaman 25 cm, maka cangkul telah terhadang cadas dan batuan keras lain yang sulit ditembus.

Tabel: Penggunaan tanah di Madura

No	PENGGUNAAN	PROSEN
1	Tegalan	45,9 %
2	Sawah	9,6 %
3	Hutan	0,4 %
4	Tambak	1,8 %
5	Tanah Rusak	18,3 %
6	Kediaman Penduduk	20,3 %
7	Lain-lain	3,7 %
	JUMLAH	100 %

Sumber: Mubyarto 1986

DOK. BALAIRUNG

Di Tanah Kering Tembakau Bermutu itu Ditanam
Seharian Mereka Bekerja di bawah terik Matahari

Kemarau akan menjadi lebih berat lagi bagi penduduk yang hanya mempunyai beberapa meter luas tanah atau bahkan hanya tanah tempat rumahnya berdiri saja yang dimiliki. Mereka kebanyakan adalah buruh tani yang mencari nafkah melalui upah dari penggarapan tanah-tanah pertanian. Namun kemarau membuat tanah pertanian semakin banyak yang dibiarkan menganggur. Lahan pekerjaan mereka menyempit. Keadaan ini mengharuskan mereka mencari penghidupan di luar sektor pertanian. Ada yang mengumpulkan batu bahan bangunan yang tidak jauh dari desa ini. Namun lahan ini tidak mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak. Selain disebabkan oleh sedikitnya permintaan juga oleh permintaan yang tidak rutin jumlah dan waktunya. Maka sebagian besar penduduk menghadapi kesulitan ekonomi "klasik" seperti ini dengan cara mencari pekerjaan di luar desa, pergi ke kota bahkan ke luar Madura. Seperti yang kita kenal tentang Madura selama ini dengan penduduknya yang mobil. Migran Madura berada di mana-mana. Kasus Angsana adalah bagian kecil jeritan lirih petani Madura. *"Pak camat keliru memberikan IDT tidak ke desa kami,"* keluh Kepala Desa Angsana.

Demikianlah gambaran singkat tentang pertanian di Madura yang pada umumnya diselenggarakan pada tanah kering sehingga ketergantungan pada faktor-faktor iklim sangat tinggi. *"Kebanyakan dari mereka*

(petani) pada saat ini mempunyai tanah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup primer, walaupun pada masa-masa kering keseimbangan yang rapuh ini dapat terancam." (Agama, Kebudayaan dan Ekonomi: 1989: 247).

Keadaan seperti ini telah berjalan dalam masa yang cukup lama. Maka jangan heran menemui orang Madura berada hampir di seluruh penjuru tanah air ini terutama di Jawa. Temperamen yang tinggi, agresif, keras dan mudah marah mengalir di darah orang Madura yang terlahir di tanah tandus dan memaksa mereka untuk berjuang melawan kerasnya kehidupan di Tanah Garam Madura.

Tanah yang tandus itu "Pusaka"

Kecintaan orang Madura pada tanah kelahiran mereka sangatlah besar. Akulturasi nilai-nilai tradisi tanah moyang dengan ajaran agama Islam, mengakar dalam-dalam di tubuh orang Madura.

Beberapa fakta empirik yang merujuk pada asumsi di atas antara lain terlihat pada fenomena mudik di hari-hari besar Islam. Bagi orang Madura yang berada di rantauan, Idul Fitri dan Idul Adha adalah saat-saat yang hampir menjadi keharusan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Untuk berkumpul dengan sanak keluarga, handai tolan dan tetangga. Untuk bershalat Ied bersama.

Beberapa waktu lalu di Kabupaten Sampang, terjadi insiden berdarah. Empat penduduk tewas diterjang pelor aparat keamanan. Menjadi "korban persembahan" bagi pembangunan. Usaha pembebasan tanah penduduk guna pembangunan sebuah waduk, mendapat rintangan. Penduduk ramai-ramai datang ke lokasi pengukuran tanah. Entah mengapa aparat keamanan menjadi panik, atau habis kesabarannya, hingga bedil pun meletus. Dan keempat tubuh petani Madura itu roboh.

Di Bangkalan terjadi juga kesulitan dalam pembebasan tanah penduduk. Seorang pemilik modal besar hendak membangun pabrik semen di sana. Dan masih banyak lagi kasus-kasus "pembebasan tanah bermasalah" di Madura. Lalu apa sebenarnya penyebabnya?

Tanah adalah harta pusaka peninggalan leluhur yang harus dihormati dan dijaga keutuhannya. Menjual tanah untuk kepentingan duniawi semata dipandang tabu oleh masyarakat setempat. Penjualan tanah bisa dimaklumi jika digunakan untuk keperluan naik haji diantaranya atau bila transaksi terjadi antar saudara. Harta (terutama tanah) dan "wanita" adalah harga diri orang Madura. Nyawa dipertaruhkan jika ada orang lain yang mengusik keduanya. *"Lebih begus mandih dere tanimbeng amandih aeng mate"*. Dan clurit pun lalu diasah.

Masyarakat Madura adalah Muslim

Hari menjelang senja. Di sebuah jalan desa yang tidak lebar yang membelah sebuah persawahan, sekelompok bocah usia sepuluh tahunan berjalan bergerombol. Jalanan penuh tonjolan batu. Namun mereka telah terbiasa menginjakkan kaki di atasnya. Dengan alas sandal jepit mereka berjalan layaknya anak kota berjalan di atas jalanan beraspal. Sesekali dua tiga anak berlari-lari berkejaran di pematang sawah. Masuk dan menelusup di antara tanaman jagung yang sudah tua. Daun-daun yang hampir kering itu berbunyi "kemerosok" diterjang tubuh-tubuh kecil itu. Mereka pulang dari mengaji. Anak laki-laki mengenakan sarung dan songkok melingkar di kepala. Busana yang mereka pakai setiap kali mengaji.


DOK. BALAIRUNG

Sepulang Mengaji
Pendidikan Agama adalah yang Terutama untuk Anak Madura

Sekelompok anak perempuan berjalan di belakang mereka. Berbisik- bisik dengan muka cemberut bila sesekali berolok-olok dengan anak laki-laki. Kerudung yang menutup kepala mereka tersingkap-singkap diterpa angin sawah senja hari.

Mengaji adalah kewajiban anak Madura. Itulah yang dikehendaki orang tua mereka. Sebagian dari mereka juga mendapat pendidikan umum seperti di SD dan seterusnya. Tidak banyak anak desa yang sempat mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA apalagi sampai perguruan tinggi. Yang terpenting bagi orang tua adalah pendidikan agama bagi anak-anak dengan mengirimkan mereka ke lembaga-lembaga pendidikan agama seperti pesantren. Apalagi biaya pendidikan di pesantren lebih murah. Biasanya seorang kyai akan membantu anak didiknya yang tidak mampu dengan mempekerjakan di sawah-sawahnya ataupun di pekerjaan- pekerjaan rumah tangga lain.

Bagaimana anak-anak Madura memperoleh pendidikan, secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, yaitu mereka yang sejak kecil hanya memperoleh pendidikan agama saja. Biasanya setelah berumur 10 tahun mereka dikirim ke pondok pesantren.

Kelompok kedua, adalah mereka yang sempat mendapatkan pendidikan umum di SD dan setelah itu dikirim ke pesantren. Ada juga yang sampai SMP ataupun MTs (madrasah yang setingkat dengan SMP) dan baru setelah itu dikirim ke pesantren. Dan kalau ada yang sampai jenjang

perguruan tinggi biasanya ke IAIN.

Kelompok ketiga, yaitu mereka yang belajar hanya di sekolah umum, mulai SD dan seterusnya dan bila mampu sampai perguruan tinggi. Pada malam atau sore hari mereka masih mendapatkan pendidikan agama di langgar-langgar. Kelompok ini biasanya adalah keluarga Madura yang tergolong sebagai pegawai atau profesi sejenis. Pada umumnya adalah mereka yang tinggal di kota.

Masyarakat Madura memang muslim yang "ta'at". Suasana religius yang kental dapat kita temukan di sini dalam format "kemaduraannya". Agama ditekuni secara bersama-sama dengan kehidupan lainnya. Pun kehidupan politik orang Madura tidak dapat dipisahkan dari agama.

Industrialisasi Madura

Dengan investasi asing dari swasta Jepang, direncanakan pembangunan sebuah jembatan penyeberangan yang menghubungkan tanah Jawa (Surabaya) dengan Pulau Madura (Bangkalan). Dengan dibangunnya jembatan ini kelak berarti pula "dibunyikannya genta" tanda dimulainya industrialisasi Madura yang akan memanggil pulang orang Madura kembali ke tanah moyang yang mereka cintai.

Dalam perkembangan selanjutnya nanti, tanaman jagung ataupun ketela yang selalu kekurangan air itu akan digantikan dengan bangunan-bangunan kokoh pabrik-pabrik yang mencengkeram kuat tanah kering pulau Madura.

Sebuah daerah industri baru dengan segala kelengkapannya.

Kalau sebelumnya penduduk Madura banyak bermigrasi keluar lantaran tanah kering itu tidak mampu lagi menafkahi, niscaya kelak tanah ini mampu menyerap ribuan tenaga kerja dari berbagai penjuru tanah air. Tak pelak lagi Madura akan menjadi "Batam II".

Industrialisasi sebagai "anak emas" dari modernisasi terjadi ketika

TRANS DANCUK



Surau keluarga,lebih besar daripada rumah
Disini tempat shalat, mengaji,istirahat dan bercengkerama

metode ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan dalam masyarakat. Yaitu berupa produksi komoditi yang dijalankan secara mekanis dalam pabrik-pabrik. Dia menjanjikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, bila terjadi hubungan yang serasi saling menguntungkan hak-hak *big labor (buruh)* dan *big capital.* Dan dalam hal ini *big government* berada pada posisi kunci demi terselenggaranya keserasian hubungan tersebut. Industrialisasi adalah awal sebuah peradaban besar bila mekanisme distribusi keuntungan yang adil dapat ditegakkan.

Pada awal proses industrialisasi tentu akan terjadi benturan- benturan nilai-nilai lama dengan yang baru dalam masyarakat. Berawal dari sebuah sistem yang semata-mata diterapkan dalam usaha-usaha produksi, kemudian akan mempengaruhi masyarakat, di mana masyarakat diorganisasikan secara efisien seperti sebuah mesin. Adalah proses rasionalisasi dalam masyarakat yang kemudian membawa akibat melonggarnya ikatan-ikatan tradisi yang digantikan perannya oleh hubungan- hubungan yang bersifat rasional, legal dan kontraktual.

Menurut Peter L. Berger, ekonomi "industrial capitalistic" merupakan daerah yang sudah "dibebaskan" dari agama, merupakan sektor sekular. Usaha-usaha pihak agama untuk "menaklukkan" kembali sektor itu atas nama tradisionalisme politik keagamaan akan selalu dianggap sebagai bahaya terhadap kelangsungan dari tata ekonomi itu sendiri.

Lalu bagaimanakah halnya dengan industrialisasi Madura dengan masyarakat tradisional keagamaannya? Apakah bangunan struktur dan kultur masyarakatnya telah siap dengan "roda keras" dan "angkuh" dari ekonomi "*industrial capitalistic*" itu?

Untuk memasuki sebuah masyarakat industri, bukan perangkatnya saja yang diperlukan, tetapi lebih penting dari itu ialah perubahan kesadaran masyarakat dan perorangan. Perubahan kesadaran tidak selalu sama kecepatannya dengan perubahan institusional. Oleh sebab itu juga sering terjadi adanya ketertinggalan budaya yang mempunyai akibat yang bermacam-macam.

Dengan atau tanpa kita beranjak dari konteks pembicaraan industrialisasi Madura, sekiranya perlu kita "mencatat" apa yang ditulis oleh Dr. Kuntowijoyo dalam *Paradigma Islam* : "Secara manahun terjadi aliansi antara 'big government' dan 'big capital' di Indonesia. Di pihak 'big capital' tentu saja kebijakan itu adalah semacam politik asuransi untuk melindungi diri dari ancaman 'big labor', sedangkan di pihak lain, 'big government' menginginkan sumber dana bagi kegiatan-kegiatan politik. Sementara itu peranan kaum menengah pribumi semakin surut dalam pertumbuhan ekonomi..."

Asip A. H.
Gutomo Bayu Aji

Yang ketlingsut dari pembreidelan

Cerita tentang pembreidelan Tempo, Detik dan Editor berlalu sudah. Poster dan spanduk protes telah digulung. Yang belum terjawab adalah mengapa itu mesti terjadi ? Tidak satu pun media resmi yang berani mengungkap latar belakang pembreidelan itu.Semua media, meminjam istilah Onghokham, telah turut "dibreideil" karena hidup dalam ketakutan dan kehati-hatian.

APALAGI alasan yang dituangkan dalam SK pembreidelan sama sekali tidak jelas. Karena disana hanya disebutkan alasan pelanggaran subtantif bagi Tempo dan administratis bagi Detik dan Editor. Yang berkembang kemudian adalah rumor disekitar pembreidelan itu.

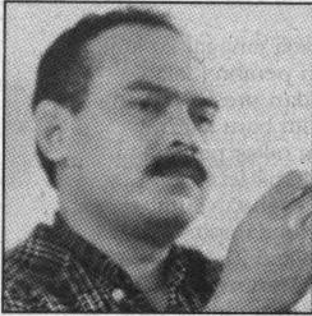
Yang pasti, awalnya adalah pidato tanpa teks Presiden Soeharto pada peresmian pangkalan TNI AL di Teluk Ratai, Lampung pada tanggal 9 Juni 1994. Pada waktu itu, presiden mengomentari pemberitaan pers mengenai pembelian 39 kapal perang bekas armada Jerman Timur, yang seharga US$ 12 juta dan akhirnya membengkak menjadi US$ 400 juta. Kapal bermasalah ini sempat menjadi sorotan pers. Betapa tidak? Anggaran yang diajukan menristek seperti yang diberitakan TEMPO sebesar US$ 1,1 milyar ini sempat ditolak sampai 3 kali oleh menkeu. Anggaran itu merupakan seperlima dari hutang CGI yang US$ 4,9 milyar. Perbedaan pendapat antara Habibie dan Marie inilah yang dituduhkan terlalu dibesar-besarkan. Menurut Goenawan Mohamad, perbedaan pendapat itu wajar. "Kalau menkeu tidak setuju budget berlebih, itu tugasnya. Sedangkan menristek pengin berbelanja untuk peralatan dan perlengkapan lebih baik itu juga tugasnya, " papar mantan bos majalah yang mempunyai jumlah 400 karyawan dan ribuan pengecer serta menyumbangkan pajak 5 milyar setiap tahunnya itu. Tetapi pers dituduh telah membuat informasi yang dapat menjurus pada timbulnya instabilitas. Tidak tanggung-tanggung, peringatan itu muncul dari orang nomor satu di negeri ini. Di Teluk Ratai ini presiden berucap,"Orang-orang yang setengah mengerti ini, kemudian mengeluarkan pendapat, telah memperkeruh situasi, mengadu domba, mengakibatkan suasana saling curiga, sehingga mengganggu stabilitas. Kalau tidak bisa diperingatkan, lanjut presiden, maka akan kita tindak".

Empat hari berikutnya, Dirjen PPG memanggil Dewan Pers untuk merapatkan peringatan keras dari presiden. Dewan Pers pada waktu itu mempertahankan supaya tidak terjadi pembreidelan, karena menpen pada waktu pembreidelan Sinar Harapan dan Prioritas telah berjanji tidak akan ada lagi pembreidelan. Tapi pada akhirnya diambil kesimpulan hanya tabolid Detik yang akan dibreidel. Selanjutnya hasil rapat itu dilaporkan kepada menpen untuk diteruskan kepada presiden.

Pada kesempatan lain, konon Menristek BJ Habibie menghadap presiden di jalan Cendana tanggal 17 Juni untuk mengungkapkan niatnya menggugat Tempo yang menurutnya telah merugikan proyek-proyek yang dipimpinnya seperti IPTN,PINDAD, dan PT PAL , serta nama baiknya. Tempo, melalui Kejaksaan Agung, akan digugat 100 milyar yang menurut perhitungan akan menyebabkan majalah yang beroplah 220.000 itu gulung tikar. Tetapi, menurut sebuah sumber, dari Kejaksaan Agung diperoleh keterangan bahwa secara birokratis, gugatan itu akan memakan waktu kurang lebih 2 sampai 3 tahun.

Maka, hatta pada tanggal 20 juni, keluarlah perintah pembreidelan terhadap Tempo dari presiden, yang khabarnya kasus itu baru akan dibicarakan dalam rakor polkam tanggal 30 Juni. Untuk lebih taktisnya, menurut sebuah sumber, perlu ada media pendamping. Pada akhirnya pada tanggal 21 Juni dalam pertemuan antara Menpen dan Dirjen PPG disepakati bahwa media yang akan dibreidel itu adalah Tempo, Detik dan Editor. Maka disiapkanlah alasan itu. Kelemahan administrasi Detik dan Editor dijadikan sebagai pembenar. Menurut SK menpen itu Detik sudah berubah dari visi dan misi awal sebagai tabloid detektif dan kriminal. Dan Editor mencantumkan pimpinan redaksi yang sudah lama non aktif. Akhirnya, pada malam harinya, di tengah hingar bingarnya masyarakat yang kecanduan sepak bola piala dunia, drs. Soebrata, dirjen PPG dengan wajah gelisah, membacakan berita yang menggemparkan itu.

Pemerintah tidak pernah memerinci alasan pembreidelan itu, kecuali alasan administratif dan subtantif. Alasan pelanggaran administratif ini, adalah alasan pertama kali dalam sejarah jurnalistik Indonesia, yang menurut Dhaniel Dhakidae, menunjukkan semakin sewenang-wenangnya pemerintah. Bukankah seorang guru tidak harus membunuh muridnya yang tidak berseragam, tulis Daniel. Menanggapi tuduhan pelanggaran administratif bagi Detik, Eros Jarot menampik, karena dia telah mencoba menjelaskan tentang misi dan visi Detik, terakhir tanggal 23 April 1994. "Sudah kami jelaskan semua, bahwa detektif itu adalah *investigation report*; segala bentuk berita yang



TIMBUL

Eros Djarot

diburu dan diungkap dari peristiwa yang belum ada di permukaan, ...kriminal, peristiwa kriminal biasa, *white collar*, kasus keadilan dan hukum." ungkap bos tabloid yang dalam beberapa bulan saja, mencapai tiras 400 ribu ini. Tapi pernyataan Eros itu tidak digubris oleh Deppen.

Berbagai kalangan menduga bahwa alasan pembreidelan ini adalah alasan politis, terutama yang sering disebut-sebut pemerintah tentang stabilitas nasional. Kalau kita tengok ke belakang, memang sejak tahun 1990 suhu politik mulai menghangat. Ini berkaitan dengan kemunculan apa yang sering disebut-sebut sebagai arus bawah. Arus bawah ini merupakan reaksi dari masyarakat yang berakar dari ketidak puasan terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah. Kasus ini bervariasi dari kasus penggusuran, Kedung Ombo, UULAJ, SDSB, Nipah, Timtim, upah buruh, sampai kasus mega kredit Bapindo. Pers hanyalah merefleksikan realitas yang terjadi pada masyarakat.

Celakanya, ketika pers mengangkat realitas itu, maka tuduhan yang muncul adalah memanas-manasi dan memperkeruh suasana. Padahal sudah jamaknya kalau pers menggali informasi seluas-luasnya dengan melakukan *depht reporting* dan *both side reporting* untuk diinformasikan kepada khalayak. Yang terakhir inilah yang yang dituduhkan sebagai adu domba yang menjurus kepada terganggunya stabilitas nasional.

Hal ini telah melampaui batas toleransi yang diberikan oleh pemerintah. Maka, peringatan awal pun sudah diberikan oleh Menteri Penerangan Bung Harmoko yang juga ketua Golkar pada tanggal 2 Juni 1994. Waktu itu Bapak menteri memberi petunjuk dan pengarahan kepada para pemimpin redaksi di Jakarta. Pers dianggap memunculkan berita yang tidak proporsional, merusak sendi-sendi kebangsaan, dan menjadikan para oposan sebagai hero. Sedangkan permasalahan khusus yang dituduhkan adalah pers terlalu membesar-besarkan kemunculan PRD dan Konferensi Asia Pasifik tenang Timor-Timur (ACEPT) di Manila. Akhirnya, setelah kasus kapal bermasalah tersebut, maka turunlah SK Menpen tentang pembreidelan. Ironis, bahwa pers yang dituduh melanggar hukum itu, langsung dieksekusi tanpa prosedur hukum. Disini, berarti menpen telah bertindak sebagai polisi, jaksa, hakim, sekaligus algojo. Padahal, justru SK menpen itu sendiri yang melanggar tertib hukum (baca pula Pedang Democles Itu Bernama SIUPP).



TIMBUL

Goenawan Mohamad

Dengan dibreideilnya ketiga media tersebut, bukan hanya ribuan karyawan yang dirampas nafkahnya, tetapi yang lebih esensial adalah kemerdekaan berpendapat. Seolah-olah pers hanya mendapatkan kemerdekaan pinjaman yang sewaktu-waktu bisa ditarik lagi.



Gelombang protes

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pembreidelan pers diikuti dengan gelombang protes massa. Ratusan surat pernyataan sikap dari barbagai lembaga baik dalam dan luar negeri dilayangkan ke Deppen. Bersamaan dengan itu aksi turun ke jalan secara bergelombang terjadi dihampir seluruh kota-kotadi nusantara.Di Sumatra aksi meletus diBandar lampung, Medan, Pakanbaru,Palembang dan padang. Untuk Sulawesiterjadi di Ujungpandang dan Manado. Kalimantan terjadi di Samarinda, Nusa Tenggara/Bali di lombok dan Kuta, dan untuk pulau Jawa menyebar dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, semarang, Salatiga, Solo, Surabaya, Jombang, Malang , Surabaya dan Jember. Aksi ini melibatkan berbagai kalangan seperti mahasiswa, wartawan, aktivis LSM, dan buruh.

Satu hari kemudian, kekerasan aparat negara mulai dirasakan di Taman Monas. Represi aparat ini mencapai puncaknya pada tanggal 27 Juni, yang kemudian dikenal dengan Jakarta Berdarah. Massa yang bergerak dari kompleks pertokoan Sarinah menuju kantor Depen, setelah gagal bertemu dengan dirjen PPG, mereka diporak porandakan oleh barisan Tentara Opsih. Puluhan orang terluka seperti Semsar Siahaan, seorang pelukis yang retak kakinya,3 orang retak tangan, 1 orang gegar otak, 1 orang pingsan, 2 orang yang lain bocor kepala. Dan puluhan yang lain ditangkap dan diadili, termasuk penyair WS Rendra.Yang lebih miris adalah ucapan seorang pejabat polisi ketika ditanya oleh wartawan, mau dibawa kemana para demonstran ini. Jawabnya, "Akan saya kirim mereka ke neraka". Ternyata mereka diadili atas tuduhan melanggar pasal menyelenggarakan keramaian tanpa ijin. Yang menarik lagi, ada sekelompok pemuda, yang diduga dari MKGR mengadakan aksi tandingan mendukung tindakan pembreidelan.

Sedangkan pada tangga 24 Juni para seniman berkumpul di TIM dan menelorkan Memorandum Indonesia yang berisi penolakan cara kekerasan dalam menangani para demonstran, sertra mendesak pemerintah untuk melakukan koreksi secara terbuka kepada rakyat.

Tindakan kekerasan kembali terulang tatkala para aktivis berkumpul di kantor LBH dalam rangka puasa keprihatinan. Mereka yang berasal dari berbagai kota ditangkap dan dikenai tuduhan yang sama.

Represi dari aparat itu tidak menyurutkan aksi solidaritas. Pada tanggal 5 Agustus Ratusan wartawan dan aktivis kembali berunjuk rasa di kantor PWI kebon Sirih. Mereka

menuntut PWI sebagai organisasi tunggal profesi kewartawanan untuk ikut memperjuangkan nasib para wartawan. Ternyata tuntutan mereka tidak membuahkan hasil. Malah ketika ratusan massa itu mengadakan long march ke Sarinah, kembali mereka dipukul oleh tentara. Ketidakpercayaan pada PWI ini melahirkan deklarasi Sirnagalih yang memaklumkan berdirinya Aliansi Jurnalistik Independen 7 agustus.Sebuah organisasi tandingan yang menyusul sepupu-sepupunya semacam SBSI yang mencoba melawan korporatisme negara.

Gelombang protes berangsur-angsur surut.Seolah kehabisan energi. Tidak seperti kasus SDSB aksi ini hanya berbasis pada pada sebagian keci kelas menengah kota. Kemana kelas menengah yang lain?Ada tuduhan bahwa kelas menengah kita tidak mempunyai komitmen yang permanen pada demokrasi. Terbukti ditengah-tengah gemuruhnya aksi, ada yang ribut-ribut soal pembagian saham.Lalu apakah aksi ini sia-sia? Mengapa aksi massa ini tidak mempengaruhi policy pemerintah, ataukah pemerintah telah memenangkan pertandingan ini?

Menurut Ariel Heryanto, permainan belum selesai. Kembalinya Detik,Tempo, dan Editor bukanlah parameter. Dari sini cukup digambarkan siapa elemen-elemen pendukung demokrasi,dan siapa yang bersikap hipokrit.

Keuntungan apa yang ditangguk pemerintah dari pembreidelan ini? Agaknya, lebih banyak ruginya. ketimbang untungnya. Ditengah-tengah upaya keterbukaan, di tengah-tengah merosotnya dukungan, tidak perlu mencari musuh baru, kan?

Sunarto

Pedang Demokles bernama SIUPP

SIUPP, laksana Pedang Democles dalam mitologi Yunani. Konon, sekali Pedang Democles diayunkan, dunia mengalami mimpi buruk: kehancuran total. Bagi dinamika kehidupan pers di republik ini, SIUPP adalah sebuah bayangan kematian, yang bisa mengancam setiap saat. Sudah begitu banyak intitusi pers mengakhiri kesaksian sejarahnya dengan pencabutan SIUPP, sebuah kata lain dari pembreidelan.

PEMBREIDELAN TEMPO, EDITOR dan DeTIK yang dituangkan dalam SK Menpen, masing-masing dengan SK NO. 123/1994 (TEMPO), SK No. 124/1994 (EDITOR) dan SK No. 125/1994 (DeTIK), 21 Juni lalu memaksa kita untuk meninjau ulang lembaga macam apa SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) ini. Dalam pandangan sejarah, lisensi (surat ijin), pertama kali ada ketika jaman Darurat Perang (*Staat van Oorlog en Beleg/SOB*) di tahun 1957 melalui Peperti No. 10/ 1960 yang memperkenalkan SIT (Surat Ijin Terbit). Artinya untuk menerbitkan pers harus ada SIT tersebut. Dan SIT dapat dicabut jika pers tidak memenuhi 7 syarat yang disebutkan dalam Peperti tersebut dan memenuhi 19 janji yang juga dirinci dalam peraturan itu. Lisensi penerbitan tidak dikenal sebelumnya. Termasuk pada masa kolonial Belanda, setiap orang dapat menerbitkan pers. Bahkan pada revolusi fisik, sejumlah wartawan dapat menerbitkan koran republik di daerah NICA. Delik pers hanya dikenakan pada oknum pengelola pers, bukan pada institusi pers. Kebijakan adanya ijin cetak ini bukan hal baru, jika diingat bahwa lisensi cetak sudah dikenal pada abad 17 yang lalu, sehingga John Milton memprotesnya melalui tulisannya *Areopogitica* yang sering disebut-sebut setiap membicarakan sejarah demokrasi (Milton, 1968).

Lembaga ijin terbit ini sejak semula sudah mengundang protes karena disana juga terkandung wewenang penguasa untuk membreidel penerbitan yang tidak disukainya. Harapan untuk mengakhiri lembaga SIT yang bertentangan dengan prinsip pemberian jaminan kebebasan pers itu muncul ketika terbentuk UU pokok pers No 11/1966. Suatu kemajuan formal dalam UU pers itu adalah penegasan bahwa setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakikat demokrasi Pancasila. Untuk itu tidak diperlukan ijin terbit (pasal 8). Tetapi ketentuan pasal 8 itu "dihambarkan" dengan adanya pasal 20(1)a. Dalam masa peralihan keharusan mendapatkan surat terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh pemerintah dari DPR.Tidak jelas, kapan berakhirnya masa peralihan. Ketika membuat pasal peralihan itu umumnya para anggota Pansus berpengertian bahwa masa transisi adalah masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Katakanlah, masa peralihan itu berakhir pada saat

dalam Pemilu I Orba (1971). Nyatanya, pasal itu bertahan selama 16 tahun dan selama jangka waktu itu memakan korban sebagai alat wewenang pemerintah melakukan pembreidelan massal 1974 dan 1978.

Pasal 20(1)a itu pada akhirnya memang dicabut ketika diundangkan UU Pokok Pokok Pers No 21/1982. Dalam UU itu dinyatakan bahwa untuk penerbitan tidak diperlukan Surat Ijin Terbit (pasal 8) dan kebebasan pers warga negara dijamin sesuai dengan hak asasi warga negara (pasal 5 ayat 1). Tetapi dalam hal ijin terbit ini muncul ketentuan baru yakni pasal 13(5) yang menyatakan bahwa setiap penerbitan pers diharuskan memiliki Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pers. Dengan demikian usaha menghapus lembaga ijin itu tetap tidak berhasil. Mengapa pasal 13 (5) itu bisa lolos, padahal anggota Pansus sebelumnya sudah berikrar untuk menghapus segala bentuk ijin pers dalam UU pers? Said Budairy, salah seorang anggota Pansus, memberi kesaksian bahwa diterimanya pasal itu karena semula menganggap bahwa SIUPP hanyalah ijin usaha belaka. Ia sekedar *code of enterprise*, sama dengan surat ijin usaha mendirikan perusahaan apapun (lihat Kompas, 12 Juli 1991). Pers juga sebuah industri, karenanya harus ada pengaturan; malah Ali Moertopo menunjuk SIUPP sebagai pelindung terjadinya monopoli modal dalam perusahaan pers. Secara formal atau substansial SIT telah mati dan SIUPP bukanlah pengganti SIT. SIUPP adalah faktor ekonomi yang tidak berhubungan dengan kebebasan untuk menyatakan pendapat dan pikiran melalui pers (*code of opinion and code of publication*) karenanya SIUPP tidak dapat dipakai sebagai alat untuk mengurangi kebebasan pers dalam hal ini langkah preventif berupa pembreidelan pers (Seno Adji, 1990).

Keyakinan itu ditambah dengan kedudukan pasal 13 (5) itu dalam bagian usaha pers. Pemerintah, melalui Menpen juga memberi jaminan akan hal itu. Coba kita simak keterangan pemerintah di depan DPR RI ketika memproses RUU tersebut menjadi UU. Berkata Menteri Penerangan: "... Mengenai Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dapat kami jelaskan bahwa ketentuan itu dilandasi dengan iktikad baik untuk mengadakan pembinaan yang lebih mantap dalam pembinaan pers. Dalam ruang lingkup pembinaan yang dimaksud, juga dicantumkan masalah-masalah periklanan dan grafika pers yang keduanya merupakan faktor sangat penting bagi perkembangan surat kabar. Maka jelas masalah pengembangan usaha penerbitan pers akan ditangani secara menyeluruh, demi suksesnya pertumbuhan usaha...".

Keyakinan itu rontok ketika dituangkan dalam Permenpen No. 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Disitu disebutkan bahwa SIUPP dapat dicabut oleh Mentri Penerangan atas penilaian Dewan Pers apabila penerbitan pers bersangkutan tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat, pers yang bebas bertanggung jawab (pasal 33 h). Pasal 33 h Permenpen 01/1984 ini secara legal bertentangan dengan pasal 4 dan pasal 8:2 UU Pers. Sebab pelaksanaan pasal 33 h Permenpen 01/1984 sama saja dengan pembreidelan dan pencabutan SIT. SIUPP memang tidak menyangkut aspek redaksional tetapi menyangkut perusahaan, tetapi semua orang tahu begitu perusahaan pers harus ditutup SIUPP-nya maka semua kegiatan redaksional otomatis terhenti. Dan ini dibuktikan bagaimana SIUPP "meluluhlantakkan" Sinar Harapan (1986), Prioritas (1987), Monitor (1991) dan terakhir Tempo, Editor, dan Detik (1994). Keharusan memiiliki SIUPP yang dibentuk pasal 13:5 UU Pers membuat jaminan yang diberikan pasal 5 sia-sia. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penulis berita tidak dibuktikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (lewat pengadilan). Penerapan pasal 33 h Permenpen 01/1984 ini juga menyalahi sistem pertanggungjawaban hukum menurut pasal 15:4 UU Pers. Yakni hanya satu orang yang bertanggung jawab, bukan semua wartawan dan karyawannya. Jika sebuah berita, misalnya dinilai mengganggu stabilitas, seharusnya wartawan yang menulisnya atau pemred surat kabar yang bersangkutan diajukan ke pengadilan untuk

RESTRIKSI PERS SEPANJANG SEJARAH INDONESIA

INDIKASI	MASA KOLONIAL	MASA JEPANG (UU No. 16)	KEMERDEKAAN (Sebelum UU Pers 1966)	MASA UU No. 11/1966	MASA UU NO. 21/1982
Ada/tidaknya wewenang penguasa melakukan sensor	-- *Drukpers Reglements* RR 1856 (KB 8 April 1856): semua karya cetak sebelum diterbitkan, dikirimkan terlebih dahulu kepada kepala pemerintahan setempat, pejabat justisi dan *Algemenee Secretarie*	-- Pasal 4. Semua barang cetakan sebelum diedarkjan harus melalui sensor balatentara Jepang	Instruksi penguasa militer 4 Desember 1957: semua peraturan mengenai sensor preventif dicabut	-- Pasal 4. Untuk pers nasional tidak dikenakan sensor dan breidel -- Pasal 15 (1). Kebebasan pers sesuai hak asasi warga negara	-- Pasal 4. Untuk pers nasional tidak dikenakan sensor dan breidel -- Pasal 5 (1). Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga -- Permenpen 01/Per/Menpen/1984 Pasal 31. Percetakan pers melaporkan secara rinci dan teratur hasil cetakannya kepada Deppen
Ada/tidaknya surat ijin dari penguasa untuk menerbitkan pers	tidak ada	-- Pasal 6. Ijin sensor dikenakan juga bagi percetakan -- Pasal 16. Semua jenis barang cetakan harus memiliki ijin publikasi dan terbit	-- Peraturan penguasa militer Jakarta 1 Oktober 1958: keharusan memiliki ijin terbit bagi koran di Jakarta -- Peperti No. 10/60 sejumlah syarat ijin terbit -- Penpres No. 6/63 pasal 6: ijin terbit bagi koran dan majalah	-- Pasal 8 (1). Setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif -- Pasal 8 (2). Untuk itu tidak diperlukan ijin terbit -- Pasal 20 (1) a. Dalam masa peralihan ijin terbit masih berlaku	Pasal 8 (1). Setiap wargha negara mempunyaio hak penerbitan pers yang bersifat kolektif -- Pasal 8 (2). Untuk itu tidak diperlukan ijin terbit Pasal 13 (5). Setiap penerbitan pers memerlukan SIUPP yang dikeluarkan pemerintah atasa pertimbangan Dewan Pers
Ada/tidaknya wewenang penguasa untuk membreidel	Persbreidel Ordonantie 1931: --Padal 1 . pelarangan terbit bagi tulisan-tulisan yang mengganggu ketertiban umum --Pasal 2. larangan terbit percetakan, penerbitan, selebaran, dikeluarkan oleh Gubernur Jendral	-- Pasal 2. Semua penerbitan yang memusuhi Jepang dapat dilarang terbit	UU No. 23/54 (LN 54-57): pencabutan *persbreidel ordonantie*	-- Pasal 4. Terhadap pers nasional tidak dikenakan pembreidelan -- Permenpen No. 03/Per/Menpen/1969 (27 Mei 1969). Cara-cara mendapat SIT. Pencabutan SIT bagi pers yang tidak mengutamakan sifat ideal pers	-- Pasal 4. Terhadap pers nasional tidak dikenakan pembreidelan. -- Permenpen No. 01/Per/Menpen/1984 pasal 33h. Menpen dengan setelah mendengar Dewan Pers dapat membatalkan SIUPP bagi pers yang tidak mencerminkan pers yang sehat dan bertanggungjawab

membuktikan undang-undang yang dilanggar sehingga mengganggu stabilitas.

Ketika diskusi di Tempo (1981), M. Tasrif mengatakan bahwa indikasi dijaminnya kebebasan pers di suatu negara ditentukan oleh tiga indikasi, yakni (a) Tidak ada kewajiban menurut hukum untuk meminta surat ijin terbit suatu penerbitan pers kepada pemerintah, (b) Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan penyensoran sebelumnya terhadap penerbitan pers, dan (c) Tidak ada wewenang menurut hukum pemerintah melakukan pemberangusan atau pembreidelan terhadap penerbitan pers baik sementara atau selamanya. Ketiga prinsip di atas sebenarnya telah dijamin dalam UU Pers No. 21/1982 masing-masing dinyatakan bahwa untuk Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan (pasal 4) dan tidak diperlukan ijin terbit bagi penerbitan pers (pasal 8). Ketentuan-ketentuan ini sebenarnya lebih maju dibandingkan dengan ketentuan UU Pers masa sebelumnya (lihat tabel Restriksi Pers Sepanjang Sejarah Indonesia).

Dengan meniadakan sensor dan menghapus pembreidelan, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pembreidelan pers dan ijin penerbitan surat kabar tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar bernegara. Mengingat hal ini, negara kita bisa kiranya dikategorikan sebagai penganut aliran yang *Rechttheories* tidak membenarkan *persbreidel*. Tetapi adanya lembaga SIUPP membuat jaminan-jaminan kebebasan pers itu tidak banyak artinya. Sebab adanya SIUPP praktis pemerintah masih punya wewenang melakukan pembreidelan atau menentukan boleh tidaknya seorang warga negara mengusahakan penerbitan pers. Memang sensor tidak dikenakan, tetapi mekanisme sensor lewat SIUPP justru lebih mengerikan. Studi Rizal Malaranggeng (1991) menunjukkan bahwa ancaman pencabutan SIUPP -- yang bisa datang setiap saat -- membuat pers melakukan swasensor (*selfcencorship*) menimbang-nimbang berita yang akan dimuat agar tidak masuk ranjau-ranjau breidel yang pada akhirnya praktek semacam ini membuat pers kehilangan kepercayaan diri (*inferiority compelex*) yang akut. Dengan menjamin tidak ada sensor dan breidel tetapi ijin terbit di tangan pemerintah, maka efek yang ditimbulkan akan sama saja.

Selama ada SIUPP atau surat ijin apa pun namanya kebebasan pers tidak akan terwujud. SIUPP adalah "pedang Democles", yang menentukan hidup dan matinya pers. Begitu dia diayunkan (baca: mencabut) penerbitan pers akan luluh lantak. Tanpa pengadilan, pers bisa mati seketika seperti kepala yang dipenggal oleh seorang algojo. Maka, mengutip Goenawan Mohammad, sungguh aneh jika kedudukan SIUPP yang sedemikian penting ternyata lebih rendah kedudukannya daripada SIM (Surat Ijin Mengemudi). Untuk mencabut SIM harus lewat pengadilan lebih dahulu, sedangkan SIUPP yang berkaitan dengan masyarakat luas bisa dicabut seorang saja tanpa perlu lewat pengadilan.

Erie dan Frans S.

PEMBREIDELAN PERS MASA ORDE BARU

TAHUN	MEDIA CETAK	ALASAN BREIDEL	KATEGORI	PENYELESAIAN
1968	Anjangsana(edisi nasional), Anjangsana (edisi Jakarta), Populer, Dharma Bhakti, Indonesia Raya, Tamasya, Warta Minggu, Jakarta, Minggu Opini.	Alasan pornografis	Substansial	SIT dikembalikan setelah menyatakan permintaan maaf
1971	Harian Kami, Duta Masyarakat	Melanggar ketentuan minggu tenang	Substansial	SIT dikembalikan setelah minta maaf
1973	Sinar Harapan	Menyiarkan laporan APBN 1973-1974 mendahului pidato presiden	Substansial	SIT dikembalikan setelah minta maaf
1974	Nusantara, Abadi, Indonesia Raya, KAMI, Jakarta Times, Suluh Berita (Sby), Pedoman, Ekspres, Wenang	Pemberitaan soal Malari yang dianggap merusak kepercayaan masyarakat	Substansial	Tidak dikembalikan SIT-nya/tidak boleh terbit kembali
1976	Newsweek	Menyajikan laporan yang mengkritik presiden dan Ibu Tien Soeharto (Terbitan 8 November 1976)	Substansial	Diperbolehkan beredar kembali setelah menyatakan permintaan maaf
1977	Salemba	- Menyalahi STT, beredar di luar kampus - Memuat karikatur mengenai kritik terhadap Golkar	Administratif dan substantif	Diberikan STT baru
1978	Kompas, Sinar Harapan, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi, Pos Sore	Pemberitaan yang mengganggu ketertiban umum	Substansial	SIT dikembalikan setelah menandatangani pernyataan mematuhi Kode Etik, Dewan Pers, dan peraturan lain
1979	Matahari	Pemuatan artikel "Cukong Sumber Malapetaka" dan "Bangkrutnya Teknokrat Mafia Barkley" yang mengkritik peranan teknokrat	Substansial	Tidak dikembalikan SIT-nya/tidak boleh terbit kembali
	Lensa Generasi	Perpindahan cetak ke Jakarta, isi koran lebih banyak masalah nasional dibanding lokal (Tanjung Karang)	Administratif	SIT dikembalikan setelah ijin percetakan selesai
1982	TEMPO	Peliputan Pemilu yang eksesif (terbitan 10 April 1982)	Substansial	SIT dikembalikan setelah mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi kesalahan serupa
	Pelita	Pemberitaan hasil Pemilu tak bersumber pada LPU	Substansial	s. d. a.
1983	Jurnal EKUIN	Penyiaran berita patokan minyak yang sebelumnya disepakati *off the record*	Substansial	s. d. a.
	Yaumul Al. Quds.	Pemuatan tulisan yang menjelek-jelekkan pemerintah Arab Saudi	Substansial	s. d. a.
1984	TOPIK	Pemuatan Laporan "Mencari Jenis Manusia Miskin", Eben menemui Pak harto (terbitan 24 Januari 1984)	Substansial	s. d. a.
	expo	Pemuatan Laporan 100 milyuner Indonesia	Substansial	SIT tidak dikembalikan
1986	Sinar Harapan	Melanggar kebebasan pers	Substansial	SIUPP tidak dikembalikan, tetapi mengajukan SIUPP baru berubah menjadi SUARA PEMBAHARUAN
1987	Prioritas	- memuat berita tak berdasar fakta - pemuatan berita non ekonomi lebih dari 25%	Substansial	Tidak dikembalikan SIUPP-nya/tidak boleh terbit kembali
1990	Monitor	Pemuatan angket "Ini Dia Tokoh Pilihan Pembaca" yang dipandang berbau SARA	Substansial	Tidak dikembalikan SIUPP-nya, tetapi diberi SIUPP baru menjadi CITRA
1994	TEMPO,	Pemberitaan yang eksesif	Substansial	?
	Editor	Dewan Redaksi yang berbeda dari yang tercantum dalam SIUPP	Administratif	?
	DeTIK	Menyalahi SIUPP yang sebenarnya untuk tabloid kriminalitas	Administratif	?

Ia bergerak seperti penari. Seperti angin. Seperti ular. Seperti scorpio. Ia bergerak tanpa putus. Tenang. Lembut sepenuh penghayatan. Ia bergerak di candi, di pantai, di gedung kesenian. Ia adalah Suprapto Suryodarmo.



I dunia kesenian dan kebudayaan negeri ini, dia-lah orang yang mempunyai komunitas jaringan kerja internasional. Dan tidak main-main, dia tampil sebagai "suhu" dari sekian banyak murid-muridnya yang berasal dari manca negara. Mereka datang datang dari Swiss, Denmark, Jerman, Inggris, Austria, Perancis,

Saya ini guru yang kesepian

Amerika, Filipina, untuk "meguru" kepadanya tentang Meditasi Gerak; suatu format gerak tubuh yang ia temukan untuk mentransformasikan elemen-elemen dalam kedirian manusia yang terpendam, untuk kemudian dijelmakan menjadi suatu kesadaran baru, yang luas dan dalam.

Dia pula yang menggagas bahwa kekayaan khasanah kebudayaan bukanlah warisan nenek moyang, tetapi sudah sewajarnya jika masyarakat adalah bagian dari kebudayaan. "Arus globalisasi jangan membuat kita tercerabut dari bumi kebudayaan kita sendiri. Kita harus sadar di alam macam apa kita berpijak," ujarnya. Sehingga di masyarakat itu kebudayaan menjadi kekayaan yang musti ditindaklanjuti, diterjemahkan dalam konteks ruang dan waktu. Lelaki ini pula yang sempat membuat geger diskursus kebudayaan Jawa tatkala dia menggugat susunan abjad Jawa sebagai biang keladi stagnasi budaya Jawa, dan mengusulkan susunan baru.

Di sebuah tanah seluas 2 hektar persis di sebelah utara kompleks perumahan Mojosongo, Solo, Suprapto Suryo Darmo mendirikan Padepokan Lemah Putih.

Sarjana muda Filsafat UGM tahun 1978 yang lahir di kampung Kemlayan Solo 2 Februari 1945 ini, tiap tahun membuka program pendidikan gerak yang lebih dikenal dengan meditasi gerak tersebut. Dan ia menggumuli profesinya itu dengan total. Berbagai deretan jabatan struktural, dari dunia akademik, instansi kebudayaan, dan yang lainnya, ia tanggalkan. Dari padepokannya yang asri dan arstistik dengan aneka tumbuhan dan altar kesenian di dalamnya, lelaki beragama Budha ini sudah menancapkan eksistensinya di sana. Di rumahnya yang tak kalah arstistik, reporter BALAIRUNG: **Harry Prabowo, Asip A.H.,** dan **Lais Abid** menemui "begawan" yang kontroversial dari Padepokan Lemah Putih ini. Ia bicara masalah proses kreatifnya, agama, kesenian, kebudayaan, sampai masalah filsafat hidupnya.

Ngomong-omong, bagaimana proses kreatif Anda muncul, apakah sebagai ekspresi traumatik atau karena murni pergulatan yang panjang?

Istilahnya bukan trauma, karena manusia itu bisa lahir dan ternyata bisa hidup. Maka ada dorongan hidup, jadi kehidupan itu sendiri bukan sebuah trauma. Hal tersebut saya jelaskan karena mendasari seluruh pekerjaan ini. Sehingga bukan bertolak dari satu sisi yang sifatnya ketiadaan atau sebuah utopia. Seorang manusia yang telah lahir dan hidup itu perlu penyaluran keinginan hidup, rasa hidup, dan ingin selalu mentransformasikan potensi hidupnya untuk menuju pada hal yang lebih baik, masalahnya itu saja. Waktu saya berkecimpung di Pusat Kebudayaan Jawa Tengah di Sasana Mulya, Sala, di tahun 70-an, muncul keinginan yang menstimulasi saya untuk mengekspresikan keinginan hidup saya lewat gerak yang sebenarnya. Sudah sejak lama saya pergi ke gunung, sungai, biara, sehingga ada satu titik di mana keinginan bergerak itu bisa disalurkan dalam dunia kesenian.

Tetapi kalau dicermati bentuk gerak yang Anda tampilkan tidak mengikuti bentuk seni yang mapan, seperti tari yang sudah ada pakemnya misalnya

Nah, masalahnya pada waktu itu ada tarikan ke arah dua kutub yang berlawanan, ke tradisi atau ke tari modern, seperti aliran karya Sardono dsb. Keduanya sebenarnya pada waktu itu tidak bisa

saya pelajari semuanya, karena sebenarnya ada hal-hal yang secara naluri tidak bisa, dan kalau belajar tari modern harus pergi ke luar negeri. Sehingga ada gagasan, apakah tidak mungkin dalam penciptaan bentuk gerak seni itu kita kembali kepada dasar bahwa manusia yang baru lahir atau sebelum lahir itu sudah bergerak.

Untuk merealisasikan dasar itu?

Kemudian dari sana saya belajar bagaimana manusia memulai tidur, berjalan dan berkomunikasi. Dari sanalah kita akan mengerti perubahan gerak, dari sana kita mengerti potensi-potensi dan kendala apa yang ada. Ada daya hidup yang menggerakkan. Dan perjalanan itu sangat individual, jadi orang belajar mencari sendiri, melakukan penggalian-penggalian, atau istilahnya eksplorasi. Kemudian saya mencoba mencari pikiran-pikiran yang sifatnya sangat esensial. Dan ide itu harus tercermin dalam konteks kehidupan atau aktifitas sehari-hari. Sementara orang lain memakai pakaian yang sudah mereka kenal. Kalau saya berangkat dari bayi lahir itu. Saya mencoba mencari desain pakaian saya sendiri. Bagaimana saya harus mencari materi-materi dan bahan-bahan untuk mendesain pakaian saya sendiri. Jadi konteksnya bagaimana kita menyadari keberadaan kita dalam kenyataan untuk mengembangkan potensi hidup kita. Tetapi semua masih menilai bahwa saya tetap mempunyai sifat komunal.

Lantas sejak kapan Anda menemukan bentuk gerak alam sebagai alat atau media seni?

Sebenarnya potensi itu sudah ada pada diri bayi yang baru lahir itu. Kebudayaan kita mempunyai pengetahuan transformasi manusia dengan unsur-unsur alam. Dalam dunia pewayangan ada tokoh-tokoh sebagai metafor dari alam; semua itu mempunyai metafor nilai-nilai alam. Nah anda yang hidup di zaman sekarang tidak mengenal itu lagi, karena yang anda kenal sekarang tinggal sumber daya manusia saja. Kalau tidak hati-hati kita akan terlepas dari keillahian, karena saking gencarnya menggalakkan sumber daya manusia. Dan kita hendaknya jangan lupa bahwa alam bukan sekedar materi, tetapi alam juga mempunyai eksistensi. Jadi jangan hanya sumber daya manusia saja tetapi juga sumber daya alam. Ini sangat penting untuk memahami konteks ketuhanan. Saya baru belajar mengarah ke sana, ke pikiran-pikiran Tuhan.

Asip A.H.

Kalau begitu Anda sudah menangkap konsep keagamaan. Bagaimanakah konsep Anda tentang agama?

Yaitu pikiran-pikiran Tuhan. Saya baru menapaki sedikit demi sedikit. Kalau orang Jawa, Tuhan itu umumnya, kan, *Gusti kang murbeing dumadi*. Artinya, Tuhan yang mengelola semua yang terjadi di alam. Tuhan Maha Penyayang. Tuhan Maha Pengasih. Tuhan Maha Pencipta. Tetapi Tuhan Yang Maha Pikir itu saya baru belajar memahami.

Ngomong-ngomong, bagaimana Anda selama ini mendapat pengetahuan, lewat pencarian sendiri atau meguru misalnya?

Buku saya adalah dari *mode show*, buku-buku mode, Kompas, Tempo, perbintangan, atau dialog dengan Anda, misalnya. Dari saya merenung malam hari, atau istilahnya *lingsir wengi*, atau semua saja. Itu istilahnya buku, Mas....

Buku yang sebenarnya. Pendekatan saya memang bagaimana belajar dalam kehidupan ini, bukan belajar hidup dilihat dari universitas. Memang perguruan tinggi merupakan salah satu usaha yang sangat berharga untuk memberi bekal dalam kehidupan yang sebenarnya, tetapi itu hanya salah satu bagian dari hidup ini. Buku-buku itu pun adalah referensi atau acuan berpikir untuk mengetahui segala sesuatu dan yang penting bagaimana memasuki energi hidup itu sendiri, hidup sebagai manusia di alam ini. Jadi kita istilahnya bukan hidup di menara gading atau salon; bagus tetapi tidak bisa dijamah, atau tidak kontekstual, tidak kena hawa. Di dalam hidup ini kita harus kena hawa. Sehingga ada faktor materialisasi dari sebuah abstraksi atau bayang-bayang. Kalau hanya belajar dari buku maka yang ada hanya abstraksi terus, Mas.....

Selama ini apa yang mempengaruhi perjalanan kehidupan Anda. Adakah orang lain yang" menggerakkan" perjalanan hidup Anda?

Yang menggerakkan hidup saya adalah keluarga. Itu pasti. Hal ini jangan dianggap enteng. Karena dari sebuah sistem itu mempunyai kosmologi tersendiri. Di sana terjadi kemapanan dan perubahan nilai. Istri, anak, dan tetangga, akan bicara sangat keras kalau ada perubahan yang tidak mengenakkan mereka. Artinya, itu sebuah fenomena yang harus diperhatikan.

Asip A.H.

Jadi itu yang menggerakkan kehidupan Anda....

Asip A.H.

Salah satunya. Tentu ada nilai-nilai saya sendiri sebagai individu. Yaa, itu, pencarian-pencarian hakekat kehidupan, misalnya di candi, latihan-latihan tentang *sumeleh*. Khazanah Jawa yang paling bagus adalah *sumeleh* . *Sumeleh* itu lain dengan *mopo. Sumeleh* itu adalah suatu kondisi yang obyektif. Dari sana tumbuh sikap menerima. Istilahnya bukan *nrimo* yang jelek itu. Menerima itu adalah menerima fakta. Kalau sekarang banyak ditulis kalau kita bukan sekedar menyuarakan tetapi juga mendengarkan. Itu nilainya sama dengan menyuarakan, bahkan justru lebih penting mendengarkan, sebab dengan begitu kita memasuki kondisi re-evolusi. Itu yang saya katakan kepada murid-murid saya.

Sebelum Anda *treatment*, Anda harus *re-treat* dahulu, dalam arti kita harus sumeleh, menerima secara obyektif untuk menangkap segala getaran. Untuk itu saya harus datang ke pasar, gereja, pusat kebudayaan. Itu hanya sekedar pelatihan untuk memberi pengalaman. Jadi ada *peng-alaman* tidak hanya peng- etahuan.

Dari *peng-etahuan* kita harus bisa menjadi *pengetahuan*. Dari sebuah elemen bagaimana diproses menjadi tahu. Dari tahu diberi elemen menjadi sebuah pengalaman. Pengetahuan memerlukan materi untuk mentransformasikannya.

Bagaimana pendapat anda tentang kebudayaan?

Ada yang penting untuk dipahami perihal sikap kita terhadap kebudayaan kita sendiri. Selama ini kita hanya memahami kebudayaan kita sebagai kebudayaan adiluhung, dan menyikapinya hanya sebagai warisan nenek moyang, bukan sebagai kekayaan kita sendiri. Bila kita hanya sebatas pengertian warisan, maka jadinya dengan mudah kita akan menggadaikan kebudayaan itu, menjual kepada wisatawan asing melalui pariwisata. Akan tetapi kalau pengertian kebudayaan itu sebagai kekayaan, maka kita akan memproduksinya, mengolahnya untuk kekayaan kita sendiri, dan tidak akan sampai tergadaikan karena kita memilikinya sebagai

Bukan *sekedar* Pertunjukan

ONSEP "tari" yang dirintisnya selama 12 tahun pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan seniman, terutama seniman tari. Gerak tari ciptaannya memang tidak lazim. Dia tidak terikat oleh pakem-pakem tari layaknya tari tradisional Jawa. Orang-orang ada yang menyebutnya "gerak bebas", "gerak dalam meditasi", atau "gerak spiritual". Konsep tari Suprapto dapat dikatakan sebagai sebuah dekonstruksi atas tari konvensional. Sebagai pembanding dapat diajukan kredo puisi Sutardji Calzom Bachri yang mengembalikan kata kepada kata dengan melepaskannya dari belenggu makna. Sementara Suprapto mengambalikan tari kepada muasalnya, gerak murni, dengan melepaskan diri dari dasar-dasar tari yang selama ini menjadi anutan umum.

Ketika ditanya apa sebenarnya nama "tari" yang dirintisnya itu, dia menjawab, "Namanya Gerak atau Tari Amerto. Baru tahun ini saya mendapatkan nama yang tepat," seraya tertawa *ngakak*. "Dan Gerak Tari Amerto ini tetap berpijak pada dan justru berangkat dari nilai-nilai kebudayaan bangsa, terutama kebudayaan Jawa," lanjutnya.

Selama kurang lebih satu bulan BALAIRUNG menguntit seniman satu ini bersama murid-muridnya dalam salah satu program *The Liberation of Sukuh Pyramide*. Setelah beberapa kali wawancara, maka disini diberikan sedikit paparan ringkas tentang Gerak Tari Amerto ini.



Asip A.H.

kekayaan. Ini yang harus kita pahami!

Yang terakhir, apa yang menjadi menjadi filsafat hidup Anda?

Saya ini secara teknisnya belajar tentang perubahan, atau proses bagaimana saya mampu hidup dalam perubahan serta melihat perubahan itu. Seperti Anda bermain cano di air jeram. Anda harus melihat perubahan apa yang terjadi dalam sungai itu, umpamanya. Tetapi mau ke mana dan filsafatnya apa, Itu saya masih sangat Jawa; meletakkan kepada *ancering sangkan paraning dumadi.* Dari *sangkan paraning*, jadi dari mana dan ke mana. Dari satu titik ke titik lain. Ke titik mana saya itu meletakkan diri kepada kehidupan. Itu kelihatannya bisa dimengerti, tetapi juga memerlukan bahasa tubuh. Tubuh itu juga akan hancur, pikiran bisa berubah, perasaan itu juga bisa berubah. Tetapi itu semua juga menjadi satu landasan menuju ke *sangkan paraning dumadi*, dengan cara, saya tahu juga ungkapan Jawa *Memayu hayuning bawono*, itu istilahnya. Tetapi ungkapan itu terlalu besar. Saya menyebutnya *memayu hayuning ngaurip*, filsafat pokoknya itu, lainnya hanyalah teknis saja, atau masalah yang terkondisi. Jadi bukan hanya kehidupan manusia saja tetapi juga kehidupan alam dan keillahiahan. Mengapa saya suka istilah Jawa *memayu hayuning ngaurip*, itu karena kita kadang kontradiktif, *memayu hayuning ngaurip* tetapi *dienggo*, sekti tetapi *nggo-nindas.* Yang kuat yang menang. Saya tidak melihat kebaikan itu mengalahkan kejelekan. *Memayu hayuning ngaurip* itu tidak melihat kejelekan sebagai suatu yang dikalahkan kebaikan. Tetapi bagaimana kita yang jelek itu bisa merubah menjadi baik. Bukan mengalahkan yang jelek, bukan mengalahkan yang salah.

Asip A.H., Hary

Asip A.H.

Para cantrik padepokan Lemah Putih

Suasana keluarga dan menyatu dengan alam adalah inspirasi gerak

"Amerto" kurang lebih berarti "hidup". Gerak Amerto adalah gerak manusia yang hidup, selalu berubah, dan seirama alam. Suprapto memilah gerak ini menjadi empat: *obah, polah, solah, dan joget*. Yang terakhir ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah mampu merasakan manusia, alam, dan Tuhan sebagai "lahan". Selanjutnya keempat gerak itu diolah melalui tujuh unsur tahapan. *Pertama,* "proporsi", yang memiliki beberapa tahapan, yaitu mengukur jarak, mengukur tinggi rendah, mengukur besar kecil, dan mengukur waktu. Tahapan ini membawa pada kesadaran tiga-dimensi yang menimbulkan rasa utuh dan merdeka. *Kedua* adalah unsur "adaptasi" yang berarti menyesuaikan diri dengan alam yang selalu berubah.

Pada unsur *ketiga* adalah "komunikasi" yang memberikan latihan berhubungan dengan lingkungan sekitar, sesama manusia, dan alam. Unsur *keempat* adalah keseimbangan dengan berlatih menjaga keseimbangan dalam setiap gerak tubuh dan jiwa. Pada tahap *kelima,* "merancang pola", adalah latihan eksplorasi gerak masing- masing individu dimana gerak dianggap sebagai pakaian. Selanjutnya latihan mengenali "pakaian gerak" yang paling cocok dengan individu sebagai unsur *keenam*,"karakter" Terakhir adalah unsur "sintesis" yaitu "pengolahan, memasak" seluruh unsur dan potensi total manusia untuk "membersihkan", "mengkristalkan", "pencerahan", guna mendapatkan "wahyu", "pelajaran".

Sebagai sumber inspirasi Gerak Amerto -- yang diharapkan bisa juga terefleksi pada perilaku sehari-hari -- ada lima, yaitu "omah" atau "rumah". Disini suasana rumah, suasana dalam sebuah keluarga sebagai inspirasi. Kemudian "sanggar"; manusia selalu berada dalam sanggar, selalu belajar. Sumber ketiga adalah alam; ketidakterpisahan antara manusia dan alam. "Besalem" yang bisa berarti tempat atau . semangat kerja, semangat berkarya. Yang kelima "panggung"; manusia selalu berada dalam "radius indera" lingkungan sekitarnya, manusia selalu diindera oleh manusia lain dan alam.

Menurut penciptanya, Gerak Amerto adalah sebuah "proses" dari manusia, alam, dan Tuhan. Proses ini juga sebagai "lahan ungkapan". Inilah yang membedakannya dengan seni pertunjukan lain, dimana "proses" dikemas sedemikian rupa untuk dipertunjukkan. Pengalaman akan manusia, alam, dan Tuhan hanya dituangkan dalam porsi hubungan manusia dengan manusia. Sedang dalam Gerak Amerto, pertunjukan adalah bagian dari proses itu sendiri. "Saya lebih tertarik pada pengembangan tingkah laku, bukan hanya menyajikan seni," ujarnya.

"Dan saya ini guru yang kesepian," kelakar serius Suprapto yang hampir sepanjang waktu mengajarnya hanya berhadapan dengan murid-murid bule.

Asip AH dan Kurniawan

Terulangnya SEBUAH Musibah

Agaknya, pembatalan SIUPP untuk ketiga majalah dan tabloid baru-baru ini merupakan musibah yang lebih mengejutkan daripada gelombang Tsumani. Mempertimbangkan reputasi majalah sekelas Tempo yang tenar tidak hanya secara nasional namun juga internasional, tindakan pemerintah yang bersitegang mencabut rohnya barangkali mempunyai dasar yang dipertanggungjawabkan.

Mengikuti penjelasan Dirjen PPG Deppen Drs. Subrata di depan para wartawan, kiranya masih diperlukan presisi lanjut gerangan apakah musababnya sehingga ketiga penerbitan harus terkubur.

Sementara pihak ada berspekulasi bahwa sebetulnya keseluruhan dari ketiga majalah tersebut dibatalkan SIUPP-nya lebih karena faktor substantif dan bukan semata-mata karena alasan administratif sebagaimana diberlakukan untuk Editor dan Detik. Kalau benar faktor administratiflah yang menjadi pertimbangan, sepatutnya pemerintah lebih bersabar dengan menanti dan mendesak agar kedua-duanya lekas membereskan kekurangannya. Pada Tempo tampak persoalannya lebih transparan, ia ditindak atas alasan substansial; akan tetapi sudut dan belahan substansi mana telah sunggung-sungguh menggusarkan pemerintah, juga tak jelas yang diharapkan orang. Kalaupun ia dipandang telah melanggar kepentingan umum atau mengguncangkan stabilitas nasional, masih perlu dibuktikan bersama apakah sinyalemen itu menemukan validitasnya. Rumusan dan



Slamet Sutrisno

penafsiran kestabilan nasional dan kepentingan umum agaknya akan menyempit jika ia hanya dilakukan hanya unsur kepemerintahan berhubung masalah besar itu seharusnya menjadi keprihatinan dan urusan bersama.

Kerumitan lain dari mencermati keterangan Dirjen PPG adalah penunjukannya pada alasan yuridis untuk tindakan-tindakan yang amat tegas itu, dan pegangan



kepentingan untuk dasar hukumnya adalah (hanya sebuah) Permen, ini pasti bukan sembarang permen kalau dengan menelannya tiga penerbitan terkemuka harus mati secara serentak.

Secara aktual dapat dipersoalkan bukanlah sebuah permen yang semestinya mengatur hanya urusan teknis-administratif, sementara mencabut ruh penerbitan adalah soal prinsipil. Secara hulunya akan lebih mengandung diskrepansi yuridis-konstitusional, sementara eksistensi pers dijamin oleh sebuah pasal dalam UUD akan tetapi ternyata ia bisa dimatikan hanya oleh sebuah permen. Mereka yang awam hukum boleh pusing sembilan keliling oleh kenyataan tersebut, bolehlah agak bertanya apakah peristiwa itu merupakan upaya penegakan hukum atau pengukuhan sepetak kekuasaan. Bisa dimaklumi jika Rosihan Anwar (Prisma, Oktober 1977) pernah berkata: "Orang yang memegang kekuasaan memang bisa selalu tergoda oleh rasa tidak percaya diri".

Pembatalan SIUPP, pencabutan Surat Izin Terbit (SIT) atau pembreidelan, esensinya adalah serupa sehingga betapapun peraturan perundang-undangan berulang kali disusun beramai-ramai dengan memakan ongkos yang tidak sedikit, selama ia memungkinkan sebuah koran ditutup oleh pemerintah maka pasal 28 UUD 1945 terus memerlukan pemahaman lebih mendalam. Sejarah dicantumkannya -- antara lain -- pasal 28 tersebut menyertakan perdebatan keras antara bapak pendiri negara. Soekarno semula menolaknya sesuai dengan alam pikiran keindonesiaan, akan tetapi Mohammad Hatta akhirnya berhasil meyakinkan sehingga dalam UUD '45 ada tercantum hak-hak asasi warga negara. Hal itu tidak harus berarti adanya muatan individualisme dalam konstitusi negara, melainkan semata-mata dikehendaki agar kekuasaan negara tidak bertumbuh menjadi absolut (Pranarka, 1985).

Dalam kerangka suasana kebatinan disusunnya UUD'45, terdapat empat pokok pikiran sebagai sokogurunya dan salah sebuah diantaranya adalah: *"Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan"*. Bung Hatta (1977) sebagai Ketua Panitia Lima yang diserahi 'wewenang' untuk menyusun penafsiran atas Pancasila menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sila keempat dalam Pancasila tak lain adalah demokrasi. Maka itu, Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi sebagai sebuah prinsip di samping ketiga prinsip lainnya dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD, adalah *lebih tinggi* daripada pasal-pasal UUD'45. Salah sebuah bentuk kelembagaan yang mengekspresikan prinsip Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi itu tak lain adalah pers.

Sudah barang tentu demokrasi pun -- termasuk di situ pers -- mesti dibatasi guna mencegah timbulnya anarkisme dan ketakberadaban. Dalam rangka menyusun pembatasan itu, sebuah Undang-Undang yang dibentuk seharusnya mampu menuntun gerak-gerik pers ke arah daerah perbatasannya sendiri. Begitu rupa sehingga sintesis diantara batas eksternal (Undang-Undang/Falsafah Negara) dan batas internal (Kode Etik) secara pandai-pandai bisa tercapai oleh kalangan pers sendiri.

Dalam keperluan akan perbatasan dan pembatasan tersebut Driyarkara (1980) secara lebih eksplisit mengatakan: *"Pers adalah kultivasi atau bentuk yang dikultivir dari kebebasan berpendapat dan menyiarkannya. Sebab itu kebebasan pers adalah tabiat yang ada pada pers. Pers yang tidak bebas, bukan lagi pers yang sejatinya, melainkan penipuan dan pemalsuan ... Adakah batasan kebebasan pers? Ada, tetapi harus dari dalam. Adanya kode, adanya macam-macam konvensi yang tertulis atau tidak tertulis untuk menyelenggarakan pers yang baik, yang berstanding, adalah batasan dari dalam. Tetapi batasan dari luar, yang dipaksakan oleh negara karena tidak mau kritik, karena hendak menindas pendapat lain, adalah penginjak-injakan bidang kultur yang kita sebut pers itu."*

Pers yang tidak bebas, bukan lagi pers yang sejatinya, melainkan penipuan dan pemalsuan ... Adakah batasan kebebasan pers?

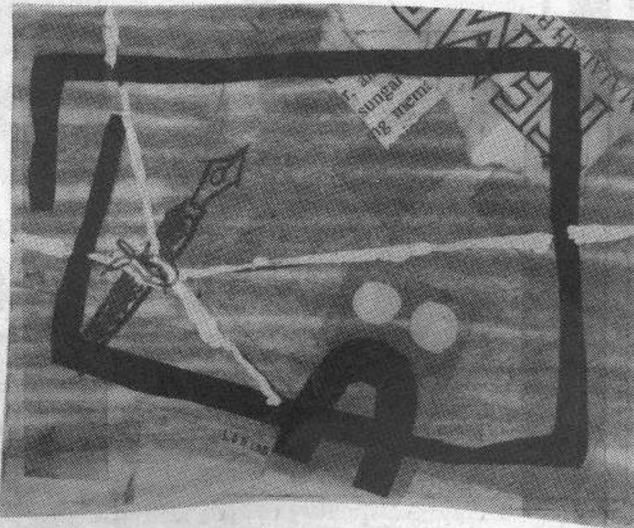
Selain sebagai peranannya sebagai corong demokrasi, pers adalah forum pendidikan nonformal terpenting yang amat kuat daya upayanya bagi mencapai salah sebuah tujuan nasional, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu secara faktual sejumlah pers Indonesia telah dengan setia penuh ketekunan menyajikan menu epistemik dan tualang pikiran (di samping sejumlah lainnya yang lebih menyodorkan segi-segi sensualitas). Secara tak berlebihan pers telah membuktikan diri selaku institusi yang bertanggung jawab bagi penguatan ketahanan nasional, menghindarkan predator- predator budaya yang kini berkeliaran di seputar diri kebangsaan.

Jika dikatakan sebuah penerbitan telah melanggar kepentingan umum, pernyataan itu bisa sekabur pernyataan yang sebaliknya, bahwa "dimana-mana pers bekerja untuk kepentingan umum." Wonohito (1977) menyatakan bahwa "Apa yang dianggap kepentingan umum, ditetapkan oleh falsafah bangsa, maka itu segala apa yang bertentangan dengan Pancasila tidak *Fit to Print.*" Secara demikian kebebasan dan tanggung jawab pers Indonesia pasti lain versinya dengan kebebasan dan tanggung jawab pers libertarian dan pers komunis.

Pertanggungjawaban pemerintah untuk menindak penerbitan pers, dengan begitu perlu disertai pembuktian -- kualitatif maupun kuantitatif -- bahwa korban-korban peraturan tersebut sungguh telah membahayakan, umpamanya, sekuriti negara-bangsa. Baru sesudah diterima oleh akal sehat bersama bahwa sebuah penerbitan melampaui perbatasan kebebasannya, entah falsafah negara, Undang- undang maupun kode etik, maka bolehlah ia ditindak atau dibekukan kehadirannya -- untuk sementara saja. Pada hemat penulis intansi penindak penyimpangan pers seharusnya Jaksa Agung, untuk kemudian pers yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada PTUN atau Mahkamah Agung.

Dus, ada batas falsafah (Pancasila), batas moral (Kode Etik) dan batas yuridis (Undang-undang) dalam kehidupan pers, dan koran mana pun yang melampauinya adalah koran yang tak tahu tanggung jawab. Sebaliknya untuk menindak, apalagi mencabut ruh bagaikan dewa Yamadipati, terhadap pers tertentu sejauh tidak terbukti melanggar ketiga daerah perbatasan itu, adalah tindakan yang kurang bertanggung jawab. Pertimbangan subyektif, misalnya yang mengganggu aura kepenguasaan, untuk menindak pers bukan merupakan jenis pertimbangan yang sehat. Lebih-lebih pers harus menjadi *avant guard* dalam pengikisan sisa-sisa mental keterjajahan dan feodalisme, bagi kebutuhan kita untuk memajukan perikehidupan kebudayaan bangsa.

Bahkan, pembangunan pun agaknya bukan merupakan sebuah alibi bagi tindakan sepihak mengurangi kemerdekaan pers nasional. Dahulu Soekarno memang pernah berkata: "*Saya dengan tegas menyatakan sekarang bahwa dalam suatu revolusi tidak boleh ada kebebasan pers. Hanya pers yang mendukung revolusi yang dibolehkan hidup. Pers yang bermusuhan terhadap revolusi harus disingkirkan*". Jika kata "revolusi" dalam pernyataan Soekarno kemudian



digantikan dengan "pembangunan" hal ini akan berarti dikembalikannya kondisi ke masa silam tatkala pembangunan sering dianggap telah bermimikri menjadi ideologi.

Edward C. Smith (1986) mencatat bahwa: "Tekanan terhadap pers telah memberikan ciri kepada Indonesia selama ada pers di kepulauan ini -- bahkan lebih lama. Tekanan itu dimulai dengan larangan terhadap usaha pertama oleh masyarakat kolonial untuk memulai penerbitan surat kabar pada 1712". Ia juga mencatat: "... selama beberapa tahun terakhir jaman Soekarno pers pada dasarnya, sudah dikontrol pemerintah, dan harapan bagi kebebasan pers sama sekali lenyap".

Orde Baru pantas membuktikan bahwa catatan Smith tidak mengandung kebenaran bagi seluruh masa sejarah Indonesia selebihnya, karena Orde Baru itu sendiri adalah, dikatakan pada masa awalnya, "pengembalian tatanan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945". Penulis mufakat bila terhadap seruan Menpen H. Harmoko bahwa semua pihak harus intropeksi menjawab pertanyaan wartawan tentang dibatalkannya SIUPP ketiga media massa. Sekali lagi, *semua pihak!*

Penulis adalah staf pengajar Fakultas Filsafat UGM.

...pembangunan pun agaknya bukan merupakan sebuah alibi bagi tindakan sepihak mengurangi kemerdekaan pers nasional.

Tanah DAN Akar Ketegangan Sosial

Geliat pertumbuhan pusat-pusat perdagangan, telah membuat mereka yang masih berfikir gaya agraris tak kuasa menjalankan sel-sel otaknya buat mencerna gejala yang berlangsung. Kita menyaksikan sendiri, bahwa hanya dalam sekejap, sebuah desa "disulap" menjadi metropolitan. Gubuk-gubuk reyot menjelma menjadi apartemen-apartemen mewah, hotel berbintang, dan pusat-pusat belanja yang menyediakan barang-barang manca negara.


Atmo Suwito RS.

DALAM keadaan yang demikian, masyarakat sudah bisa diduga bakal terpecah menjadi dua bagian besar: .pertama, pihak yang dengan penuh kegembiraan menyongsong datangnya "kemajuan" tersebut. Yakni mereka yang bisa bergembira karena apa yang dihasilkan oleh laju pembangunan tersebut betul-betul menjawab kebutuhan mereka, baik dari segi material maupun non-material. Masyarakat golongan ini adalah mereka yang bakal mengisi pusat hunian bergengsi, seperti Pondok Indah, kawasan Bumi Serpong di Jakarta, Puri Gejayan Indah di Yogyakarta, dan lain- lain. Mereka memiliki rasa aman yang kuat, sebab akses terhadap tanah terjamin, meskipun harga tanah melambung di atas rasionalitas. Sebagai ilustrasi, di Jalan Sudirman Jakarta tanah naik dari 1,8 juta rupiah per meter persegi tahun 1988 menjadi 3 juta rupiah per meter persegi tahun 1989, dan dari 5,5 juta rupiah per meter persegi naik menjadi 6 juta rupiah per meter persegi pada 1992. Beriring dengan lonjakan harga tanah di pusat-pusat perdagangan, perkantoran dan hunian elit, ekspansi golongan pertama ini dalam penguasaan lahan-lahan strategis (baca: pertanian) juga makin meluas.

Kedua, pihak yang bakal menjadi penonton di tengah hingar-bingar

"kemajuan", yang hanya mampu "menyesali nasib" di atas perubahan yang tidak mereka pahami dan di luar kuasa mereka untuk mengendalikannya. Sebagian dari mereka adalah pihak yang disebut-sebut sebagai golongan yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan penghasilan di bawah Rp. 500/hari. Akses mereka terhadap tanah juga lemah. Beberapa fakta yang bisa dikedepankan antara lain di Cirebon misalnya, setiap tahun tak kurang dari 150 hektar lahan pertanian beralih fungsi. Begitu juga di Jawa Timur, yang setiap tahunnya kehilangan 20% lahan pertaniannya (Republika, 11 April 1994). Pihak kedua ini, boleh dikatakan tak punya garansi atas kepemilikan tanah mereka, yang sewaktu-waktu dapat "dibebaskan" bila "tangan-tangan pertumbuhan ekonomi" menghendakinya.

Gejala polarisasi tersebut, tentu saja merupakan potensi instabilitas yang tak bisa diabaikan begitu saja. Sebab, ia bukan saja bakal menghasilkan gerak sejarah yang bertentangan dengan apa yang kini berlangsung, juga sangat mungkin melahirkan desintegrasi nasional. Pada sisi lain, tetap berlangsungnya kondisi tersebut kiranya merupakan fakta yang bakal mendelegitimasi doktrin-doktrin politik yang menjadi spirit pembangunan. Persoalannya kini, mengapa proses tersebut terus berlangsung dan belum ada tanda-tanda yang mengarah kepada perubahan?.

Tanah: Sejarah Tanpa Perubahan

Bukan sebuah slogan bila dikatakan bahwa sejarah tanah adalah sejarah tanpa perubahan. Dari jaman raja-raja, kolonialisme Belanda, fasisme Jepang, pemerintahan Soekarno, hingga kini, masalah tanah terus aktual dan senantiasa menjadi titik-titik rawan dalam stabilitas politik. Pada jaman raja-raja dahulu, masalah tanah timbul ketika para raja melakukan akumulasi penguasaan tanahnya dengan jalan merebut daerah-daerah baru dan menindas para pemilik tanah di daerah pendudukannya. Perang antar kerajaan, pada dasarnya adalah perang perebutan tanah, di mana rakyat hanya menjadi penonton dan sekaligus korban: terlepas dari apakah penguasanya yang menjadi pemenang pertempuran atau tidak.

Pada jaman penjajahan Belanda praktis yang berubah hanya tata distribusi hasil-hasil pertanian atau tata perdagangan dan konfigurasi kekuasaan politik. Sikap Belanda sebagai kekuatan kolonial kiranya sama dengan para bangsawan sebelumnya yang begitu ekspansif dalam mengambil alih tanah dan mengeksploitasi pemilik tanah yang sah: kaum petani. Berbagai aturan dibikin oleh Belanda, baik yang dibuat secara sendiri (dan sepihak) maupun yang disusun bersama para raja, berinti pada kebijakan: mempersempit akses rakyat terhadap tanah dan memperluas peluang mereka (golongan elite) untuk menguasai tanah dalam jumlah yang sangat besar. Pada waktu itu penguasaan tanah untuk perkebunan diproyeksikan melayani dinamika perdagangan hasil bumi internasional, seperti tebu, lada dan hasil rempah-rempah yang dibutuhkan pasar dunia.

Apa yang terjadi dalam masa pemerintahan nasional (baik di masa pemerintahan Soekarno maupun Suharto), kiranya tak bergeser jauh. Secara struktural situasi persoalan tanah tetap hanya di tingkat konfigurasi politik dan beberapa kebijakan strategis, orientasinya bergeser.



Jika kita menganggap bahwa segala aturan tentang tanah amat bergantung kepada kekuatan dominan yang menentukan di dalam konstelasi politik nasional, maka dewasa ini kita melihat bahwa orientasi kekuatan dominan itu lebih menekankan berlangsungnya perbaikan kehidupan ekonomi (paradigma pertumbuhan), tanpa harus mengadakan perombakan struktur sosial dan ekonomi, termasuk dalam hal pemilikan tanah. Hal ini juga yang mungkin bisa menjelaskan mengapa di tingkat implementasi, UUPA/1960 selalu macet. Bahkan kerap kali kita diperlihatkan munculnya aturan-aturan yang justru "*menyerimpung*" ruang gerak dari UUPA/1960.

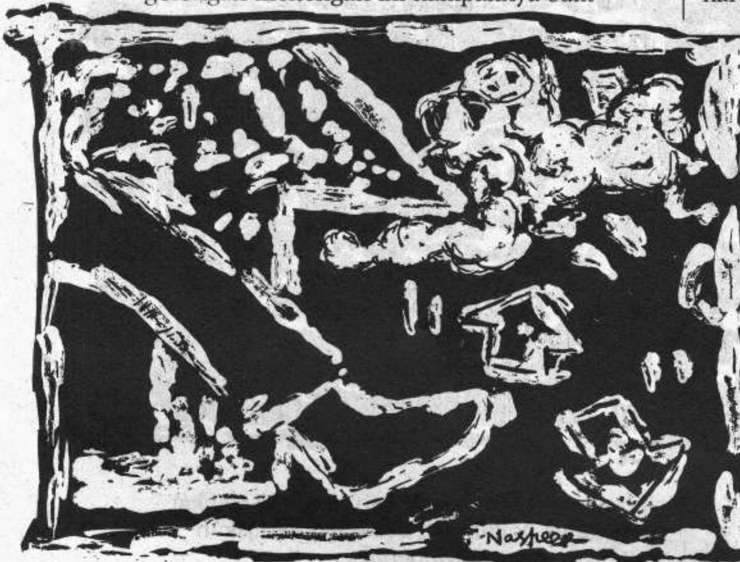
Ketegangan Sosial

Kini persoalan tanah kian akut, terutama karena dua hal: *pertama*, masih kuatnya ketergantungan sebagian besar masyarakat kita terhadap tanah sebagai faktor produksi. Kendati sektor industri telah menjadi kekuatan baru dalam mendorong gerak laju pembangunan nasional, namun secara riil peran sektor industri hanya di tingkat konstribusi pada PDB (21%), yang telah mampu menggeser posisi sektor pertanian (18%).

...masalah tanah timbul ketika para raja melakukan akumulasi penguasaan tanahnya dengan jalan merebut daerah-daerah baru dan menindas para pemilik tanah di daerah pendudukannya...

Akan tetapi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian tetap menjadi tumpuan utama (60%).

Kedua, dijadikannya tanah sebagai penyangga akumulasi kapital dan ajang investasi oleh golongan menengah (para konglomerat). Rencana pembangunan pabrik gula terbesar di dunia, yang dimotori oleh *Salim Group* bekerja sama dengan *Malaysia's Robert Kuok*, yang akan membebaskan tanah seluas 25.000 hektar (The Jakarta Pos, 13 April, 1994), merupakan contoh nyata bagaimana kekuatan golongan menengah dalam menguasai tanah. Besarnya akses golongan menengah ini nampaknya sulit



dibendung, sehingga kerap kali kita terpaksa menyaksikan bagaimana masyarakat bawah terpaksa menyingkir dari tanah leluhurnya, manakala golongan menengah menghendakinya.

Dua hal tersebut memang menjadi titik rawan yang amat potensial membangkitkan ketegangan sosial. Berbagai peristiwa yang belum lama berlangsung, apakah itu kasus Nipah, Kedung Ombo, Haur Koneng dan lain-lain, sesungguhnya merupakan modus yang sama, yakni mereka yang menggantungkan hidup dari tanah harus tergusur akibat investasi yang ditanamkan di sana. Dari penghalaman kasus tersebut kita mendapatkan dua pelajaran:

...peraturan tentang tata pembebasan tanah lebih merupakan antisipasi agar tak muncul gejolak dan bukan menjawab akar permasalahannya: adanya penggusuran itu sendiri.

Pertama, penanam investasi senantiasa dilihat sebagai *hero* dalam menyumbang devisa maupun menyediakan lapangan kerja. Kedua, rakyat (pemilik tanah) selain posisi tawarnya lemah, ia juga selalu dijadikan bahan kecurigaan. Apa yang dilukiskan sebagai ketegangan sosial, dalam banyak kasus diidentikkan dengan bangkitnya resistensi rakyat terhadap kebijakan yang sewenang-wenang, bukan sebagai ulah para investor yang mengabaikan hak-hak kaum lemah. Resistensi rakyat kendati berada dalam jalur konstitusional, dinilai sebagai hal yang negatif, karena itu harus ditiadakan atau diminimalisasi.

Imbas pandangan kedua ini, memang memberikan warna cukup penting dalam berbagai peraturan dan pengaturan pemilikan tanah. Proses alih fungsi lahan atau penggusuran dilihat sebagai sesuatu yang sudah selayaknya ada. Tak ada lagi pertanyaan kenapa harus ada alih fungsi atau alih kepemilikan tanah; kenapa harus tanah desa A dan bukan desa B; atau kenapa harus di daerah B dan bukan di daerah C; kenapa harus milik saya dan bukan milik *kamu*; dan seterusnya.

Karena itu pula peraturan-peraturan pertanahan (misalnya, Permendagri no. 15 th 1975 yang kemudian digantikan dengan Keppres no. 55 th 1993), lebih mengatur soal bagaimana proses penggusuran berlangsung dan bukan bagaimana agar rakyat bisa mempertahankan hak tanahnya. Pembatasan konsep kepentingan umum, pengaturan soal mekanisme pembebasan yang memasukkan unsur musyawarah, penentuan harga ganti rugi dan sebagainya, pada dasarnya merupakan konsep-konsep yang tidak menolak adanya penggusuran. Hanya saja diharapkan proses penggusuran berjalan secara manusiawi (baca: mulus), tanpa harus diwarnai oleh unjuk rasa atau bentuk-bentuk resistensi yang lain. Artinya bahwa peraturan tentang tata pembebasan tanah lebih merupakan antisipasi agar tak muncul gejolak dan bukan menjawab akar permasalahannya: adanya penggusuran itu sendiri.

Tidak terjawabnya persoalan tanah secara mendasar (baca: struktural), pada dasarnya membuat masalah ini tetap strategis membangkitkan ketegangan ketegangan sosial. Hal ini bermakna bahwa solusi atas permasalahan tanah di masa depan, sesungguhnya tidak sekedar menghadirkan konsep-konsep yang me-"mulus"-kan jalannya penggusuran, tetapi lebih penting lagi, yakni pembalikan perspektif: dari yang melihat penggusuran sebagai hal "semestinya terjadi" menjadi sebaliknya. Dengan pembalikan perspektif ini rakyat tidak melulu dilihat sebagai sumber ketegangan sosial tetapi juga kaum investor yang hanya mengabdi pada akumulasi kapital dan mengabaikan partisipasi maupun hak-hak rakyat.

Atmo Suwito (ketua komisi kajian Forum LSM/LPSM DIY, Pimred Bulettin Kawah dan Direktur The Society for Participatory Reseach Yogyakarta)

Sekarang, Gedung Pusat UGM tak dapat lagi dilihat dari arah selatan, boulevard, karena tatapan mata akan terbentur dengan sebuah bangunan baru. Bangunan Auditorium, yang terhampar di bekas Lapangan Pancasila Satu itu, dibangun sarat dengan konsep arsitektur Jawa.

Auditorium Itu

MENGGUSUR PANCASILA I DAN ARBORETUM

PENDAERAHAN yang mempertegas poros lajur Utara-Selatan dengan latar belakang puncak Merapi yang berawan, seakan memancarkan suasana magis pada sepetak tanah di bumi Ngayogyakarta Hadiningrat ini. Bentuk Joglo Sinom, khas Jawa, yang sarat dengan nilai-nilai filosofis, kiranya semakin menyempurnakan kewibawaan bangunan tersebut. Demikianlah bayangan kemegahan yang segera terpancar pada auditorium milik Universitas Gadjah Mada, yang akan diresmikan menurut rencana bulan November 1994 nanti.

Memang, di usia menjelang 45 tahun ini, wajar apabila kampus UGM berbenah diri. Salah satunya dengan pembangunan gedung auditorium ini.

Bangunan megah yang didanai sekitar Rp. 10 milyar, 70% dari Bank Dunia, ini sudah dirasa perlu kehadirannya sejak tahun 1985. Dimana UGM semakin membutuhkan suatu tempat yang dapat berfungsi ganda untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, seperti wisuda, registrasi, upacara bendera, pertemuan-pertemuan skala nasional maupun internasional, fungsi perpustakaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan alasan inilah kemudian pada tanggal 1 Mei 1993 proyek pembangunan gedung auditorium dimulai pelaksanaannya oleh PT. Waskita Karya.

Auditorium yang berkonsep arsitektur Jawa terletak di pusat kampus dengan urutan hirarki: Alun-Alun (merupakan sisa lahan di depan auditorium), Pendopo (auditorium itu sendiri), Pringgitan (perpustakaan), dan Dalem (ruang administrasi pusat), yang semuanya ini maunya mencerminkan karakter kampus UGM yang kuat kompak, berwibawa, dan monumental. Keberadaan bangunan ini akan menegaskan arah masuk kampus dari pusat kota, yakni poros boulevard kampus ke arah selatan.

Pendaerahan dari kompleks bangunan itu sendiri berurutan dari Alun-Alun, berupa lapangan dan pelataran upacara dengan bentuk lingkaran dan tiang bendera sebagai pusatnya. Penerima tamu (daerah penerima menuju ke auditorium) terletak di tengah, antara auditorium dan Alun-Alun.



KELIK

Pintu masuk kompleks auditorium ini berada di sisi barat dan timur, yang secara umum mengungkapkan konsep pekarangan dan pintu masuk rumah tinggal tradisional Jawa.

Pemilihan joglo sebagai bentuk utama bangunan ini memang tak lebih karena pertimbangan kapasitas orang. Penyusunan tata ruang gedung auditorium berdasarkan fleksibilitas ruang, dimana jumlah pengunjung yang variatif sekiranya dapat ditampung pada ruang yang sesuai dengan kapasitasnya. Disamping itu, joglo dipilih karena latar belakang tradisional Jawa yang sarat dengan nilai-nilai filosofis. Hal ini banyak diwujudkan melalui arti simbolis elemen hias yang ada dalam gedung auditorium tersebut.

Pencapaian ruang utama auditorium memang dirancang agar terkesan monumental dengan menempatkannya pada lantai dua sebelah selatan. Sedangkan pencapaian utama kegiatan ruang sidang pada lantai dasar terletak di bawah pintu utama umum. Pun dapat dicapai melalui jalan samping di selatan bangunan lantai pertama.

Pada kondisi luar bangunan terdapat rencana pengolahan lanskap, yakni rencana penghijauan, meliputi jalan utama, daerah tamu, alun-alun, dan sekitar bangunan. Kemudian rencana pengerasan meliputi taman parkir yang berkapasitas 130 kendaraan, jalan bagi pedestrian, dan pelataran tiang bendera. Sedangkan rencana perabot taman meliputi lampu taman, lampu dinding, tempat duduk. Penghijauan yang hendak dilaksanakan memang memerlukan penanganan khusus, mengingat pohon yang hendak ditanam sebanyak lebih dari 400 batang pohon langka yang tentu saja sulit dalam pengadaan maupun pemeliharaannya. Jenis-jenis yang direncanakan antara lain sawo kecik, pohon merah, pohon tanjung, dan pohon punika.

Antisipasi keamanan atas auditorium ini juga telah direncanakan dengan matang, seperti pemberian pagar di sekeliling kompleks. Sementara jalan Bhinneka Tunggal Ika yang membujur dari

selatan ke utara di depan fakultas Sastra, Ekonomi, dan Sospol akan diberi pintu, sehingga setelah pukul 16.00 atau hari libur akan ditutup.

Kekayaan simbol yang ada pada gedung auditorium tersebut menonjol dalam elemen hias bangunan teras lantai dua. Ukiran tembaga dengan motif logo UGM di bagian tengahnya terletak di bagian tengah, juga mengandung sengkalan arti tahun berdirinya UGM, tahun 1949. Di kanan-kirinya terdapat motif stilisasi dari burung garuda serta bunga teratai. Motif garuda dalam mitologi Jawa bermakna keperkasaan, kejayaan, kebebasan dan kesaktian. Sedangkan motif teratai melambangkan kesuburan. Rangkaian dari motif-motif tersebut secara keseluruhan menggambarkan harapan bahwa UGM harus dapat melahirkan sarjana yang perkasa, dimana intelektualitas serta moralnya mencerminkan kecerdasan yang dilandasi *budi luhur laku utomo* dalam upaya pengabdian memakmurkan bangsa Indonesia.

Hiasan kanan-kiri jalan menuju ruang utama terdapat ukiran motif gaya Yogya dengan stilisasi tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan perlambang kehidupan yang berkembang. Pada pintu masuk kanan-kiri terukir motif pohon hayat dengan bunga tertai serta berbagai bunga dan buah melambangkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Tri Darma Perguruan Tinggi dilambangkan melalui motif pohon hayat dengan ceplok bunga mekar dan *lung-lungan* dengan bunga kuncup, setengah mekar, dan buah. Elemen hias ini terdapat pada pintu lipat. Sedangkan pada setiap sokoguru ada motif *meru* (gunung) atau bumi sebagai tempat berpijak. Motif sorot/praba pada pengeret, dada peksi, tumpang sari, sebagai perlambang kebesaran, kewibawaan dan kemuliaan. Singup bermotif ceplok dengan delapan sudut menggambarkan delapan arah angin, delapan penjuru dunia.

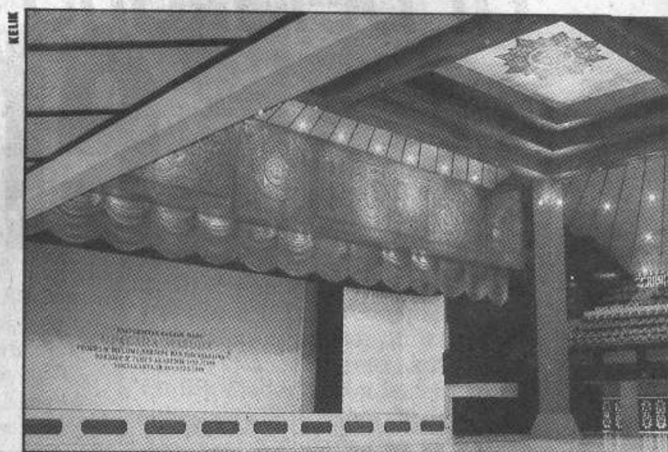
Komitmen UGM pada lingkungan hidup, dimana seluruh aktifitas sivitas akademika selalu berwawasan lingkungan hidup, pun tercermin pada motif kalpataru pada alas panggung dan dinding akustik. Hiasan di atas panggung adalah sengkalan yang berbunyi : *catur kumuda ambuka bawana* (1994), dan *kumuda catur ambuka bawana* (1949). Yang artinya UGM didirikan pada tahun 1949 dan auditorium diresmikan pada tahun 1994.

Pemanfaatan gedung megah ini memang diharapkan untuk kegiatan-kegiatan ilmiah. Menurut kepala P2T UGM, gedung ini nantinya juga terbuka pada pihak-pihak luar yang berniat untuk menyewa. "Mengingat diberlakukannya otonomi perguruan tinggi, tentunya dalam pengelolaan keuangan, maka diharapkan pihak luar ada yang menyewa," ujar Muhammad Munandar kepada BALAIRUNG. Sampai bulan Juli lalu, sudah tercatat ada tiga acara tingkat nasional bahkan internasional. Salah satunya adalah Konferensi Pariwisata dan Kebudayaan, kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss, yang kebetulan OC-nya adalah pihak UGM sendiri. Dan sebagai acara uji cobanya telah dilaksanakan wisuda pada periode Agustus 1994 lalu di auditorium baru. Berkaitan dengan pengelolaan gedung tersebut nantinya akan dibentuk sebuah tim pengelola di bawah Yayasan Pembina UGM.

Walaupun pembangunan auditorium tersebut didasarkan oleh alasan kebutuhan, akan tetapi ada beberapa pihak yang menyatakan ketidaksetujuannya. Seperti yang diungkapkan oleh mantan ketua SMPT UGM, Anies Rasyid Baswedan, bahwa sebuah universitas yang basisnya keilmuan, maka sudah selayaknya apabila fasilitas yang dikembangkan adalah fasilitas yang sifatnya substansial, seperti perpustakaan. Pengadaan buku-buku bermutu relatif lebih berguna daripada pembangunan gedung auditorium yang megah ini. Sehingga pada akhirnya ia sempat mengkhawatirkan apabila auditorium tersebut hanya menjadi sebuah monumen dan simbol kebesaran UGM. Sebuah hal yang tidak relevan dengan kebutuhan sekarang.

Berbeda komentar dari Alvitra Bermana, Ketua Umum KOPMA UGM periode 1994-1995. Ia melihat bahwa pembangunan auditorium ini adalah sesuatu yang realistis. Sebagai proses untuk mengikuti perkembangan yang ada, maka proyek mewah ini tidak mempengaruhi sikap UGM dalam keberpihakannya kepada *wong cilik*. Akan tetapi Alvitra juga berharap, bahwa dengan dibangunnya auditorium ini dengan bilangan milyar tidak semata-mata disewakan pihak luar. Toh seandainya itu dipakai oleh pihak luar, seharusnya ada hubungan timbal-balik bagi UGM.

Nada-nada sumbang pun kiranya bermunculan ketika proyek pembangunan itu mulai dilaksanakan. Isu tentang 'hilangnya' lapangan Pancasila sebagai tempat beraktifitas menjadi kian merebak. Demikian juga dengan lenyapnya arboretum yang dahulu ada. Menanggapi hal ini, Munandar menjelaskan, bahwa telah disediakan tempat yakni lapangan Pancasila Dua, terletak di dekat lembah UGM, sebagai penggantinya. Sarannya, berbagai kegiatan seperti Gama Fair, tempat berolah raga, akan lebih baik bila dilaksanakan di lapangan tersebut. Jawaban yang berkenaan dengan lenyapnya hutan buatan itu, ia menambahkan kalau permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik. Sebagai buktinya pihak kontraktor bersedia menangani penanaman hutan kembali dan telah menyerahkan pemilihan tanaman kepada Fakultas Kehutanan dan Fakultas Pertanian, dua fakultas yang mengelola hutan yang jadi korban sebelumnya. "Inilah komitmen UGM terhadap lingkungan hidup," tegas pak Munandar.

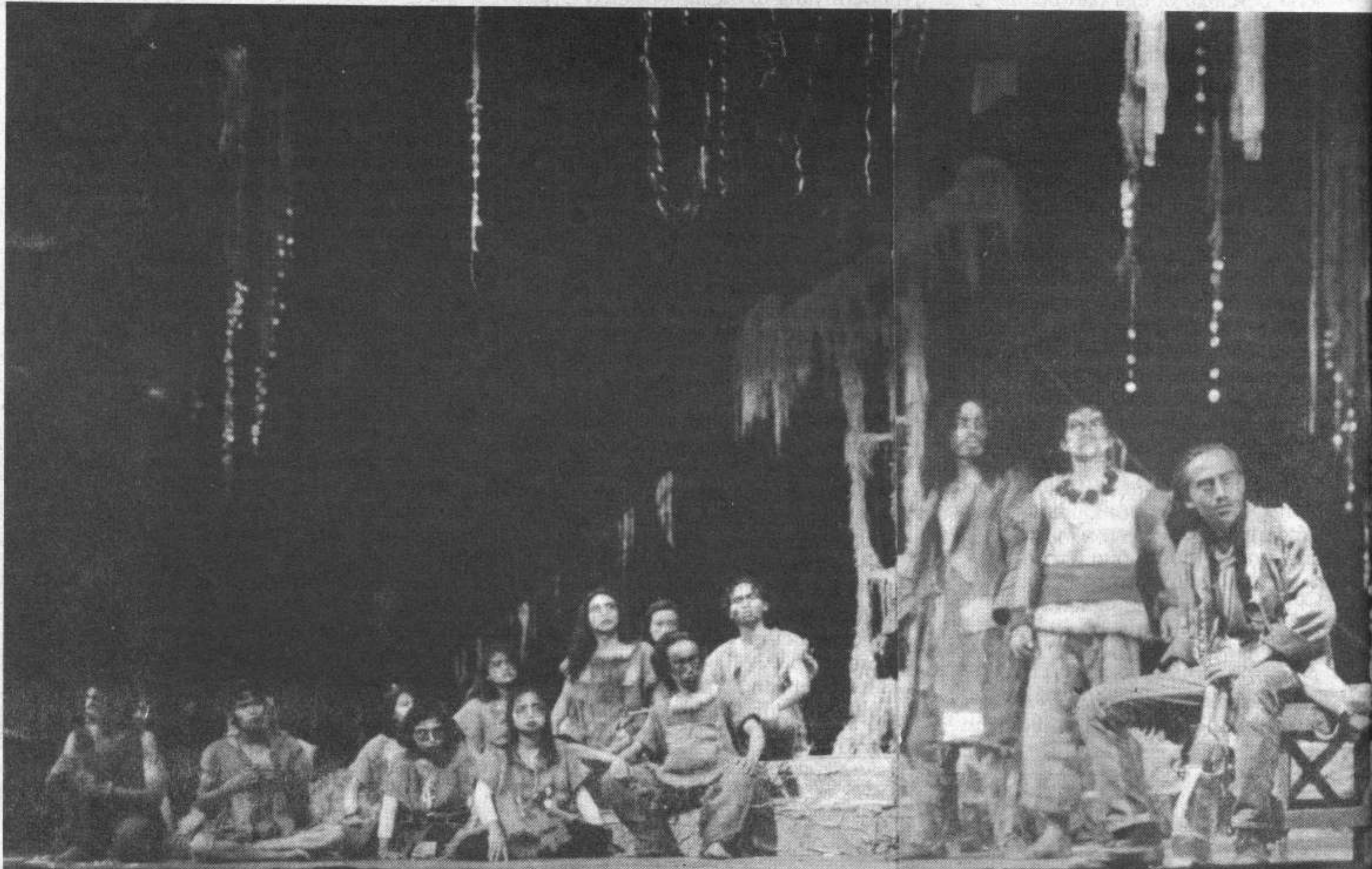

KELIK

Akan tetapi lepas dari masalah pro dan kontra terhadap keberadaan auditorium tersebut, yang harus disadari adalah bahwa bangunan itu telah berdiri. Pembuktian atas efektifitas fungsi bangunan itulah yang kiranya harus dikejar. Sehingga dana pembangunan dengan deretan nol mencapai sembilan itu tidak terbuang sia-sia. Pula, perlambang dari keseluruhan motif yang ada pada gedung tersebut bukan omong kosong belaka.

Abid & Rahmi

Catatan di belakang Pentas

Jejak langkah teater kampus sejalan dengan perjalanan manusia yang menguak sisi gelap terang hidupnya yang sarat makna. Sebuah pertanyaan bisa saja terlintas dalam hening pojok kampus atau riuh sesaat pentas. Apa yang mendorong kelahiran sebuah teater dari perguruan tinggi non-seni ini dan membuatnya bertahan hidup?



OTTO SUKATNO CR, orang yang telah lama bergelut di teater mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, mengurai sejarah teater kampus bertitik tolak dari pembekuan Dewan Mahasiswa tahun 1978, berdampak pada penyempitan ruang gerak kebebasan untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa di bidang politik. Dan perbenturan politik dalam menghimpun masa semakin tajam. "Lalu beberapa teman yang sama-sama memiliki kegelisahan sepakat membentuk satu kelompok teater. Mewadahi ekspresi kesenian mahasiswa IAIN yang selama ini sangat kering dan sepi dengan hal-hal yang berbau seni. Lagipula, ajang ini dapat menjadi ajang tukar pikiran, belajar mengerti hidup bersama, meningkatkan apresiasi seni, dan mengembangkan potensi pribadi. Yang lebih utama, bergelut di teater Eska adalah mencoba menelusuri aspek-aspek kemanusiaan kita, dan teater sebagai media dakwah adalah perwujudan tanggung jawab pada masyarakat untuk mewartakan nilai kehidupan yang sebenarnya."

Sedang Teater Unstrat IKIP Yogyakarta awal pendiriannya hampir tak jauh beda dengan Eska. Namun, "Unstrat bukan mencetak seniman, namun seseorang yang mengerti seni dan menguasai permainan teater, sehingga bila diharapkan jadi guru nanti, bisa mendidik siswanya dasar - dasar teater yang benar," tutur Irawan mengulangi pendahulunya, Latief Anggoro.



Dok. Gelora Mahasiswa

Pementasan Teater Mahasiswa
Dibelit masalah dana dan sumber daya manusia

Menelusuri jejak langkah Teater gadjah Mada UGM, meski baru diresmikan sebagai salah satu UKM di tahun 1974, embrionya sudah ada sejak 1971 saat mementaskan naskah yang disutradarai Mochtar Pagotini.

Teater Gadjah Mada lahir karena dorongan mahasiswa berbagai fakultas dan jurusan yang mencintai teater untuk lebih terlibat dan berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya, khususnya sastra dan teater. Di kelompok ini terjalin ikatan emosional yang kuat untuk sama-sama meningkatkan daya apresiasi, mengembangkan potensi, kreatifitas, kemampuan, dan pengetahuan di bidang teater, yang bermuara pada tumbuhnya empati. Disinilah yang menurut amatan Landung L. Simanjuntak, tetaer kampus masih tetap dibutuhkan mahasiswa.

Tujuan-tujuan ideal ini menghadapi banyak kendala dalam realisasinya. Teater kampus melangkah seret dan jatuh bangun. Diakui Oca, salah satu aktifis teater Gadjah Mada, bahwa teater kampus sering dibelit masalah. "Paling terasa soal dana dan kesungguhan pekerja teater untuk belajar," ungkapnya. Hal ini tidak aneh kalau melihat di satu angkatan misalnya 30 - 40 orang diterima, hanya 10 - 15 orang yang bertahan. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang tak bisa membagi waktu, tidak cocok atau alasan psikologis lainnya. "Tapi seleksi alam seperti itu bagus juga, karena yang tinggal benar-benar serius ingin belajar teater," lanjutnya.



Menggeluti jenis kesenian semacam teater punya nilai tersendiri yang dipungut dari pengalaman-pengalaman mereka selama malang melintang di panggung-panggung tetaer. "Seperti pengalamanku bergabung

dengan teater Gadjah Mada selama empat tahun," tutur Oca, "memberi banyak manfaat. Kita bisa tahu banyak perbedaan karakter manusia dari tokoh-tokoh yang kita mainkan. Efeknya membuat kita paham orang lain berdasarkan wataknya. Juga kerja tim diperlukan nantinya bila terjun ke masyarakat. Belum lagi kerinduan mengekspresikan diri diatas panggung untuk terus menguji kemampuan dari proses belajar kita selama ini. Membuat kita semakin sadar, belum apa-apa, dan masih perlu bekerja lebih keras lagi. Menurutku kalau ingin teater kampus hidup, dia benar-benar didukung oleh pekerja-pekerja teater yang selalu haus belajar dan mau bekerja. Sehingga merasakan teater telah menjadi bagian dari hidupnya."

Di Unstrat pun dihadapi masalah yang sama. Untuk mengatasi kesulitan dana misalnya, biasanya mereka *bantingan* (iuran, red), untuk publikasi atau untuk pementasan. Memang sulit, tapi mereka ingin Ustrat bisa mandiri dan tidak jadi pengemis.

Menurut penuturan teman-teman di Teater Eska, masalah mendasar yang dihadapi adalah bagaimana menghasilkan karya yang bagus. Hal ini menuntut mereka untuk mempertimbangkan banyak aspek dari keberhasilan sebuah pementasan. Dan segi mentalitas, kesiapan untuk berjuang menghidupkan tetaer ini, mendapat perhatian cukup besar. Prakondisi untuk menghadapi tantangan ini telah dibangun sejak awal, sejak rekrutmen anggota. Uang pendaftaran di teater Eska paling mahal di UKM IAIN Suka, yakni sebesar Rp. 10.000,-. Secara otomatis hal ini menjadi seleksi awal, terlihat bahwa hanya orang yang benar-benar berminat yang mau bergabung.

Teater Eska juga berusaha menumbuhkan semangat kreatif rekan- rekannya sesuai bakat mereka. Misalnya ada teman yang yang potensial menulis puisi, cerpen atau ekspresi seni lainnya, mereka dorong untuk aktif berkarya, setelah itu karyanya dibahas bersama-sama.

Untuk meningkatkan kemampuan dalam berteater , teater Eska mentradisikan nonton pementasan bersama-sama. Setelah usai suatu pementasan, biasanya mereka diskusikan aspek-aspek yang terdapat dalam pementasan itu. Tradisi ini sangat berpengaruh karena dapat belajar dari pertunjukan orang lain. Cara lain yang ditempuh adalah dengan berkumpul dan latihan bersama dengan seniornya. Semua itu berguna untuk mentranfer

LIGHTING dan Teater Bandung

BANDUNG, layaknya Yogya, adalah kota teater. Hampir setiap saat kita dapat menyaksikan pementasan teater di kota Kembang tersebut. Naskah yang dimainkan sekitar Shakespeare, Bertolt Brecht, Arifin C. Noor, sampai Putu Wijaya. Kelompok-kelompok teater disini pun lumayan banyak. Ada STB (Studiklub Teater Bandung) yang menjadi induknya, ada teater Bel, Kelompok Payung Hitam, atau Studio Teater ASTI. Sementara itu di lain pihak ada teater kampus yang keberadaannya cukup berarti dalam meramaikan jagad kesenian di Bandung. Teater IKIP Bandung, Stema-ITB, GSSTF-Unpad, Lisma-Unpas, yang notabene adalah kampus non- seni, namun cukup mengentalkan identitas Bandung sebagai kota teater.

Teater kampus di Bandung, yang lebih khusus lagi bisa dikategorikan Teater IKIP Bandung dan Stema-ITB, ternyata mampu bicara banyak dalam keterbatasannya sebagai teater kampus yang cukup klise dengan kendala dana dan intensitas kerja. Namun dengan banyaknya kendala tersebut ternyata tak membuat keduanya pudar atau sekarat, bahkan dalam tradisi teater di IKIP Bandung ada semacam semangat berteater yang cukup keras. Tradisi ini ternyata tidak sia-sia, dari rahimnya telah melahirkan dramawan-dramawan potensial, juga sutradara-sutradara yang berbobot. Bahkan teater IKIP Bandung pernah mengukir prestasi emas dengan menggondol tujuh piala dari delapan piala yang diperebutkan dalam PORSENI Tingkat Nasional.

Kelompok-kelompok teater Bandung tidak begitu saja tampil sederhana, tapi cukup dinamis dengan berbagai eksperimen pementasan. Stema- ITB memilih bentuk teater absurd yang sering membikin polemik seusai pementasannya. Pilihan ini menurut ketuanya, sebagai bentuk pencarian format berteater, tapi mereka lebih asyik dalam kebebasan proses kreatif tanpa bentuk pasti yang menjadi tema tiap pementasan. Lain dengan IKIP yang yang banyak didukung oleh mahasiswa sastra -- yang secara basis akademis mempunyai landasan dramaturgi yang cukup baik -- memilih tema realisme seperti karya-karya Arifin C. Noor.

Menghadapi kendala dana, Stema-ITB ternyata tak mau terus menyusu pada induknya, dana institut. Independensi secara materi mereka usahakan dengan menyewakan perabot *lighting*-nya yang memang lengkap, juga menyediakan teknisi yang *ell-skilled* dalam per*lighting*an. Langkah yang ditempuh Stema ini diikuti pula oleh teater lain, yakni Lisma-Unpas, meski dengan *lighting* yang tak selengkap Stema.

Harry Prabowo dan Asip A.H

ilmu, maupun pengalaman mereka pada yang lebih muda. Dan tidak kalah pentingnya mereka berusaha membina hubungnya dengan pihak luar baik di Yogya maupun daerah lain. Mereka menyadari kondisi ini sangat penting bagi sebuah kelompok teater supaya kaya dengan pengalaman, wawasan dan pergaulan. Ini terbukti dari banyaknya tawaran pementasan dari teater kampus lain. Tapi sayang tidak semua bisa terlaksana karena keterbatasan dana.

Dalam membina hubungan antar personal sehari-hari, ada satu aturan yang telah mentradisi di teater Eska, yaitu manajemen seks. Antar anggota dilarang berpacaran. Seandainya ada, harus serius untuk dinikahi. Tapi lebih ditekankan untuk tidak ada yang berpacaran. Bagi mereka cara ini adalah yang terbaik untuk menjaga moralitas. Setelah mereka jalani ternyata banyak manfaat positifnya. Antara lain bisa saling terbuka dan bebas mengkritik teman waktu latihan tanpa dibebani rasa sungkan berhubung tidak adanya ikatan emosional.

Meski demikian seperti fenomena di organisasi kemahasiswaan lainnya di teater pun tetap dibutuhkan satu atau dua orang yang mati- matian mengurusinya. Penyakit laten di kalangan organisasi kemahasiswaan ini ibarat "aids" yang belum pernah ditemukan obatnya.

Dalam mengamati teater Gadjah Mada, Landung melihat banyak hal yang belum tergarap optimal oleh pekerja teater kampus. "Antara lain, masih kurang usaha teman-teman di teater Gadjah Mada untuk membuat pementasan yang bagus," papar Landung, " Sebenarnya saya tidak menyalahkan mereka, tapi tidak juga mengiyakan tindakan mereka. Karena banyak aspek yang membuat semua jadi begini. Apalagi kita mengetahui, pada saat sekarang teman-teman yang ikut teater belajarnya mulai dari nol. Sementara belajar teater tidak pernah membuat kita puas. Memang beda sekali kondisinya dengan masa dulu. Kalau dulu, ketika saya masuk teater Gadjah Mada sebelumnya telah lama bergabung dengan teater lain di luar kampus. Pengalaman ini ditambah dengan seringnya kita berkumpul, diskusi dengan teman-teman, ketajaman pemikiran dan keluasan wawasan semakin bertambah. Memang pada masa itu kampus sangat bebas dan terbuka dengan pihak luar. Sehingga dari perbenturan dan pergulatan yang kita jalani itu, membuat kita berusaha mencari berproses terus, dan memperkaya batin supaya bisa mengekspresikannya dalam permainan yang lebih baik."

Pasca NKK/BKK kampus menjadi tertutup dari pihak luar. "Keadaan seperti ini mempengaruhi teman-teman di teater," ujar Landung, "Tanpa sadar terjebak pada kenikmatan berkumpul dengan sesama, lalu jadi eksklusif. Jarang berdialog dengan kelompok-kelompok lain di luarnya. Padahal kondisi seperti ini membutakan mata kita untuk melakukan suatu perubahan. Kita seperti mempas-paskan diri dengan keadaan. Seakan menerima saja. Kalau kondisinya begini, ya berteater apa adanya saja."

Sebenarnya teater kampus bisa menyumbangkan karya-karya yang bagus pada masyarakat. Tapi resikonya, mereka perlu belajar lebih banyak dari referensi seringnya menonton pementasan yang bagus dan bermutu, membaca buku-buku mengenai teater maupun disiplin ilmu lainnya, dan berdialog secara intens dengan para senior.

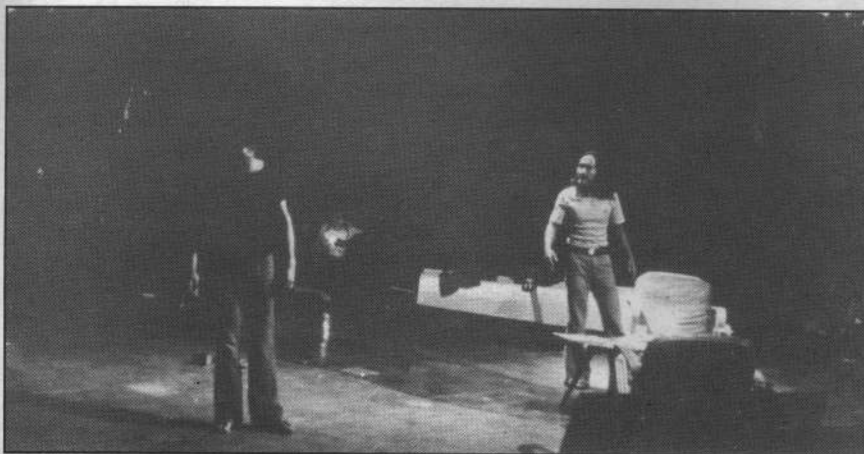
"Memang saya akui, dari pengamatan yang tidak disengaja, banyak teman-teman yang aktif di teater kampus dari kalangan menengah ke bawah yang miskin fasilitas dan dana. Tentu ini satu masalah, untuk menonton pementasan yang bermutu maupun memiliki sebuah buku. Tapi kalau ada usaha, tentu ada jalannya," ucap Landung optimis.

Dwi Soufnita

Wardana, Risdianto Nasir, Aris


Kelik Supriyanto

Sunan Şableng dan Baginda Farouk
Yang masih bertahan


DOK GELORA MAHASISWA

Berteater dan berekspresi
Tidak sekedar soal kesenian belaka

CAPEK DENGAN KATA-KATA

"SAYA ini capek dengan kata-kata. Akan kebanyakan *ngomong nih*, ya. Terpaksa aku bacakan sajak ini, yang barangkali bisa memperlihatkan betapa jijiknya aku pribadi melihat begitu banyaknya berisik kata di sekitar kita," ujar lelaki berpostur kecil di panggung auditorium Fakultas Sastra, September lalu itu. Selanjutnya mengalirlah baris-baris sajak "Serah Terima Kata-kata" dari mulutnya yang terbiasa melafalkan teks-teks drama. Hal ini bisa dimaklumi lantaran dia, Radhar Panca Dahana, telah memimpin dan menyutradarai tak kurang dua puluh pementasan teater, dan sekarang memimpin Teater Kosong Jakarta.

Lantaran kata-kata juga, penyair yang mengaku tidak produktif dalam menulis puisi ini -- ngakunya cuma lima atau sepuluh dalam setahun -- bisa dibilang sukses dalam meniti karir di dunia kesenian dan jurnalistik. Mengenai kesenian, pria kelahiran Maret 1965 di ibukota negri kita ini memandang kecenderungan berkesenian adalah kecenderungan untuk mencoba mengeksplorasi kepentingan-kepentingan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat, karena jalur-jalurnya telah dimekanisir oleh penguasa hanya untuk menyalurkan pemahaman-pemahaman yang sudah diberikan penguasa tersebut.

Dalam kerangka pikir terdapatnya penguasaan jalur komunikasi macam itu, Radhar mengkritik gerakan mahasiswa yang berjalan selama ini. "Gerakan mahasiswa mestinya mampu lebih dulu mengidentifikasikan persoalan yang hendak diangkat. Pada kenyataannya mereka gagal dan masih terjebak dalam wacana-wacana yang dibangun penguasa," papar alumnus Sosiologi UI ini. "Kenapa tidak menciptakan bahasa sendiri?" lanjutnya. Meski disadarinya bahwa usaha ini bukan tanpa halangan, karena penggunaan bahasa lain semacam *plesetan* dan prokem malah dilarang, "Jangankan pemerintah, orangtua pun melarangnya. Paman kita dan teman dekat sudah melarangnya. *Ngomong* bahasa *nggak bener aja dimarah-marahin*. DM-nya mana?"



TIMBUL

Di ranah strategi, Radhar menawarkan upaya penataan strategi dengan belajar dari sejarah lain yang dapat menjadi stimulan. Sebagaimana yang dilakukan Soekarno atau Syahrir, " Kalau misalnya Soekarno, Syahrir, dan lain-lain hanya menggunakan yang ada di dalam dirinya sendiri dan memori pribadi, bisa *nggak* muncul pergerakan itu. Ini bangsa yang begitu mudah terkubur dan begitu nikmat dalam kepalsuan."

Iwan

JILBAB

APA kaitan antara jilbab dan toilet? Ini bukan teka-teki atau sekeping pertanyaan orang iseng, karena kaitan antara keduanya dipaparkan secara serius oleh seorang teolog Islam yang memiliki reputasi internasional. Teolog itu, Asghar Ali Engineer, menyampaikannya atas pertanyaan seorang peserta diskusi bukunya, *Hak- Hak Perempuan dalam Islam* yang diadakan LSPPA Yogyakarta Agustus lalu.

Peserta itu menanyakan bagaimana pandangannya perihal jilbab. Lewat seorang penerjemah (Asghar bicara dalam bahasa Inggris, red), Direktur Institute of Islamic Studies di Bombay, India, ini mendekati masalah tersebut secara historis kontekstual. Menurutnya, orang Arab di awal peradaban Islam belumlah semodern sekarang. Dahulu belum ada toilet, sehingga perempuan-perempuan bangsa Arab bila hendak buang hajat, melakukannya sebelum matahari terbit. Mereka bersama-sama pergi ke tengah padang pasir. Hal ini dilakukan juga oleh para muslimah. Sayangnya, sepulang dari "upacara pagi" itu, mereka sering diganggu oleh para pedagang Arab yang nakal. Bila ditanyakan kepada para pengganggu itu, mengapa mereka berani mengganggu muslimah yang merdeka, mereka membela diri bahwa

Cak Nur dan Calon Menteri

Begawan ilmu yang satu ini memang tercatat sebagai cendekiawan yang jarang tampil di depan publik Yogya, terutama pada forum ilmiah. Namanya yang cukup menjanjikan sebagai salah satu sosok figur cendekiawan kondang di negeri ini. Siapa di antara mahasiswa yang tidak mengenal nama Nurkholis Madjid dengan sederet kontroversi pemikiran yang diwarnainya. Pada

[D]AN TOILET

cahaya yang ada tak memungkinkan mereka mengenali muslimah yang merdeka.
Setelah sampai ke telinga Nabi persoalan itu, tak lama kemudian turunlah ayat yang menganjurkan para muslimah berjilbab untuk membedakan mereka dari kaum yang lain. Dalam hal ini, Asghar menafsirkan bahwa jilbab dianjurkan kepada perempuan muslim agar terlindung dari pelecehan.

Selain sebagai cendikiawan yang banyak menulis masalah teologi, jurisprudensi, sejarah, dan Filsafat Islam, Asghar dikenal pula sebagai partisipan gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi kehormatan komunal pembaharuan di komunitas Bohra. Karyanya yang didiskusikan di atas adalah salah satu telaahnya mengenai telaah dalam Islam.

Kurniawan


DOK. LEPPA

suatu kesempatan beliau akhirnya tampil juga di hadapan insan akademik Yogya.

Kali ini cak Nur - demikian ia biasa dipanggil - tidak membawa kontroversi pemikiran yang selalu identik dengan karier kecendekiawanannya.

Pada kesempatan kali ini cak Nur tampil sebagai pembicara dalam forum diskusi kalangan terbatas, yang diadakan di ruang Seminar FISIPOL UGM, 22 September 1994 yang lalu.

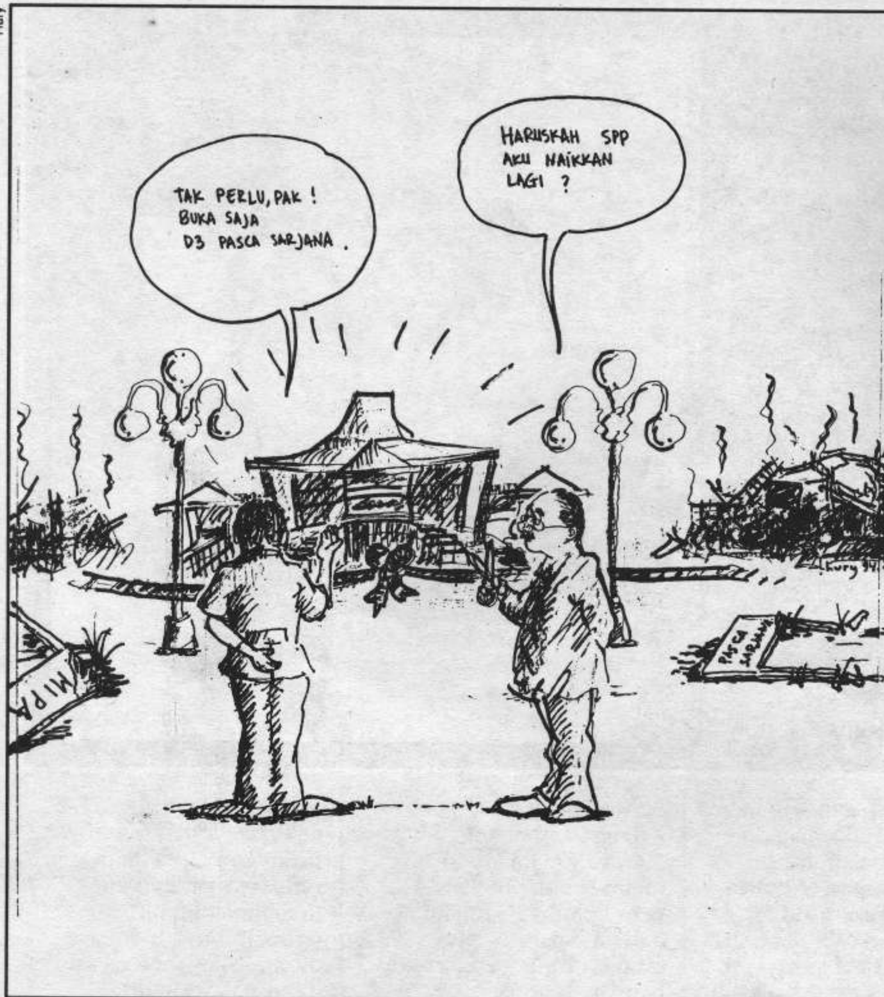
Tampil dengan membawakan tema "Bahasa Politik Islam di Indonesia", lelaki berkacamata tebal kelahiran Jombang, 17 Maret 1939 ini memaparkan analisis pemikirannya yang ketat bahwa dalam bahasa politik di Indonesia cukup banyak memuat kata-kata yang berasal dari kata-kata bahasa Arab. Sembari memaparkan contoh-contohnya, seperti kata-kata *musyawarah*, *majelis*, dan lain-lainnya. Pemimpin Yayasan Paramadina ini juga memetakan basis kekuatan politik umat Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang mempunyai pengaruh bagi masuknya bahasa Arab (bahasa Islam) dalam idiom-idiom bahasa politik di Indonesia. Kemudian ia juga mensinyalir adanya upaya resistensi bahasa Jawa yang dimasukkan secara diam-diam untuk tidak membiarkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa politik secara meluas.


DOK. PPSK

Menyimak pemikiran doktor lulusan Universitas Chicago ini memang selalu menarik. Dengan gaya yang serius, khas seorang akademisi murni, analisanya pemikiran yang tajam dan kaya akan referensi, orang yang menyimak lekuk-liku pemikirannya memang dituntut konsentrasi dan intensitas yang tinggi. Jangan coba-coba melepaskan intensitas, bila tidak ingin kehilangan pemahaman dari setiap perspektif yang ia paparkan.

Tapi siapa bilang Cak Nur tidak bisa humor untuk memecah kekhusyukan hadirin yang menyimak pemikirannya yang memang agak "berat" itu. Buktinya pada acara forum tersebut pemikir yang kini menjabat dosen Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah ini berani juga melempar joke yang agak nyrempet-nyrempet. Kurang lebih demikian celotehnya, "Di Indonesia ini hanya ada tiga pihak yang mengetahui calon menteri yang akan duduk di kursi kabinet. Yakni Tuhan, pak Harto dan ibu Tien," ungkapnya yang disambut tawa hadirin.

Prabowo



KAPITALIS VS SOSIALIS

Dua orang aktivis penganut paham kapitalis dan sosialis berdebat seru tentang keunggulan-keunggulan pahamnya. Masing-masing tidak mau kalah dengan menyodorkan argumentasi yang dilandasi oleh para teoritisi yang dikaguminya.

A: Menurut Marx hakekat dari kapitalisme adalah penghisapan pemilik alat produksi terhadap kelas pekerja. Itu tidak manusiawi.

B: Lebih tidak manusiawi lagi kalau kebebasan individu dikekang dengan alasan untuk kepentingan bersama. Apalagi persepsi kepentingan bersama itu ditentukan oleh elite penguasa yang tidak ada bedanya dengan sebuah kelas penindas yang baru.

Perdebatan tidak kunjung selesai, sampai datanglah seorang yang paling tidak percaya terhadap aliran-aliran besar itu.

C: Bagi saya perbedaan yang mendasar adalah, kalau kapitalisme itu adalah penindasan manusia atas manusia maka sosialisme adalah sebaliknya (baca: penindasan manusia atas manusia juga).

Sunarto

HIPOKRIT I

Dalam sebuah dengar pendapat antara mahasiswa dan birokrat kampus tentang demokratisasi pengambilan kebijakan di kampus, dilontarkanlah berbagai macam tuntutan dari mahasiswa. Di antaranya adalah melibatkan mahasiswa dalam pengabilan segala keputusan di kampus, dan segala kebijakan sebaiknya untuk memenuhi tuntutan arus bawah. Dengan enteng birokrat yang selalu berpedoman pada aturan dari atas tadi menjawab, "Saya sangat menghargai dan mendukung usulan Saudara-Saudara, paling tidak secara moral dan doa".

Cipto

HIPOKRIT II

Seorang pejabat pembantu rektor di bidang kemahasiswaan, dihadapkan pada dua pilihan sulit, ketika disodori proposal dari mahasiswa untuk sebuah acara diskusi yang dinilainya *nyrempet-nyrempet* bahaya. Tetapi mahasiswa yang mengajukan proposal itu selalu dapat meyakinkan bahwa ini adalah kajian ilmiah dan tidak ada hubungannuya dengan politik praktis.

Akhirnya pembantu rektor itu menjawab, "Sebagai cendekiawan saya menyetujui diskusi ini, tetapi sebagai pejabat administrasi, ya gimana lagi?"

Harjono

GUBERNUR JENDERAL

Dari sebuah Laporan penelitian tentang Indonesia, salah seorang penulisnya mencatat perkembangan sistem pemerintahannya: "*Under colonialism, we had a governor-general; now that we're independent, we have general-governors*"*

Crone and Iwan

*) Dikutip sesuai aslinya

PEKAN PEDULI AiDS

26 NOVEMBER - 1 DESEMBER 1994

Dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember, Lentera-PKBI DIY mengadakan PEKAN PEDULI AIDS

Kegiatan ini meliputi:
Lomba Desain Poster : 20 Oktober - 19 November
Lomba Penulisan Opini : 20 Oktober - 19 November
Fun Walk : 27 November
Sarasehan Remaja : 27 November
Pameran : 26 - 29 November
Penutupan : 1 Desember



Jl. Tentara Rakyat Mataram, Gg. Kapas, Badran - Yogyakarta 55231 Telp. (0274) 86767

Kalo kamu butuh
teman berbagi duka dan cita,
informasi tentang remaja dan segudang permasalahannya,
pengisi acara kumpul-kumpul kerabatmu,
tempat untuk mengembangkan dirimu,
SAHABAT REMAJA YOGYAKARTA
menyediakan semuanya.

Layanan Konsultasi Remaja:
- via surat, telepon, dan konsultasi tatap muka
- via udara: Radio Mandala FM setiap Jumat pk. 19.15 - 20.00

Layanan Informasi dan Pengembangan Diri Remaja :
- via udara : Radio Rakosa FM setiap Rabu pk. 19.15 - 20.00
- pelatihan, ceramah, diskusi

Hubungi SAHABAT REMAJA :
Senin-Jumat : 09.00 - 18.00 WIB
Sabtu : 09.00 - 16.00 WIB

ANDA MEMBUTUHKAN INFORMASI AiDS?

Lentera - PKBI DIY akan membantu anda
Hubungi :

HOTLINE LENTERA

Telp.86767 setiap hari
mulai jam 18.00 - 21.00 WIB
kecuali hari Minggu

CERAMAH AIDS

Untuk kelompok umum dan remaja.
tanpa dipungut biaya.
Tulislah surat ke Lentera
melalui alamat:

Lentera
PKBI - DIY
Jl.Tentara Rakyat Mataram Gg Kapas
Yogyakarta 55231 Telp(0274)86767